



RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2025 – 2029



RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2025 – 2029

Akselerasi Transformasi Pelayanan Menuju Damkar
Profesional, Modern, dan Responsif dalam Mendukung
Ketangguhan Daerah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL / PRELIM I

DAFTAR ISI II

DAFTAR TABELIV

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. LATAR BELAKANG 1

1.2. LANDASAN HUKUM 4

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 6

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS..... 10

2.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 10

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah 11

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 12

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 20

2.1.4. Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pemadam Kebakaran 41

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan 48

2.1.6. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan 63

2.1.7. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan 69

2.1.8. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah..... 71

2.1.9. Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah 73

2.2. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 75

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah..... 79

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah..... 87

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN 93

3.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH 94

3.1.1. Tujuan: Penguatan Resiliensi Infrastruktur Daerah 98

3.1.2. Sasaran: Optimalisasi Kinerja Tri-Fungsi Penanggulangan Bencana 98

3.1.3. Strategi: Realisme Fiskal dalam Penetapan Standar Pelayanan Minimum..... 99

3.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 99

3.2.1. Kerangka Regulasi dan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM) sebagai Landasan Strategis 100

3.2.2. Analisis Penurunan Sasaran (Cascading Objectives Analysis) 101

3.2.3. Perumusan Tujuan dan Sasaran Strategis DPKP 102

3.2.4. Keselarasan Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan dengan Pembangunan Nasional, Provinsi, Daerah, dan NSPM..... 104

3.3. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 107

3.3.1. Strategi Pencapaian Sasaran 107

3.3.2.	<i>Arah Kebijakan Tahunan (Pentahapan 2025-2029)</i>	109
3.3.3.	<i>Program Prioritas dan Keterkaitan dengan Nomenklatur Perencanaan</i>	113
3.4.	KERANGKA KERJA PROSPEKTIF TAHUN 2030: MENJAGA KESINAMBUNGAN PEMBANGUNAN	120
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		
.....		123
4.1.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029	123
4.1.1.	<i>Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan</i>	126
4.1.2.	<i>Program Perangkat Daerah</i>	163
4.2.	RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	165
4.2.1.	<i>Strategi Mengatasi Keterbatasan Pendanaan</i>	184
4.2.2.	<i>Rencana Inovasi Strategis 2025-2029</i>	186
4.3.	SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	191
4.4.	SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) DALAM RPJMN TAHUN 2025- 2029	197
4.5.	SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PROYEK PRIORITAS NASIONAL DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 .	198
4.6.	SUBKEGIATAN DUKUNGAN ASTA CITA PADA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	200
4.7.	TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD	203
4.8.	TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) RENSTRA PD	206
BAB V PENUTUP		211
5.1.	KESIMPULAN	211
5.1.1.	<i>Transformasi Strategis DPKP sebagai Pilar Ketahanan Daerah</i>	211
5.1.2.	<i>Paradoks Kinerja sebagai Justifikasi Investasi Strategis</i>	212
5.1.3.	<i>Institusionalisasi Mandat Baru sebagai Respons Kedaruratan Multi-Ancaman</i>	212
5.1.4.	<i>Kerangka Aksi Terukur untuk Menutup Kesenjangan Kapasitas</i>	213
5.2.	KAIDAH PELAKSANAAN	213
5.2.1.	<i>Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan</i>	213
5.2.2.	<i>Mekanisme Evaluasi Kinerja</i>	215
5.3.	MEKANISME PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS.....	217
5.3.1.	<i>Kondisi Pemicu Perubahan (Triggers for Amendment)</i>	217
5.3.2.	<i>Prosedur dan Tahapan Perubahan</i>	218
5.3.3.	<i>Kaidah Adaptabilitas Regulasi</i>	219

DAFTAR TABEL

TABEL II.1 KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA DPKP KABUPATEN GRESIK	13
TABEL II.2 TINGKAT SERTIFIKASI KOMPETENSI PERSONEL DPKP	13
TABEL II.3 INVENTARIS KENDARAAN OPERASIONAL.....	16
TABEL II.4 KETERSEDIAAN ALAT PELINDUNG DIRI (APD) VS KEBUTUHAN IDEAL.....	17
TABEL II.5 DAFTAR INVENTARIS KENDARAAN OPERASIONAL DINAS PEMADAM KEBAKARAN.....	17
TABEL II.6 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKRAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN GRESIK	22
TABEL II.7 REKAPITULASI INDIKATOR SPM DPKP GRESIK (2023-2024)SPM DPKP GRESIK (2023-2024).....	30
TABEL II.8 EVOLUSI KOMPOSISI LAYANAN PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN (2017-2025)	30
TABEL II.9 RANGKUMAN KUALITATIF BEBAN KERJA DAN KINERJA LAYANAN PER KECAMATAN TAHUN 2024.....	33
TABEL II.10 REKAPITULASI LAYANAN PENYELAMATAN PERKECAMATAN	34
TABEL II.11 REKAPITULASI LAYANAN PEMADAMAN PERKECAMATAN	35
TABEL II.12 ANALISIS TREN TOTAL BEBAN KERJA DI KECAMATAN PRIORITAS (2022-2024)	36
TABEL II.13 VISUALISASI PARADOKS KAPASITAS DPKP GRESIK	40
TABEL II.14 REKAPITULASI KINERJA INDIKATOR KUNCI SPM DPKP GRESIK (2023-2024)	45
TABEL II.15 PROFIL DEMOGRAFI DAN KATEGORI RISIKO KEBAKARAN PER KECAMATAN	53
TABEL II.16 MATRIKS KELOMPOK SASARAN PROAKTIF, PROFIL RISIKO, DAN KEBUTUHAN LAYANAN DPKP GRESIK	62
TABEL II.17 MATRIKS KEMITRAAN STRATEGIS DPKP GRESIK	68
TABEL II.18 TEKNIK MENYIMPULKAN ISU STRATEGIS	76
TABEL II.19 MATRIKS IDENTIFIKASI PERMASALAHAN FUNDAMENTAL PELAYANAN DPKP GRESIK.....	84
TABEL II.20 MATRIKS KETERKAITAN ISU STRATEGIS DPKP DENGAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	91
TABEL III.1 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	97
TABEL III.2 MATRIKS KESELARASAN STRATEGIS DPKP GRESIK DENGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN NSPM	106
TABEL III.3 MATRIKS KETERKAITAN ISU STRATEGIS, SASARAN, DAN STRATEGI DPKP 2025-2029.....	108
TABEL III.4 PETA JALAN ARAH KEBIJAKAN DPKP SELARAS DENGAN PENTAHAPAN RPJMD 2025-2029	110
TABEL III.5 MATRIKS KESELARASAN VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, TARGET, DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.....	116
TABEL III.6 MATRIKS KORELASI PROGRAM PRIORITAS DPKP DENGAN AMANAT NSPM	118
TABEL IV.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK	126
TABEL IV.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK.....	163
TABEL IV.3 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN	167
TABEL IV.4 MATRIKS RENCANA AKSI INOVASI DPKP GRESIK 2025-2029	188
TABEL IV.5 MATRIKS PEMETAAN INOVASI TERHADAP SUB KEGIATAN.....	190
TABEL IV.6 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM PENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	193
TABEL IV.7 MATRIKS KESELARASAN SUBKEGIATAN PRIORITAS DPKP DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAERAH (NAWA KARSA).....	195
TABEL IV.8 MATRIKS KONTRIBUSI SUBKEGIATAN DPKP TERHADAP PENCAPAIAN MISI ASTA CITA (PRIORITAS NASIONAL)	200
TABEL IV.9 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2030.....	203
TABEL IV.10 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 – 2030.....	208
TABEL V.1 MATRIKS PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DPKP KABUPATEN GRESIK 2025-2029	217

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Paradigma Baru Proteksi Masyarakat dalam Konteks Akselerasi Pembangunan Gresik

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 menempati posisi krusial dalam arsitektur pembangunan daerah. Dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan operasional lima tahunan, tetapi juga sebagai manifestasi dari pergeseran paradigma fundamental mengenai peran dan fungsi pemadam kebakaran dalam konteks pembangunan yang dinamis. Secara tradisional, DPKP dipandang sebagai entitas reaktif yang bertugas merespons insiden. Namun, dalam kerangka pembangunan modern, peran tersebut telah berevolusi menjadi pilar strategis yang proaktif dalam menjamin keberlangsungan, keamanan, dan ketahanan wilayah. Ketahanan terhadap bencana kebakaran dan non-kebakaran adalah prasyarat fundamental bagi stabilitas ekonomi, iklim investasi yang kondusif, dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Gresik.

Pada tataran nasional, Visi Indonesia Emas 2045 mengamanatkan terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Tahap pertama dalam perjalanan monumental ini diartikulasikan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Pencapaian visi besar ini sangat bergantung pada agregasi kemajuan dan ketahanan di tingkat regional dan lokal. Kabupaten Gresik, sebagai salah satu episentrum industri dan ekonomi di Jawa Timur, memegang peranan vital dalam menyukseskan agenda nasional tersebut. Oleh karena itu, memastikan bahwa fondasi pembangunan di Gresik kokoh dan terlindungi dari berbagai ancaman, termasuk bencana, menjadi sebuah imperatif strategis.

Dalam konteks ini, DPKP Kabupaten Gresik secara inheren terhubung dan berkontribusi pada pencapaian Asta Cita, delapan misi strategis Presiden Republik Indonesia periode 2025-2029. Kontribusi ini melampaui sekadar tugas pemadaman, melainkan merambah ke ranah

stabilitas ekonomi dan sosial. Asta Cita ketiga, yang berfokus pada "melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas," serta Asta Cita kelima, "melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam," secara langsung bergantung pada kapabilitas DPKP dalam memitigasi risiko. Keberadaan kawasan industri strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE) merupakan aset vital yang harus dilindungi dari ancaman kebakaran industri dan kecelakaan bahan berbahaya dan beracun (B3).

Kegagalan dalam memberikan proteksi yang memadai dapat menciptakan iklim investasi yang berisiko tinggi, menghambat laju industrialisasi, dan pada akhirnya mendelegitimasi pencapaian target nasional. Lebih jauh, peran DPKP juga selaras dengan Asta Cita keenam, yakni "membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan." Data historis pelayanan DPKP menunjukkan bahwa kebakaran tidak hanya mengancam aset industri besar, tetapi juga rumah tinggal dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) milik masyarakat. Sebuah insiden kebakaran tunggal berpotensi menghapus akumulasi aset sebuah keluarga berpenghasilan rendah, menjerumuskan mereka ke dalam jurang kemiskinan ekstrem, dan secara langsung mengganggu target penurunan tingkat kemiskinan daerah. Dengan demikian, pelayanan DPKP adalah jaring pengaman sosial-ekonomi yang esensial di tingkat akar rumput.

Pada level provinsi, sinergisitas DPKP terlihat jelas dengan agenda Nawa Bhakti Satya Jilid II yang diusung oleh Gubernur Jawa Timur. Misi "Jatim Sejahtera" yang bertujuan mempercepat pengentasan kemiskinan dan "Jatim Berdaya" yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis UMKM, keduanya mensyaratkan adanya lingkungan yang aman dan stabil. DPKP berkontribusi langsung dengan melindungi aset produktif masyarakat dan pelaku usaha dari kerugian katastrofik akibat bencana. Tanpa perlindungan ini, program-program pemberdayaan ekonomi menjadi rentan dan kehilangan keberlanjutannya. DPKP berfungsi sebagai penjamin keberlangsungan usaha dan stabilitas penghidupan, yang merupakan fondasi dari kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.

Di tingkat lokal, Renstra ini merupakan instrumen utama untuk menerjemahkan Visi Bupati Gresik: "Pembangunan Gresik Baru yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat". Secara spesifik, DPKP adalah salah satu eksekutor kunci dari Misi Ketiga Nawa Karsa Jilid II, yaitu "Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat". Konsep "infrastruktur berkelanjutan" secara implisit mengandung makna ketahanan (resilience). Pembangunan infrastruktur tidak hanya berhenti pada tahap konstruksi, tetapi juga mencakup upaya sistematis untuk melindungi aset infrastruktur tersebut dari berbagai risiko. DPKP memastikan keberlanjutan dan ketangguhan infrastruktur yang telah, sedang, dan akan dibangun, menjadikannya komponen tak terpisahkan dari siklus hidup pembangunan.

Kabupaten Gresik, dengan laju pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur, merupakan sebuah kawasan dengan profil risiko yang unik dan terus meningkat. Akselerasi pembangunan industri, peningkatan kepadatan penduduk, dan intensifikasi aktivitas ekonomi secara simultan menciptakan eskalasi risiko kebakaran, kecelakaan industri, dan tantangan penyelamatan lainnya. Fenomena ini diperparah oleh dampak perubahan iklim global yang memanifestasikan diri dalam bentuk musim kemarau yang lebih panjang dan kering, sehingga meningkatkan potensi kebakaran lahan dan hutan secara eksponensial.

Ironisnya, eskalasi profil risiko ini belum diimbangi dengan penguatan kapasitas DPKP yang sepadan. Analisis kondisi internal menunjukkan adanya kesenjangan kritis antara tuntutan tugas dengan ketersediaan sumber daya. Keterbatasan jumlah personel yang sangat signifikan, sarana dan prasarana yang menua dan tidak memenuhi standar, ketiadaan peralatan spesialis seperti untuk penanganan B3, serta sistem komando dan kendali yang belum modern, merupakan beberapa permasalahan fundamental yang dihadapi. Kesenjangan kapasitas (capacity gap) ini bukan sekadar isu operasional, melainkan sebuah kerentanan strategis bagi seluruh Kabupaten Gresik. Kegagalan dalam memitigasi risiko ini dapat berakibat pada terhambatnya laju investasi, kerugian ekonomi yang masif, korban jiwa, serta degradasi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Oleh karena itu, Renstra ini dirancang tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi sebagai sebuah cetak biru transformasi. Transformasi ini bertujuan untuk memodernisasi DPKP, meningkatkan kapasitasnya secara komprehensif, dan mereposisi perannya sebagai garda terdepan dalam manajemen risiko pembangunan daerah. Penguatan DPKP adalah sebuah investasi strategis untuk mengamankan aset pembangunan, melindungi jiwa dan harta benda masyarakat, serta memastikan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gresik dapat berlangsung secara aman dan berkelanjutan.

Dokumen ini disusun secara sistematis untuk mengidentifikasi permasalahan secara akurat, merumuskan tujuan dan sasaran yang terukur, serta menetapkan strategi, kebijakan, dan program yang realistis dan implementatif. Seluruh kerangka kerja ini dirancang untuk selaras secara vertikal dengan dokumen perencanaan di tingkat atasnya, mulai dari RPJPD Nasional, Provinsi, dan Kabupaten, hingga RPJMN dan RPJMD Provinsi dan Kabupaten.

Selain itu, penyusunan Renstra ini didasarkan pada mandat hukum yang kuat untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Kebakaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018. Pemenuhan SPM bukan lagi sekadar target kinerja, melainkan hak dasar setiap warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, Renstra ini menjadi instrumen untuk memastikan bahwa setiap warga Gresik, tanpa terkecuali, mendapatkan haknya atas pelayanan perlindungan dari bencana kebakaran secara minimal.

Melalui Renstra ini, DPKP Kabupaten Gresik berkomitmen untuk bertransformasi menjadi organisasi yang profesional, modern, responsif, dan adaptif, yang mampu menjawab tantangan zaman dan secara nyata berkontribusi pada terwujudnya Gresik Baru yang Maju, Berkelanjutan, dan Sejahtera.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik untuk periode 2025-2029 ini dilaksanakan dengan ketaatan penuh pada kerangka regulasi yang

komprehensif dan mengikat. Landasan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Satu Data Kabupaten Gresik.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DPKP Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan strategis yang terarah, terukur, dan akuntabel yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah oleh DPKP Kabupaten Gresik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama periode lima tahun. Dokumen ini menjadi dasar dalam penyusunan

rencana kerja Perangkat Daerah tahunan serta sebagai acuan dalam mengukur kinerja Perangkat Daerah.

Secara umum tujuan penyusunan Renstra ini adalah sebagai berikut :

1. Menyusun arah kebijakan dan program pembangunan perangkat daerah yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah.
2. Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan tujuan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
3. Menentukan indikator kinerja dan target yang terukur sebagai dasar evaluasi pencapaian kinerja Perangkat Daerah.
4. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja Perangkat Daerah dalam pelayanan publik.
5. Menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan dokumen Anggaran (RKA/DPA) Perangkat Daerah.

Adapun tujuan spesifik yang hendak dicapai melalui penyusunan dan implementasi Renstra ini adalah sebagai berikut:

1. Menerjemahkan dan menjabarkan secara konkret visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ke dalam rumusan tujuan, sasaran strategis, program, dan kegiatan yang spesifik, relevan, dan implementatif untuk lingkup tugas DPKP.
2. Menetapkan kerangka kerja perencanaan yang jelas, logis, dan terukur sebagai landasan untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan kualitas proteksi masyarakat, terutama dalam upaya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran.
3. Menjadi dasar dan justifikasi dalam perumusan kebijakan, alokasi sumber daya (anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana), serta pengembangan kapasitas kelembagaan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis prioritas.
4. Menyediakan instrumen yang objektif dan transparan untuk pelaksanaan pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap kinerja

DPKP secara periodik, serta sebagai wujud akuntabilitas kepada pimpinan daerah dan masyarakat luas.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Sistematika ini dirancang untuk memastikan alur pikir yang logis dan koheren, dimulai dari analisis kondisi hingga perumusan rencana aksi yang terukur, yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang yang mendasari penyusunan Renstra, landasan hukum yang relevan, maksud dan tujuan penyusunan dokumen, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan analisis komprehensif mengenai kondisi pelayanan DPKP, termasuk tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, dan kinerja pelayanan. Bab ini juga mengidentifikasi permasalahan fundamental dan merumuskan isu-isu strategis yang menjadi fokus utama dalam periode perencanaan.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menetapkan kerangka strategis DPKP, yang mencakup perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah, strategi untuk mencapai sasaran tersebut, serta arah kebijakan yang akan menjadi panduan operasional.

BAB IV : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjabarkan rencana implementatif dalam bentuk program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan pagu indikatif pendanaan untuk periode 2025-2029, serta proyeksi untuk tahun 2030.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi simpulan dari keseluruhan dokumen Renstra, serta menguraikan kaidah pelaksanaan, termasuk mekanisme pengendalian dan evaluasi untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) yang efektif dan relevan mensyaratkan adanya landasan analisis yang kokoh, berbasis pada data empiris dan pemahaman mendalam terhadap konteks operasional. Bab ini menyajikan analisis komprehensif yang menjadi fondasi bagi perumusan tujuan, sasaran, dan strategi DPKP Kabupaten Gresik untuk periode 2025-2029. Analisis ini mencakup empat pilar utama: (1) telaah terhadap tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) serta sumber daya yang dimiliki; (2) evaluasi kinerja pelayanan berdasarkan data historis; (3) identifikasi permasalahan fundamental yang dihadapi; dan (4) perumusan isu-isu strategis yang akan menjadi fokus utama dalam lima tahun mendatang.

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam arsitektur pemerintahan modern, peran DPKP telah mengalami transformasi paradigma yang fundamental. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan kebakaran secara definitif diklasifikasikan sebagai salah satu sub-urusan dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Penempatan ini menegaskan bahwa rasa aman dari ancaman kebakaran dan bencana lainnya adalah hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.

Transformasi ini diwujudkan dalam spektrum tugas dan fungsi yang luas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2022. DPKP tidak lagi hanya berfungsi sebagai unit reaktif pemadam api, melainkan telah menjadi entitas multi-layanan yang mencakup:

1. **Pencegahan dan Pengendalian:** Melaksanakan inspeksi, edukasi, dan penegakan standar keselamatan kebakaran.
2. **Pemadaman dan Penyelamatan:** Melakukan operasi pemadaman kebakaran serta penyelamatan pada kondisi darurat non-kebakaran yang membahayakan manusia.
3. **Pemberdayaan Masyarakat:** Membentuk dan membina Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) sebagai garda terdepan ketahanan komunitas.

4. **Manajemen Data dan Investigasi:** Melakukan pendataan korban dan kerugian serta investigasi penyebab kebakaran sebagai dasar perbaikan kebijakan.

2.1.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja. Sebagai perangkat daerah tipe C, DPKP menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, khususnya pada sub-urusan kebakaran.

Tugas Pokok:

DPKP mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub-urusan kebakaran.

Fungsi:

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, DPKP menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan sarana prasarana pemadam kebakaran.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan sarana prasarana pemadam kebakaran.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan, pemadaman, penyelamatan, dan sarana prasarana pemadam kebakaran.
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi DPKP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan didukung oleh Sekretariat, Bidang Pencegahan, Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pos Pemadam

Kebakaran dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur ini dirancang untuk menjalankan mandat pelayanan secara efektif, mulai dari perencanaan dan pencegahan hingga respons tanggap darurat.

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Kapasitas pelayanan DPKP sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya yang dimiliki, yang mencakup sumber daya manusia (aparatur), aset (sarana dan prasarana), serta anggaran.

1. Sumber Daya Manusia:

Sumber daya manusia merupakan elemen krusial dalam menentukan kapasitas operasional dan strategis suatu organisasi. Dalam konteks institusi seperti DPKP, ketersediaan, komposisi, dan kualifikasi personel secara langsung memengaruhi efektivitas pelayanan publik dan kemampuan adaptasi terhadap tantangan yang dinamis. Analisis mendalam terhadap struktur kepegawaian dan kesenjangan antara personel eksisting dan kebutuhan ideal menjadi imperatif untuk formulasi kebijakan manajemen sumber daya manusia yang berkelanjutan.

Komposisi personel berdasarkan status kepegawaian, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan Tenaga Harian Lepas (THL), mencerminkan model kepegawaian yang diadopsi dan implikasinya terhadap stabilitas kerja, pengembangan karir, serta beban finansial organisasi. Evaluasi proporsi masing-masing kategori ini penting untuk memahami sejauh mana organisasi bergantung pada personel permanen versus non-permanen, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kapasitas institusional jangka panjang.

Lebih lanjut, perbandingan antara jumlah personel yang saat ini tersedia dengan proyeksi kebutuhan ideal berdasarkan analisis beban kerja dan standar rasio merupakan indikator kritis defisit kapasitas. Kesenjangan kuantitatif ini tidak hanya memengaruhi distribusi beban kerja di antara personel eksisting, tetapi juga berpotensi menghambat pencapaian target operasional dan strategis. Oleh karena itu, identifikasi dan kuantifikasi defisit personel menjadi langkah awal yang fundamental dalam perencanaan rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia.

Tabel II.1 Komposisi Sumber Daya Manusia DPKP Kabupaten Gresik
STATUS KEPEGAWAIAN **JUMLAH (ORANG)**

PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)	35
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)	15
TENAGA HARIAN LEPAS (THL)	94
TOTAL PERSONEL EKSISTING	144
KEBUTUHAN PERSONEL IDEAL	491
DEFISIT PERSONEL	347 (70.6%)

Tabel Komposisi Sumber Daya Manusia DPKP Kabupaten Gresik menunjukkan bahwa total personel eksisting berjumlah 144 orang. Dari jumlah tersebut, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 35 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 15 orang, dan Tenaga Harian Lepas (THL) merupakan kategori terbesar dengan 94 orang. Secara proporsional, THL menyumbang sekitar 65.28% dari total personel, sementara PNS dan PPPK masing-masing menyumbang sekitar 24.31% dan 10.42%.

Apabila dibandingkan dengan kebutuhan personel ideal yang mencapai 491 orang, DPKP Kabupaten Gresik menghadapi defisit yang signifikan. Terdapat kesenjangan sebesar 347 orang, yang merepresentasikan defisit sekitar 70.67% dari total kebutuhan ideal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kekurangan kapasitas sumber daya manusia yang substansial, yang berpotensi memengaruhi efisiensi operasional dan kemampuan DPKP dalam memenuhi tuntutan pelayanan publik secara optimal.

Tabel II.2 Tingkat Sertifikasi Kompetensi Personel DPKP
JENIS SERTIFIKASI **JUMLAH** **PERSONEL**
BERSERTIFIKAT

PEMADAM I (KUALIFIKASI DASAR)	51
INSPEKTUR KEBAKARAN	1
PERENCANA AHLI PERTAMA	1

Selanjutnya, untuk mengkaji kualitas dan kapabilitas personel DPKP Kabupaten Gresik, analisis terhadap tingkat sertifikasi kompetensi sangatlah penting. Tabel Tingkat Sertifikasi Kompetensi Personel DPKP Gresik menunjukkan bahwa dari seluruh personel, hanya 51 orang yang memiliki sertifikasi **Pemadam I (Kualifikasi Dasar)**. Angka ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya pelatihan dasar, mayoritas personel belum memiliki kualifikasi teknis yang terstandardisasi untuk penanggulangan kebakaran. Kualifikasi Pemadam I merupakan fondasi esensial bagi setiap petugas pemadam kebakaran, dan rendahnya proporsi personel yang memilikinya

dapat menimbulkan implikasi terhadap efektivitas dan keselamatan dalam operasi.

Lebih lanjut, jumlah personel dengan kualifikasi spesialis sangatlah terbatas. Hanya **1 orang** yang memiliki sertifikasi sebagai **Inspektur Kebakaran** dan **1 orang** sebagai **Perencana Ahli Pertama**. Keberadaan personel dengan kualifikasi ini sangat krusial untuk fungsi-fungsi strategis seperti audit keselamatan kebakaran, investigasi insiden, dan perencanaan mitigasi bencana. Rendahnya jumlah spesialis ini mengindikasikan adanya celah signifikan dalam kapasitas DPKP untuk melakukan tugas-tugas yang membutuhkan keahlian mendalam dan strategis. Kondisi ini menyoroti kebutuhan mendesak akan program pengembangan profesional dan sertifikasi lanjutan untuk meningkatkan kapabilitas teknis dan strategis personel DPKP Kabupaten Gresik.

Tabel yang disajikan memberikan gambaran mengenai komposisi personel eksisting berdasarkan status kepegawaian serta perbandingan antara jumlah personel yang ada dengan kebutuhan personel ideal. Data ini sangat relevan untuk analisis manajemen sumber daya manusia, perencanaan strategis, dan kebijakan kepegawaian dalam suatu organisasi atau instansi.

Temuan Utama:

1. Dominasi Tenaga Harian Lepas (THL):

Dari total personel eksisting sebanyak 144 orang, Tenaga Harian Lepas (THL) merupakan kategori dengan jumlah terbesar, yaitu 94 orang. Ini mengindikasikan ketergantungan yang signifikan pada personel non-permanen atau kontrak dalam operasional organisasi. Proporsi THL yang tinggi (sekitar 65.28% dari total personel eksisting) dapat menunjukkan fleksibilitas dalam rekrutmen dan pengelolaan biaya, namun juga berpotensi menimbulkan isu terkait jaminan kerja, pengembangan karir, dan loyalitas jangka panjang dibandingkan dengan pegawai tetap.

2. Proporsi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK):

Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 35 orang, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 15 orang. Jika digabungkan, jumlah PNS dan PPPK adalah 50 orang, yang hanya sekitar 34.72% dari total personel eksisting. Komposisi ini menunjukkan bahwa

mayoritas personel bukan merupakan pegawai dengan status kepegawaian aparatur sipil negara (ASN) penuh.

3. Kesenjangan Signifikan antara Personel Eksisting dan Kebutuhan Ideal:

Terdapat disparitas yang sangat besar antara jumlah personel eksisting (144 orang) dan kebutuhan personel ideal (491 orang). Kesenjangan ini, yang mencapai 347 orang, mengindikasikan adanya defisit personel yang serius. Defisit ini dapat berdampak pada beban kerja yang tinggi bagi personel yang ada, potensi penurunan kualitas layanan atau output, serta hambatan dalam mencapai tujuan organisasi secara optimal.

Implikasi Akademis dan Manajerial:

1. Struktur Kepegawaian: Tingginya proporsi THL memerlukan kajian mendalam mengenai implikasi terhadap keberlanjutan operasional, kapasitas institusional, dan pengembangan kompetensi jangka panjang. Model kepegawaian yang sangat bergantung pada non-permanen dapat memengaruhi stabilitas organisasi.
2. Perencanaan Sumber Daya Manusia: Data ini menjadi dasar krusial untuk perencanaan sumber daya manusia strategis. Organisasi perlu merumuskan strategi rekrutmen dan pengembangan yang komprehensif untuk mengisi kesenjangan antara personel eksisting dan kebutuhan ideal, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara PNS, PPPK, dan THL.
3. Efisiensi dan Efektivitas: Kesenjangan personel yang besar dapat memengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. Analisis lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasi area mana yang paling terdampak oleh kekurangan personel dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pencapaian target kinerja.
4. Kebijakan dan Regulasi: Komposisi kepegawaian ini juga mengundang pertanyaan tentang bagaimana kebijakan dan regulasi kepegawaian diimplementasikan, terutama terkait dengan pengangkatan PNS dan PPPK, serta pengelolaan THL.

Analisis kuantitatif sumber daya manusia menunjukkan adanya defisit kapasitas yang kritis. Total personel DPKP saat ini berjumlah 144

orang, yang terdiri dari 35 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 15 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 94 Tenaga Harian Lepas (THL). Apabila dibandingkan dengan kebutuhan ideal sebanyak 491 personel yang didasarkan pada analisis beban kerja dan standar rasio populasi, terdapat kesenjangan sebesar 347 orang atau defisit mencapai 70.6%. Kesenjangan kuantitas ini diperparah oleh defisit kualitas kompetensi. Dari total 144 personel, hanya 51 orang yang memiliki sertifikasi kualifikasi dasar Pemadam I, dan hanya segelintir yang memiliki kualifikasi spesialis seperti Inspektur Kebakaran (1 orang) dan Perencana Ahli (1 orang). Rendahnya tingkat sertifikasi ini mengindikasikan adanya kerentanan dalam kapabilitas teknis dan manajerial, yang berdampak langsung pada profesionalisme dan keselamatan dalam operasi penanggulangan bencana yang kompleks.

2. Aset dan Peralatan (Sarana):

Dari aspek sarana operasional, kondisi armada kendaraan menjadi perhatian utama. DPKP mengoperasikan total 22 unit kendaraan roda empat dan 7 unit kendaraan roda dua. Analisis usia kendaraan menunjukkan bahwa sebagian besar armada telah melampaui usia teknis ideal, dengan beberapa unit vital berasal dari tahun 1996, 1997, dan 2002. Kondisi ini tidak hanya meningkatkan biaya pemeliharaan tetapi juga menurunkan tingkat keandalan operasional. Secara spesifik, terdapat tiga unit mobil pemadam berkapasitas 5000 liter yang tidak dilengkapi dengan teknologi power steering, sebuah defisiensi teknis yang secara signifikan meningkatkan risiko kecelakaan dan kelelahan operator saat bermanuver di lalu lintas padat atau medan sulit. Kesenjangan paling kritis teridentifikasi pada ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang merupakan instrumen fundamental bagi keselamatan petugas. Untuk operasi pemadaman kebakaran standar, hanya tersedia 15 set APD dari kebutuhan ideal sebanyak 144 set. Kondisi lebih mengkhawatirkan terlihat pada kesiapan penanganan insiden bahan berbahaya dan beracun (B3), di mana DPKP tidak memiliki satu pun set APD khusus B3 dari kebutuhan ideal sebanyak 53 set. Defisit masif ini menempatkan personel pada tingkat risiko yang sangat tinggi dan secara langsung membatasi kapabilitas DPKP dalam merespons insiden berisiko tinggi.

Tabel II.3 Inventaris Kendaraan Operasional
Jenis Kendaraan Jumlah Unit

<i>Mobil (Roda Empat)</i>	22
<i>Motor (Roda Dua)</i>	7
<i>Total Unit</i>	29

Tabel II.4 Ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) vs Kebutuhan Ideal

JENIS APD	Jumlah Eksisting (Set)	Kebutuhan Optimal(Set)	Jumlah Optimal (set)	Jumlah Ideal (SET)	Kebutuhan Ideal (SET)
PEMADAM	15	76	91	144	129
PEMADAM B3	0	8	29	53	53
RESCUE B3	0	8	29	53	53
RESCUE TAWON	2	16	24	32	30
RESCUE ULAR	0	16	24	32	32
BERBISA					
RESCUE HEWAN	0	16	24	32	32
BUAS					
BERTARING					
RESCUE AIR	1	16	24	32	31

Tabel II.5 Daftar Inventaris Kendaraan Operasional Dinas Pemadam Kebakaran

NO	JENIS	NOMOR POLISI	TYPE KENDARAAN	PAJAK PERTAHUN	INTERVAL SERVIS / TAHUN	Riwayat Kerusakan 5 Tahun Terakhir
1	MOBIL	W 8312 BP	HINO/FG8JJ1D BGJ 4X2	3,030,000.00	4	47
2	MOBIL	W 8314 BP	HINO/FG8JJ1D BGJ 4X2	3,030,000.00	4	28
3	MOBIL	W 8332 BP	ISUZU/FTR33H	2,031,600.00	4	43
4	MOBIL	W 8313 BP	HINO/WU342R HKMTJD3 MT	2,003,000.00	4	21
5	MOBIL	W 8315 BP	HINO/WU342R HKMTJD3 MT	2,003,000.00	4	40
6	MOBIL	W 8826 AP	ISUZU/NKR71 HD E2-1	1,808,700.00	4	44
7	MOBIL	W 1581 AP	INOVA	1,707,800.00	2	8
8	MOBIL	W 8259 AP	ISUZU/NKR71 HD E2-2	1,560,500.00	4	37
9	MOBIL	W 8258 AP	ISUZU/NKR71 HD E2-2	1,560,500.00	4	39
10	MOBIL	W 8224 AP	ISUZU/NKR71 HD E2-2	1,560,500.00	4	46
11	MOBIL	W 8225 AP	ISUZU/NKR71 HD E2-2	1,560,500.00	4	24
12	MOBIL	W 8132 AP	ISUZU/NKR71 HD E2	1,465,500.00	4	27
13	MOBIL	W 1195 AP	TOYOTA/AVANZA 1.5 VELOZ MT	1,150,800.00	2	5
14	MOBIL	W 8197 AP	ISUZU/TBR54 TURBO	1,123,800.00	4	37
15	MOBIL	W 8330 BP	TOYOTA/DYN WU340R TKMQ SD3	1,100,200.00	4	18
16	MOBIL	W 8329 BP	TOYOTA/DYN WU340R TKMQ SD3	1,100,200.00	4	23
17	MOBIL	W 7022 AP	TOYOTA/HILUX 2.5 DSL MT	1,100,000.00	4	37
18	MOBIL	W 1765 AP	DAIHATSUN/ TERIOS TX MT	1,100,000.00	2	5
19	MOBIL	W 8332 AP	ISUZU/TBR54 TURBO	840,000.00	4	17
20	MOBIL	W 8331 AP	ISUZU/TBR54 TURBO	840,000.00	4	15

NO	JENIS	NOMOR POLISI	TYPE KENDARAAN	PAJAK PERTAHUN	INTERVAL SERVIS / TAHUN	Riwayat Kerusakan 5 Tahun Terakhir
21	MOBIL	W 1205 AP	TOYOTA/AVANZA 1.3 E F601RM	768,300.00	2	6
22	MOBIL	W 8143 AP	ISUZU/JCR420	438,400.00	4	40
23	MOTOR	W 2580 AP	YAMAHA/B3M MT	250,000.00	2	4
24	MOTOR	W 4245 AP	HONDA/K1H02N14LO AT	200,000.00	2	8
25	MOTOR	W 2535 GP	YAMAHA/SE 88 JARI - JARI	188,000.00	2	7
26	MOTOR	W 2551 GP	YAMAHA/SE 88 JARI - JARI	188,000.00	2	10
27	MOTOR	W 2526 GP	YAMAHA/SE 88 JARI - JARI	188,000.00	2	9
28	MOTOR	W 2581 AP	YAMAHA/B 6H AI AT	150,000.00	2	8
29	MOTOR	W 2595 GP	HONDA/VARIO AT	144,000.00	2	8

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) saat ini mengelola total 29 unit kendaraan operasional yang vital dalam pelaksanaan tugasnya. Armada ini terdiri dari 22 unit kendaraan roda empat (mobil) dan 7 unit kendaraan roda dua (motor), mencerminkan kebutuhan akan kapasitas penanganan insiden yang beragam, mulai dari respons cepat hingga operasi skala besar.

Dari sisi biaya operasional, pajak tahunan kendaraan bervariasi signifikan, mulai dari Rp 144.000 hingga Rp 3.030.000 per tahun per unit, menandakan keragaman jenis dan kapasitas kendaraan dalam armada. Secara total dalam satu tahun pajak kendaraan dinas pemadam kebakaran membutuhkan biaya kurang lebih sebesar Rp. 34.191.300.

Aspek krusial lainnya adalah kondisi dan keandalan armada. Interval servis kendaraan mayoritas (18 unit) adalah 4 tahun, sementara sisanya (11 unit) memiliki interval 2 tahun. Pola ini perlu diperhatikan untuk memastikan pemeliharaan yang optimal. Riwayat kerusakan kendaraan dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya tantangan serius terhadap keandalan. Rata-rata, setiap kendaraan mengalami sekitar 23 insiden kerusakan dalam periode tersebut. Salah satu unit mobil pemadam bahkan mencatatkan 47 insiden kerusakan, menyoroti adanya kendaraan yang memerlukan perhatian khusus atau bahkan pertimbangan untuk peremajaan.

Secara keseluruhan, inventaris kendaraan operasional DPKP menunjukkan kebutuhan akan strategi manajemen aset yang lebih proaktif, termasuk evaluasi menyeluruh terhadap kendaraan dengan riwayat kerusakan tinggi, optimalisasi jadwal pemeliharaan, dan perencanaan jangka panjang untuk modernisasi armada guna mendukung efektivitas dan keselamatan operasional.

3. Prasarana

Sebagai bagian dari Sumber Daya Perangkat Daerah, prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik merupakan elemen krusial dalam menunjang operasi pemadaman dan penyelamatan. Infrastruktur penunjang (prasarana) DPKP saat ini terdiri dari satu Markas Komando (MAKO) dan empat pos pemadam kebakaran yang didistribusikan secara strategis.

Markas Komando (MAKO), yang berlokasi di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kebomas, Ngipik, Kec. Gresik (koordinat: -7.1633314196877675, 112.63045477755645), berfungsi sebagai pusat administratif, pembinaan, dan operasional seluruh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik.

Selain MAKO, DPKP memiliki empat pos pemadam kebakaran untuk memperpendek waktu tanggap di wilayah layanan yang luas:

1. **Pos Kota / Pos Wilayah Gresik Kota:** Berlokasi di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.102B, Putat Luar, Sukorame, Kec. Gresik (koordinat: -7.163824005828448, 112.63672539610204), pos ini memiliki wilayah operasional yang mencakup empat kecamatan, yaitu Kecamatan Gresik Kota, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, dan Kecamatan Duduk Sampeyan.
2. **Pos Dukun / Pos Wilayah Gresik Utara:** Terletak di Jl. Raya Dukun No.4, Sembung Anyar, Kec. Dukun (koordinat: -6.998455267756721, 112.50930803620508), pos ini melayani tujuh kecamatan di wilayah Gresik Utara, meliputi Kecamatan Bungah, Kecamatan Sedayu, Kecamatan Dukun, Kecamatan Ujung Pangkah, Kecamatan Tambak, Kecamatan Sangkapura, dan Kecamatan Panceng.
3. **Pos Menganti / Pos Wilayah Gresik Selatan:** Dengan alamat di Jl. Raya Menganti, Tlogoh Bedah Huulaan (koordinat: -

7.294541556729223, 112.5926419681636), pos ini bertanggung jawab atas wilayah operasional Gresik Selatan yang mencakup empat kecamatan: Kecamatan Menganti, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Balong Panggang, dan Kecamatan Cerme.

4. **Pos Driyorejo / Pos Pembantu (POSTU) Gresik Selatan:** Berada di rt 11 rw 05 Driyorejo, Jl. Raya Krikilan, Dusun Krikilan, Krikilan, Kec. Driyorejo (koordinat: - 7.370544814876201, 112.58753346680237), pos ini merupakan pos pembantu yang melayani wilayah operasional Gresik Selatan, khususnya tiga kecamatan: Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Kedamean, dan Kecamatan Wringinanom.

Meskipun sebaran pos ini telah dirancang untuk memperpendek waktu tanggap, efektivitasnya dilemahkan oleh ketiadaan prasarana pendukung vital. Kabupaten Gresik belum memiliki jaringan hidran perkotaan yang fungsional, tidak memiliki pusat kendali operasi (PUSDALOP) untuk manajemen operasi pemadaman terpadu, serta menghadapi tantangan kondisi barak di beberapa pos yang tidak memenuhi standar kelayakan, yang berpotensi menurunkan tingkat kesiapsiagaan dan kesejahteraan personel. Mengingat cakupan wilayah yang luas, khususnya daerah kepulauan, perlu adanya penambahan pos di Pulau Bawean yang dapat mengcover Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura untuk memastikan respons yang cepat dan efektif.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik telah menjelma menjadi pilar utama keselamatan publik, sebuah transformasi yang terekam jelas dalam data kinerja dan terpatritasi dalam tingginya kepercayaan masyarakat. Kisah kinerja DPKP Gresik adalah sebuah narasi tentang dedikasi, adaptasi, dan pencapaian luar biasa yang diraih di tengah tantangan keterbatasan sumber daya yang signifikan.

Sub-bab ini menyajikan evaluasi kinerja pelayanan yang komprehensif dan analitis terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik. Analisis ini disusun untuk pertama-tama memvalidasi keunggulan pelayanan dinas yang telah terbukti berdasarkan metrik kinerja resmi, kemudian mendekonstruksi tren

operasional dan tantangan mendasar yang mendefinisikan konteks strategisnya saat ini. Temuan-temuan yang disajikan dalam sub-bab ini menyediakan landasan empiris bagi identifikasi isu-isu strategis serta perumusan program dan alokasi anggaran pada bab-bab selanjutnya dalam Rencana Strategis (Renstra) ini.

Tabel II.6 KINERJA PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKRAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN GRESIK

N O	INDIKATOR	TUJUA N	SASARA N	IK D	IKK/LPP D	SP M	TARGET					REALISASI					RASIO				
							202 0	202 1	202 2	202 3	202 4	202 0	202 1	202 2	202 3	2024	202 0	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Persentase Capaian SPM Sub urusan Kebakaran Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)					✓	100	100	100	100	100	61	96,67	87,15	100	100	61,19	96,67	87,15	100,00	100,00
2	Tingkat Capaian SPM DAMKAR Penerima Layanan.					✓	216	442	580	580	580	57	442	580	911	1034	26,39	100,00	100,00	157,07	178,28
3	Tingkat Capaian SPM DAMKAR Mutu Layanan.					✓	100	100	100	100	100	58,91	96,67	36	100	100	58,91	96,67	35,76	100,00	100,00
4	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak					✓	65	134				17	134				26,15	100,00			
5	Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan					✓	12	12				11	11				91,67	91,67			

N O	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	IK D	IKK/LPP D	SP M	TARGET					REALISASI					RASIO				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	1 . Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan dan/atau kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)					✓			580	580	173			57	911	583			9,83	157,07	336,99
7	2 . Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)					✓			2	2	2			0	2	2			0,00	100,00	100,00
8	3 . Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar dan mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)					✓			3648	63	425			544	63,00	425,00			14,91	100,00	100,00

N O	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	IK D	IKK/LPP D	SP M	TARGET					REALISASI					RASIO				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9	4 . Kapasitas aparaturn pemadam kebakaran dan penyelamatan/ Sumber Daya Manusia					✓			432	5	5			79	5	1			18,29	100,00	20,00
10	5 . Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)					✓				580	1				911	1				157,07	100,00
11	6 . Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)					✓				580	2				911	2				157,07	100,00
12	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				✓				580	580	580			580	911	1034			100,00	157,07	178,28
13	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran				✓				15	15	15			15	13,80	13			100,00	92,00	86,67
14	LHE SAKIP INTERNAL								81	81	81			81,06	81,06	81,42			100,07	100,07	100,52
15	Nilai Survey kepuasan masyarakat atas pelayanan penanganan kebakaran dan Penyelamatan		✓						80	80	81			80	92,40	92,50			100,00	115,50	114,20

N O	INDIKATOR	TUJUAN	SASARAN	IK D	IKK/LPP D	SP M	TARGET					REALISASI					RASIO				
							2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
16	Prosentase penurunan kejadian kebakaran		✓						10	11	12			10,66	50,10	12,50			106,60	455,45	104,17

Puncak Kinerja dan Kepercayaan Publik yang Melambung

Selama dua tahun berturut-turut, pada 2023 dan 2024, DPKP Gresik berhasil mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan realisasi sempurna 100%. Angka ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bukti nyata dari sebuah sistem yang berfungsi optimal. Keunggulan ini terkonfirmasi melalui metrik paling krusial dalam layanan darurat:

waktu tanggap (response time). Dengan rata-rata 13 menit pada tahun 2024, DPKP Gresik secara konsisten lebih cepat dari standar nasional 15 menit, sebuah pencapaian yang secara langsung menyelamatkan nyawa dan harta benda.

Validasi paling otentik atas kinerja ini datang dari masyarakat itu sendiri. Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) mencapai angka 92,50 pada tahun 2024, jauh melampaui target dan masuk dalam kategori "Sangat Baik". Tingginya kepuasan ini adalah cerminan dari layanan yang tidak hanya cepat, tetapi juga profesional, efektif, dan empatik. Kepercayaan publik yang solid ini menjadi aset terbesar yang dimiliki DPKP Gresik.

Transformasi Misi: Dari Pemadam Menjadi Penyelamat Serbaguna

Di balik angka-angka impresif tersebut, terjadi sebuah pergeseran fundamental dalam mandat operasional dinas. Data longitudinal dari 2017 hingga 2025 menunjukkan evolusi dramatis: DPKP Gresik telah bertransformasi dari dinas yang berfokus pada pemadaman kebakaran menjadi lembaga penyelamatan publik serbaguna.

Pada tahun 2017, layanan penyelamatan non-kebakaran hanya menyumbang kurang dari 1% dari total operasi. Namun, pada tahun 2024, proporsinya meroket hingga 52,84%, menjadi mayoritas beban kerja dinas. Fenomena ini didorong secara organik oleh ekspektasi masyarakat yang melihat DPKP sebagai lembaga rujukan utama untuk berbagai kondisi darurat, mulai dari evakuasi hewan liar hingga penanganan insiden teknis lainnya. Realitas ini menunjukkan bahwa DPKP telah berhasil menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, melampaui tugas tradisionalnya.

Paradoks Kinerja: Prestasi di Tengah Keterbatasan

Namun, narasi keberhasilan ini diwarnai oleh sebuah paradoks yang tajam: kinerja output yang luar biasa tinggi secara konsisten dihasilkan oleh input sumber daya yang sangat terbatas. DPKP Gresik beroperasi dengan defisit personel mencapai 70,6%, atau kekurangan 347 orang dari kebutuhan ideal. Kesenjangan ini diperparah oleh keterbatasan kritis pada Alat Pelindung Diri (APD) standar, di mana hanya tersedia 15 set dari kebutuhan ideal sebanyak 144 set. Kondisi ini menegaskan bahwa kinerja unggul yang dicapai saat ini ditopang oleh efisiensi, dedikasi, dan heroisme luar biasa dari para personel di lapangan. Meskipun mengagumkan, model operasional ini secara strategis tidak berkelanjutan dan rentan terhadap risiko kelelahan personel (burnout) serta penurunan kualitas layanan jika tidak segera diatasi melalui investasi strategis pada penguatan kapasitas sumber daya.

1. Validasi Kinerja Unggul Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Analisis kinerja DPKP Kabupaten Gresik harus berlandaskan pada kerangka yuridis fundamental, yaitu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan dipertegas secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, SPM merupakan perwujudan dari pemenuhan hak dasar setiap warga negara atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman bencana.¹ Dalam konteks ini, evaluasi kuantitatif terhadap indikator-indikator kinerja kunci menunjukkan sebuah pencapaian institusional yang signifikan dan konsisten, yang memvalidasi DPKP sebagai organisasi pelayanan publik berkinerja tinggi.

Puncak dari validasi kinerja ini adalah keberhasilan DPKP dalam merealisasikan target "Persentase Capaian SPM Sub-urusan Kebakaran" sebesar 100% selama dua tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2023 dan 2024.¹ Pencapaian ini menandai sebuah lompatan kinerja yang substansial jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, seperti 61% pada tahun 2020, yang mengindikasikan adanya perbaikan sistemik dalam proses perencanaan, eksekusi, dan pelaporan layanan.¹ Keberhasilan ini secara formal memvalidasi bahwa sistem operasional DPKP telah mampu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, pencapaian 100% SPM ini tidak boleh ditafsirkan sebagai titik akhir dari upaya peningkatan kinerja. Sebaliknya, pencapaian ini harus diposisikan secara strategis sebagai sebuah garis dasar kinerja baru (new performance baseline). Keberhasilan ini secara efektif telah meningkatkan ekspektasi dari para pemangku kepentingan, sehingga tantangan fundamental bagi DPKP dalam lima tahun ke depan telah bergeser; dari yang semula berfokus pada upaya mencapai standar, kini menjadi upaya mempertahankan tingkat kinerja unggul tersebut di tengah eskalasi tantangan yang akan diuraikan lebih lanjut.

Keunggulan kinerja ini terkonfirmasi lebih lanjut melalui dekonstruksi indikator-indikator kunci sebagai berikut:

1. **Mutu Pelayanan Melampaui Standar Nasional (Waktu Tanggap):**

Indikator waktu tanggap (*response time*) merupakan tolok ukur paling kritis dalam menilai mutu pelayanan darurat. Standar nasional yang ditetapkan adalah maksimal 15 menit sejak laporan diterima hingga armada tiba di lokasi kejadian. Data kinerja DPKP Gresik menunjukkan keunggulan yang konsisten pada indikator ini, dengan realisasi waktu tanggap rata-rata sebesar 13,80 menit pada tahun 2023 dan meningkat lebih baik menjadi 13 menit pada tahun 2024. Kemampuan merespons lebih cepat dari standar nasional ini bukan sekadar angka statistik; ia adalah manifestasi paling nyata dari efektivitas sistem komunikasi dan kesiapsiagaan personel yang secara langsung berkorelasi dengan minimalisasi kerugian materiil dan pencegahan jatuhnya korban jiwa.

2. **Validasi Publik Melalui Kepuasan Masyarakat (SKM):** Indikator paling sahih dari kualitas sebuah layanan publik adalah persepsi dari penerimanya. Dalam hal ini, DPKP Gresik menunjukkan kinerja yang luar biasa. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara konsisten jauh melampaui target, mencapai 92,40 pada tahun 2023 (target 80) dan 92,50 pada tahun 2024 (target 81). Tingkat kepuasan yang sangat tinggi ini, yang berada pada level "Sangat Baik," merupakan validasi final bahwa layanan yang diberikan tidak hanya cepat, tetapi juga profesional, efektif, dan empatik. Kepercayaan publik yang solid ini adalah sebuah modal sosial dan aset strategis tak berwujud (*intangible asset*) yang sangat berharga. Namun, keberhasilan ini menciptakan sebuah fenomena yang dapat disebut sebagai **"jerat ekspektasi"** (*expectation trap*). Publik kini memiliki standar yang sangat tinggi terhadap DPKP Gresik, yang mungkin akan sangat sulit untuk dipertahankan secara konsisten jika terjadi sedikit saja penurunan kinerja akibat keterbatasan sumber daya. Kepercayaan yang telah dibangun dengan susah payah ini menjadi aset berharga sekaligus sebuah risiko reputasi yang signifikan.

Untuk memberikan gambaran yang terpadu, rekapitulasi kinerja indikator SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik yang disajikan dalam dalam tabel II.7 dan tabel II.8 berikut.

Tabel II.7 Rekapitulasi Indikator SPM DPKP Gresik (2023-2024) SPM DPKP Gresik (2023-2024)

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Rasio Pencapaian 2024 (%)
Persentase Capaian SPM	%	100	100	100	100	100.00
Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>)	Menit	15	13,80	15	13	86.67*
Tingkat Capaian Penerima Layanan	Orang/Kejadian	580	911	580	1.034	178.28
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks	80	92,40	81	92,50	114.20
<i>Catatan: Rasio untuk Waktu Tanggap dihitung berdasarkan prinsip "semakin rendah semakin baik".</i>						

Tabel II.8 Evolusi Komposisi Layanan Pemadaman dan Penyelamatan (2017-2025)

Tahun	Jumlah Layanan Pemadaman	Jumlah Layanan Penyelamatan	Total Layanan	Persentase Layanan Penyelamatan (%)
2017	203	2	205	0.98
2018	267	2	269	0.74
2019	209	7	216	3.24
2020	246	93	339	27.43
2021	188	176	364	48.35
2022	208	371	579	64.08
2023	527	434	961	45.16
2024	490	549	1,039	52.84
2025*	68	576	644	89.44
<i>Catatan: Data tahun 2025 merupakan data parsial hingga bulan Juli.</i>				

2. Analisis Kuantitatif Tren Beban Kerja: Transformasi Mandat dari Pemadam menjadi Penyelamat

Di balik data agregat SPM yang impresif, analisis data operasional longitudinal dari periode 2017 hingga 2025 menyingkap sebuah pergeseran tektonik dalam lanskap permintaan layanan publik. Data ini bukan sekadar menunjukkan fluktuasi volume kerja, melainkan merekam jejak evolusi mandat organisasi yang didorong secara organik oleh ekspektasi dan kebutuhan masyarakat. Fenomena ini menjadi realitas operasional baru yang harus menjadi landasan utama dalam perumusan strategi DPKP ke depan.

Analisis data tren kuantitatif menunjukkan transformasi dramatis dalam komposisi beban kerja DPKP Gresik. Pada tahun 2017, dinas ini menangani 203 insiden pemadaman dan hanya 2 insiden penyelamatan non-kebakaran, di mana layanan penyelamatan hanya menyumbang 0.98% dari total layanan. Namun, dalam kurun waktu kurang dari satu dekade, proporsi ini berbalik secara radikal. Pada tahun 2022, jumlah layanan penyelamatan melonjak menjadi 371 kasus, melampaui layanan pemadaman (208 kasus) dan mencakup 64.08% dari total layanan. Tren ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana layanan penyelamatan mencapai 549 kasus (52.84%). Proyeksi data parsial hingga Juli 2025 bahkan menunjukkan eskalasi yang lebih tajam, dengan layanan penyelamatan diproyeksikan mencapai 89.44% dari total beban kerja. Titik persilangan (crossover point), di mana jumlah layanan penyelamatan mulai secara konsisten melampaui pemadaman, terjadi sekitar tahun 2021-2022.

Pergeseran ini bukan lagi sebuah anomali, melainkan telah menjadi realitas operasional baru yang secara de facto telah mengubah mandat inti organisasi. Perubahan yang terjadi secara bottom-up ini didorong oleh tingginya kepercayaan publik yang membuat masyarakat memandang DPKP sebagai lembaga rujukan utama untuk berbagai kondisi darurat. Organisasi ini tidak lagi dapat didefinisikan sebagai "dinas pemadam kebakaran yang sesekali melakukan penyelamatan", melainkan telah menjadi "dinas penyelamatan publik serbaguna yang juga menangani kebakaran". Implikasi dari transformasi ini sangat mendalam: doktrin operasional, program

pelatihan, spesifikasi peralatan, dan alokasi anggaran yang secara historis dirancang untuk sebuah organisasi yang berfokus pada kebakaran kini berisiko menjadi tidak lagi relevan atau memadai.

Fenomena kedua yang menguatkan argumen ini adalah adanya disparitas masif antara perencanaan dan realitas volume layanan. Analisis terhadap indikator "Tingkat Capaian Penerima Layanan" mengungkap bahwa pada tahun 2024, DPKP menangani 1.034 kejadian, atau mencapai 178% dari target yang ditetapkan sebanyak 580 kejadian. Kesenjangan yang konsisten dan masif ini bukanlah sekadar surplus kinerja, melainkan bukti empiris adanya "defisit perencanaan" (planning deficit). Hal ini mengindikasikan bahwa model proyeksi permintaan layanan yang digunakan saat ini belum mampu mengantisipasi lonjakan eksponensial kebutuhan masyarakat. Data ini menjadi justifikasi paling kuat dalam Renstra ini untuk melakukan revisi fundamental terhadap metode penghitungan kebutuhan dan mengusulkan peningkatan alokasi anggaran operasional yang sepadan dengan beban kerja riil, bukan berdasarkan target yang terbukti tidak lagi relevan.

3. Analisis Spasial Beban Kerja dan Kinerja Pelayanan per Wilayah

Analisis data operasional lebih lanjut memungkinkan pemetaan spasial terhadap distribusi beban kerja di seluruh wilayah Kabupaten Gresik. Meskipun data kuantitatif terperinci untuk setiap jenis layanan di 18 kecamatan tidak disajikan dalam rangkuman strategis ini, pola yang konsisten dan signifikan telah teridentifikasi. Terdapat konsentrasi insiden yang tinggi di beberapa kecamatan yang menjadi pusat aktivitas industri, komersial, dan permukiman padat. Pemetaan ini krusial untuk merumuskan strategi alokasi sumber daya yang berbasis data dan risiko (risk-based resource allocation), bukan sekadar pemerataan administratif. Tabel berikut menyajikan rangkuman kualitatif dari temuan analisis spasial tersebut.

Tabel II.9 Rangkuman Kualitatif Beban Kerja dan Kinerja Layanan per Kecamatan Tahun 2024

NO	KECAMATAN	KEBAKARAN TAHUN 2024	PENYELAMATAN TAHUN 2024	KEPUASAN TAHUN 2024
1	Kebomas	Tingkat Insiden Tertinggi ⁴	Tingkat Insiden Tertinggi ⁴	Data agregat menunjukkan tingkat kepuasan "Sangat Baik" ⁴
2	Manyar	Tingkat Insiden Tertinggi ⁴	Tingkat Insiden Tertinggi ⁴	Data agregat menunjukkan tingkat kepuasan "Sangat Baik" ⁴
3	Driyorejo	Tingkat Insiden Tertinggi ⁴	Tingkat Insiden Tertinggi ⁴	Data agregat menunjukkan tingkat kepuasan "Sangat Baik" ⁴
4	Kecamatan Lainnya	Bervariasi, dengan insiden kebakaran lahan dominan di beberapa wilayah	Bervariasi, menunjukkan peningkatan permintaan layanan di seluruh wilayah	Data agregat menunjukkan tingkat kepuasan "Sangat Baik" ⁴

Tabel II.10 Rekapitulasi Layanan Penyelamatan Perkecamatan

NO	KECAMATAN	TAHUN																	
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Jumlah	SKM	Jumlah	SKM	Jumlah	SKM	Jumlah	SKM	Jumlah	SKM	Jumlah	SKM	Jumlah	SKM	Jumlah	SKM	Jumlah	SKM
1	Luar Wilayah	2	93.30	3	91.37	1	92.36	3	91.37	1	93.30	3	90.51	0	0.00	4	90.44	0	0.00
2	Dukun	5	92.55	3	91.02	2	89.49	6	90.67	2	89.86	4	92.95	10	92.32	8	92.52	2	90.67
3	Balongpanggang	0	0.00	2	90.99	0	0.00	1	91.26	1	92.22	2	89.78	1	90.35	8	92.87	0	0.00
4	Panceng	0	0.00	1	94.87	3	90.76	1	90.74	1	94.60	1	93.29	6	92.90	5	92.01	1	94.11
5	Benjeng	2	92.65	4	93.10	7	92.33	2	91.53	1	91.89	2	91.61	9	91.61	15	91.32	2	90.69
6	Duduksampeyan	3	91.68	5	92.83	1	94.89	2	92.28	8	91.88	5	91.08	16	91.78	6	91.85	1	89.08
7	Wringinanom	4	90.92	3	92.50	4	93.22	7	91.37	6	91.57	7	91.70	36	91.45	16	92.28	2	91.26
8	Ujungpangkah	0	0.00	1	93.69	2	92.08	1	91.86	1	92.84	1	92.45	7	91.83	5	92.14	1	94.69
9	Kedamean	6	92.03	5	90.71	8	91.49	10	92.67	6	93.31	4	92.10	11	91.83	14	91.87	4	92.00
10	Sidayu	6	91.41	9	91.85	4	91.57	6	91.64	4	90.83	2	90.71	18	92.79	9	92.64	2	93.45
11	Manyar	20	92.38	31	91.47	30	91.87	35	92.21	30	91.80	17	91.78	50	91.96	48	91.94	10	92.31
12	Cerme	10	92.10	21	91.42	11	91.98	18	92.96	15	91.88	9	92.03	40	91.97	47	92.45	2	92.18
13	Bungah	6	92.74	4	91.91	5	91.92	4	92.97	3	89.86	8	92.78	20	92.51	18	92.43	1	92.06
14	Menganti	30	92.13	35	92.18	18	91.62	24	91.93	18	91.92	25	92.57	84	92.18	90	91.64	10	92.30
15	Kebomas	75	91.98	91	91.84	64	92.22	80	92.19	55	91.96	68	92.25	114	92.12	110	92.19	14	91.80
16	Driyorejo	29	91.57	39	92.55	36	91.82	35	92.12	23	91.72	38	91.91	93	92.07	72	92.04	10	92.53
17	Gresik	5	92.03	10	91.82	13	91.35	10	91.47	13	92.05	12	91.70	12	92.40	15	91.52	6	91.91
18	Sangkapura	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	Tambak	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	TOTAL	203	92.11	267	92.13	209	91.94	245	91.84	188	91.98	208	91.84	527	92.01	490	92.01	68	92.07

Tabel II.11 Rekapitulasi Layanan Pemadaman Perkecamatan

NO	KECAMATAN	TAHUN																	
		2017		2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		Jumlah	SKM	Jumlah	SKM	Jumlah	SKM	Jumlah	SKM	Jumlah	SKM	Jumlah	SKM	Jumlah	SKM	Jumlah	SKM	Jumlah	SKM
1	Luar Wilayah	2	93.30	3	91.37	1	92.36	3	91.37	1	93.30	3	90.51	0	0.00	4	90.44	0	0.00
2	Dukun	5	92.55	3	91.02	2	89.49	6	90.67	2	89.86	4	92.95	10	92.32	8	92.52	2	90.67
3	Balongpanggang	0	0.00	2	90.99	0	0.00	1	91.26	1	92.22	2	89.78	1	90.35	8	92.87	0	0.00
4	Panceng	0	0.00	1	94.87	3	90.76	1	90.74	1	94.60	1	93.29	6	92.90	5	92.01	1	94.11
5	Benjeng	2	92.65	4	93.10	7	92.33	2	91.53	1	91.89	2	91.61	9	91.61	15	91.32	2	90.69
6	Duduksampeyan	3	91.68	5	92.83	1	94.89	2	92.28	8	91.88	5	91.08	16	91.78	6	91.85	1	89.08
7	Wringinanom	4	90.92	3	92.50	4	93.22	7	91.37	6	91.57	7	91.70	36	91.45	16	92.28	2	91.26
8	Ujungpangkah	0	0.00	1	93.69	2	92.08	1	91.86	1	92.84	1	92.45	7	91.83	5	92.14	1	94.69
9	Kedamean	6	92.03	5	90.71	8	91.49	10	92.67	6	93.31	4	92.10	11	91.83	14	91.87	4	92.00
10	Sidayu	6	91.41	9	91.85	4	91.57	6	91.64	4	90.83	2	90.71	18	92.79	9	92.64	2	93.45
11	Manyar	20	92.38	31	91.47	30	91.87	35	92.21	30	91.80	17	91.78	50	91.96	48	91.94	10	92.31
12	Cerme	10	92.10	21	91.42	11	91.98	18	92.96	15	91.88	9	92.03	40	91.97	47	92.45	2	92.18
13	Bungah	6	92.74	4	91.91	5	91.92	4	92.97	3	89.86	8	92.78	20	92.51	18	92.43	1	92.06
14	Menganti	30	92.13	35	92.18	18	91.62	24	91.93	18	91.92	25	92.57	84	92.18	90	91.64	10	92.30
15	Kebomas	75	91.98	91	91.84	64	92.22	80	92.19	55	91.96	68	92.25	114	92.12	110	92.19	14	91.80
16	Driyorejo	29	91.57	39	92.55	36	91.82	35	92.12	23	91.72	38	91.91	93	92.07	72	92.04	10	92.53
17	Gresik	5	92.03	10	91.82	13	91.35	10	91.47	13	92.05	12	91.70	12	92.40	15	91.52	6	91.91
18	Sangkapura	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
19	Tambak	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
	TOTAL	203	92.11	267	92.13	209	91.94	245	91.84	188	91.98	208	91.84	527	92.01	490	92.01	68	92.07

Data di atas secara tegas mengidentifikasi empat kecamatan—Kebomas, Menganti, Manyar, dan Driyorejo—sebagai episentrum beban kerja DPKP, yang secara kolektif menyumbang 689 dari total 1.039 insiden (66,3%) pada tahun 2024. Untuk memahami dinamika eskalasi beban kerja di zona-zona prioritas ini, tabel berikut menyajikan analisis tren longitudinal selama tiga tahun terakhir.

Tabel II.12 Analisis Tren Total Beban Kerja di Kecamatan Prioritas (2022-2024)

KECAMATAN	TOTAL LAYANAN 2022	TOTAL LAYANAN 2023	TOTAL LAYANAN 2024	TREN
<i>Kebomas</i>	210	260	304	Meningkat Signifikan
<i>Menganti</i>	51	127	151	Meningkat Signifikan
<i>Manyar</i>	69	113	121	Meningkat Signifikan
<i>Driyorejo</i>	74	128	113	Meningkat, dengan fluktuasi

Temuan ini memiliki implikasi strategis yang sangat kuat. Peningkatan beban kerja yang konsisten dan signifikan di kecamatan-kecamatan tersebut merupakan justifikasi empiris untuk memprioritaskan investasi sumber daya—seperti pembangunan pos baru, penempatan armada khusus, atau penguatan program mitigasi berbasis komunitas—di wilayah-wilayah ini untuk meningkatkan efektivitas layanan dan menekan waktu tanggap.

4. Identifikasi Kesenjangan Jangkauan Pelayanan: Urgensi Kehadiran di Kepulauan Bawean

Di balik data beban kerja yang terkonsentrasi di wilayah daratan, analisis spasial mengungkap sebuah kesenjangan pelayanan yang absolut dan kritis. Data rekapitulasi layanan secara konsisten menunjukkan angka nol untuk Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak, yang secara geografis terletak di Kepulauan Bawean. Angka nol ini tidak boleh diinterpretasikan sebagai ketiadaan insiden kebakaran atau kebutuhan

penyelamatan, melainkan sebagai bukti empiris adanya "blank spot" pelayanan.

Kondisi ini secara efektif menegaskan bahwa jangkauan layanan DPKP belum mencakup seluruh wilayah yurisdiksi Kabupaten Gresik, sebuah permasalahan fundamental yang diidentifikasi secara eksplisit dalam dokumen perencanaan strategis. Ketidadaan pos, armada, dan personel di Pulau Bawean menyebabkan warga di kedua kecamatan tersebut tidak memiliki akses yang setara terhadap pelayanan dasar sub-urusan kebakaran. Hal ini merupakan anomali serius dalam konteks pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan yang sama.

Oleh karena itu, urgensi penambahan pos pemadam kebakaran di Pulau Bawean melampaui sekadar isu pengembangan infrastruktur; ini adalah isu pemenuhan hak dasar warga negara dan pemerataan pelayanan publik. Rencana Strategis DPKP untuk periode 2025-2029 telah secara tepat mengidentifikasi isu ini dan memasukkan agenda perluasan jangkauan layanan ke wilayah yang belum terlayani, termasuk Pulau Bawean, sebagai salah satu prioritas utama. Pembangunan pos di Bawean bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah imperatif strategis untuk memastikan bahwa negara hadir dan memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gresik tanpa terkecuali.

5. Paradoks Kinerja: Keunggulan Pelayanan di Tengah Keterbatasan Kapasitas Sumber Daya

Analisis kinerja DPKP Kabupaten Gresik menyingkap sebuah fenomena yang kontradiktif namun fundamental: sebuah **paradoks kapasitas**, di mana *output* layanan yang luar biasa tinggi secara konsisten dihasilkan oleh *input* sumber daya yang terbatas dan kritis. Paradoks ini, meskipun menjadi bukti efisiensi operasional yang mengagumkan, juga merupakan sinyal kerentanan sistemik yang mengancam keberlanjutan kinerja di masa depan.

Di satu sisi, data menunjukkan pencapaian SPM 100%, waktu tanggap 13 menit, dan kepuasan publik di atas 92. Di sisi lain, analisis kondisi internal yang dipaparkan dalam dokumen perencanaan ini mengidentifikasi adanya defisit dan kesenjangan kapasitas yang masif pada pilar-pilar fundamental organisasi :

- **Defisit Sumber Daya Manusia:** Terdapat defisit personel yang kritis mencapai 70,6%. Total personel DPKP saat ini berjumlah 144 orang, sementara kebutuhan ideal yang didasarkan pada analisis beban kerja dan standar rasio populasi adalah sebanyak 491 personel, sehingga terdapat kekurangan 347 orang. Kesenjangan kuantitas ini diperparah oleh defisit kualitas kompetensi, di mana dari total 144 personel, hanya 51 orang yang memiliki sertifikasi kualifikasi dasar Pemadam I.
- **Kesenjangan Sarana Kritis:** Kondisi armada kendaraan menjadi perhatian utama. Sebagian besar armada telah melampaui usia teknis ideal, dengan beberapa unit vital berasal dari tahun 1996 dan 2002. Terdapat tiga unit mobil pemadam yang tidak dilengkapi dengan teknologi *power steering*, sebuah defisiensi teknis yang secara signifikan meningkatkan risiko operasional.
- **Defisit Masif Alat Pelindung Diri (APD):** Kesenjangan paling kritis teridentifikasi pada ketersediaan APD yang merupakan instrumen fundamental bagi keselamatan petugas. Untuk operasi pemadaman kebakaran standar, hanya tersedia 15 set APD dari kebutuhan ideal sebanyak 144 set (hanya 10,4% terpenuhi). Kondisi lebih mengkhawatirkan terlihat pada kesiapan penanganan insiden bahan berbahaya dan beracun (B3), di mana DPKP tidak memiliki satu pun set APD khusus B3 dari kebutuhan ideal sebanyak 53 set (0% terpenuhi).

Kontradiksi antara dua set fakta ini hanya dapat dijelaskan oleh satu faktor: kinerja unggul tersebut ditopang oleh efisiensi operasional yang luar biasa dan dedikasi serta "heroisme" personel di lapangan yang bekerja melampaui kapasitas standar untuk menutupi defisit sistemik. Model

operasional seperti ini, meskipun menghasilkan capaian yang patut diapresiasi, secara strategis sangat rapuh dan tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Kondisi ini dapat dideskripsikan sebagai **efisien tetapi tidak tangguh** (*efficient but not resilient*). Ketergantungan pada kapabilitas individu yang bekerja di bawah tekanan beban kerja berlebih menciptakan risiko kelelahan personel (*burnout*) dan tidak memiliki kapasitas cadangan (*surge capacity*) untuk menangani insiden berskala besar atau yang terjadi secara simultan.

Lebih jauh, analisis data SPM dari tahun 2022 hingga 2024 mengungkap sebuah praktik yang mengkhawatirkan, yaitu penurunan target indikator *input* secara drastis untuk menyesuaikan dengan realitas anggaran. Sebagai contoh, target kapasitas SDM (yang diukur dalam orang/kegiatan) turun dari 432 pada tahun 2022 menjadi hanya 5 orang/kegiatan pada 2023 dan 2024. Penurunan target yang dramatis ini bukanlah cerminan dari kebutuhan riil yang menurun, melainkan sebuah penyesuaian pragmatis. Dengan kata lain, target disesuaikan agar dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia, bukan ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan objektif. Praktik ini secara efektif menormalisasi kondisi under-investasi dan menutupi skala kesenjangan kapasitas yang sebenarnya, menciptakan sebuah siklus **"penurunan yang terinstitusionalisasi"** (*institutionalized decline*) yang mengancam fondasi organisasi.

Tabel II.13 Visualisasi Paradoks Kapasitas DPKP Gresik

KINERJA OUTPUT (Keberhasilan)	KAPASITAS INPUT (Keterbatasan)
Capaian SPM: 100% (2024)	Defisit Personel: 70,6% (Kekurangan 347 Orang)
Waktu Tanggap: 13 Menit (2024)	Ketersediaan APD Standar: 10,4% (15 dari 144 Set)
Skor Kepuasan Masyarakat (SKM): 92,50 (2024)	Ketersediaan APD B3 (Hazmat): 0% (0 dari 53 Set)
Realisasi Layanan vs Target: 178% (2024)	Armada Operasional: Sebagian Besar Melampaui Usia Teknis

6. Implikasi Kinerja Terhadap Perencanaan Strategis

Sintesis dari keseluruhan analisis kinerja ini memberikan landasan empiris yang kokoh bagi arah kebijakan strategis DPKP untuk lima tahun ke depan. Temuan-temuan utama—bahwa DPKP Gresik telah membuktikan keunggulan operasionalnya dan meraih kepercayaan publik yang luar biasa, namun keberhasilan ini bertumpu pada fondasi sumber daya yang rapuh dan terjadi dalam konteks transformasi misi yang fundamental—merupakan justifikasi utama bagi identifikasi permasalahan pada sub-bab 2.2 serta perumusan program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang diusulkan pada Bab IV Renstra ini.

Kinerja unggul yang dicapai hingga saat ini merupakan fondasi yang sangat kuat, tetapi ia bukanlah jaminan untuk masa depan. Tanpa adanya intervensi kebijakan yang strategis untuk mengatasi kesenjangan kapasitas, menyesuaikan struktur organisasi dan anggaran dengan mandat baru, serta memperkuat pilar-pilar proaktif dan partisipatif, kinerja yang saat ini dibanggakan berisiko mengalami degradasi. Ketergantungan berlebihan pada dedikasi personel tanpa dukungan sistemik yang memadai adalah strategi yang tidak berkelanjutan.

Oleh karena itu, kinerja DPKP harus diposisikan dalam konteks agenda pembangunan daerah yang lebih luas. Setiap operasi yang dilakukan

oleh DPKP memberikan kontribusi nyata dan terukur terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, khususnya **TPB 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan**, terutama pada Target 11.5, yaitu mengurangi secara signifikan jumlah kematian, korban terdampak, dan kerugian ekonomi akibat bencana.

Dengan membingkai kinerjanya dalam kerangka ini, DPKP dapat mereposisi perannya di dalam struktur pemerintahan daerah. DPKP bukan lagi sekadar unit teknis operasional yang bersifat sebagai pusat biaya (*cost center*), melainkan merupakan **aktor strategis dan enabler fundamental bagi terwujudnya ketahanan wilayah** (*regional resilience*). Investasi pada penguatan kapasitas DPKP adalah investasi langsung untuk melindungi aset-aset pembangunan vital seperti Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE), menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik. Pemosisian strategis ini memberikan justifikasi tingkat tinggi yang selaras dengan visi Bupati "Pembangunan Gresik Baru yang Berkelanjutan" , sehingga memperkuat argumentasi akan pentingnya dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ini.

2.1.4. Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pemadam Kebakaran

Sub-bab ini menyajikan analisis mendalam terhadap kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik, yang diposisikan sebagai landasan empiris untuk perumusan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029. Analisis ini tidak hanya berfokus pada validasi pencapaian target kuantitatif, tetapi juga mengurai dinamika kompleks di baliknya. Temuan inti dari evaluasi ini mengungkap tiga fenomena strategis yang saling terkait: pertama, keberhasilan institusional dalam mencapai dan bahkan melampaui Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan secara nasional. Kedua, adanya sebuah

paradoks fundamental di mana kinerja unggul tersebut dicapai di tengah keterbatasan kapasitas sumber daya yang kritis, yang menandakan adanya model operasional yang rapuh dan tidak berkelanjutan. Ketiga, terjadinya transformasi mandat operasional secara de facto, di mana DPKP telah berevolusi dari lembaga pemadam kebakaran menjadi entitas penyelamatan publik serbaguna, sebuah realitas yang menuntut reorientasi strategis secara menyeluruh. Sintesis dari temuan-temuan ini menegaskan bahwa meskipun DPKP Gresik telah membuktikan keunggulan pelayanannya dan meraih kepercayaan publik yang luar biasa, keberlanjutan kinerja tersebut sangat bergantung pada kemampuan organisasi untuk mengatasi kesenjangan kapasitas dan mengadaptasi strategi, struktur, serta alokasi sumber dayanya agar selaras dengan profil risiko dan ekspektasi masyarakat yang telah berubah secara fundamental.

1. Konteks Regulasi dan Validasi Kinerja Agregat

Analisis terhadap kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik harus berlandaskan pada kerangka yuridis yang fundamental, yaitu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan dipertegas secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018, SPM bukanlah sekadar target administratif, melainkan merupakan perwujudan dari pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman bencana. Dengan demikian, setiap layanan yang diselenggarakan oleh DPKP merupakan implementasi dari kewajiban konstitusional pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan mutu pelayanan dasar di bidang ketenteraman dan ketertiban umum.

Dalam konteks ini, evaluasi kinerja DPKP Kabupaten Gresik menunjukkan sebuah pencapaian institusional yang signifikan. Data kinerja agregat yang tervalidasi menunjukkan bahwa DPKP berhasil merealisasikan target "Persentase Capaian SPM Sub-urusan Kebakaran" sebesar 100% selama dua tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2023 dan 2024. Pencapaian ini menandai sebuah lompatan kinerja yang substansial jika

dibandingkan dengan realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, seperti 61% pada tahun 2020, yang mengindikasikan adanya perbaikan sistemik dalam proses perencanaan, eksekusi, dan pelaporan layanan. Keberhasilan ini secara formal memvalidasi bahwa sistem operasional DPKP telah mampu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Namun, dalam kerangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029, pencapaian 100% SPM ini tidak boleh ditafsirkan sebagai titik akhir dari upaya peningkatan kinerja. Sebaliknya, pencapaian ini harus diposisikan secara strategis sebagai sebuah garis dasar kinerja baru (*new performance baseline*). Keberhasilan ini secara efektif telah meningkatkan ekspektasi dari para pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah maupun masyarakat luas. Dengan demikian, tantangan fundamental bagi DPKP dalam lima tahun ke depan telah bergeser; dari yang semula berfokus pada upaya mencapai standar, kini menjadi upaya mempertahankan tingkat kinerja unggul tersebut di tengah eskalasi permintaan layanan dan tantangan keterbatasan sumber daya yang mendasar. Oleh karena itu, Renstra ini harus merumuskan strategi dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk memastikan keberlanjutan kinerja tinggi ini dan mencegah terjadinya regresi dari standar pelayanan prima yang telah berhasil dibuktikan.

2. Evaluasi Kuantitatif Indikator Kunci Kinerja: Evidensi Keunggulan Pelayanan

Untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang mendorong pencapaian agregat 100% SPM, perlu dilakukan dekonstruksi terhadap indikator-indikator kinerja kunci yang membentuknya. Analisis granular ini menyajikan potret berbasis data mengenai keunggulan pelayanan DPKP Gresik pada berbagai dimensi.

Mutu Pelayanan: Kecepatan Respons Melampaui Standar Nasional (*Response Time*) Indikator waktu tanggap (*response time*) merupakan tolok ukur paling kritis dalam menilai mutu pelayanan darurat. Standar nasional yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 adalah maksimal 15 menit sejak laporan diterima hingga armada tiba di lokasi kejadian. Data kinerja DPKP Gresik menunjukkan keunggulan yang

konsisten pada indikator ini, dengan realisasi waktu tanggap rata-rata sebesar 13,80 menit pada tahun 2023 dan meningkat lebih baik menjadi 13 menit pada tahun 2024. Kemampuan merespons lebih cepat dari standar nasional ini bukan sekadar angka statistik; ia adalah manifestasi paling nyata dari efektivitas sistem komunikasi, kesiapsiagaan personel, dan manajemen operasional. Kecepatan ini secara langsung berkorelasi dengan minimalisasi kerugian materiil, pencegahan jatuhnya korban jiwa, dan yang tidak kalah penting, menjadi pilar utama yang membangun tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi.

Jangkauan Pelayanan: Realitas Permintaan Jauh Melampaui Perencanaan Analisis terhadap indikator "Tingkat Capaian Penerima Layanan" mengungkap sebuah fenomena krusial, yaitu adanya disparitas yang sangat besar antara target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dengan realitas volume layanan yang diberikan. Pada tahun 2023, DPKP menangani 911 kejadian, atau 157% dari target yang ditetapkan sebanyak 580 kejadian. Angka ini kembali melonjak secara signifikan pada tahun 2024, di mana DPKP menangani 1.034 kejadian, atau mencapai 178% dari target yang sama. Kesenjangan masif antara perencanaan dan realitas ini harus diinterpretasikan lebih dari sekadar sebuah surplus kinerja. Hal ini merupakan bukti empiris adanya *defisit perencanaan* (planning deficit), yang mengindikasikan bahwa model proyeksi permintaan layanan yang digunakan saat ini belum mampu mengantisipasi lonjakan eksponensial kebutuhan masyarakat. Data ini menjadi justifikasi paling kuat dalam Renstra ini untuk melakukan revisi fundamental terhadap metode penghitungan kebutuhan dan mengusulkan peningkatan alokasi anggaran operasional yang sepadan dengan beban kerja riil, bukan berdasarkan target yang terbukti tidak lagi relevan.

Validasi Publik: Kepercayaan Masyarakat sebagai Aset Strategis Intangible Indikator paling sahih dari kualitas sebuah layanan publik adalah persepsi dari penerimanya. Dalam hal ini, DPKP Gresik menunjukkan kinerja yang luar biasa. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara konsisten jauh melampaui target, mencapai 92,40 pada tahun 2023 (target 80) dan

92,50 pada tahun 2024 (target 81). Tingkat kepuasan yang sangat tinggi ini merupakan validasi final bahwa layanan yang diberikan tidak hanya cepat, tetapi juga profesional, efektif, dan empatik. Kepercayaan publik yang solid ini adalah sebuah modal sosial dan aset strategis tak berwujud (*intangible asset*) yang sangat berharga, yang mempermudah DPKP dalam menjalankan program-program pencegahan dan edukasi di masa mendatang.

Untuk memberikan gambaran yang terpadu, rekapitulasi kinerja indikator kunci disajikan dalam tabel berikut.

Tabel II.14 Rekapitulasi Kinerja Indikator Kunci SPM DPKP Gresik (2023-2024)

Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Rasio Pencapaian 2024 (%)
Persentase Capaian SPM	%	100	100	100	100	100.00
Waktu Tanggap (<i>Response Time</i>)	Menit	15	13,80	15	13	86.67*
Tingkat Capaian Penerima Layanan	Orang/Kejadian	580	911	580	1034	178.28
Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Indeks	80	92,40	81	92,50	114.20
*Catatan: Rasio untuk Waktu Tanggap dihitung berdasarkan prinsip "semakin rendah semakin baik". Realisasi 13 menit dari target 15 menit menunjukkan kinerja yang melampaui standar.						

3. Analisis Strategis: Mengurai Paradoks Kinerja dan Transformasi Mandat

Analisis kinerja tidak berhenti pada kuantifikasi pencapaian, tetapi harus dilanjutkan dengan mengurai "bagaimana" pencapaian tersebut diraih dan "apa" implikasinya bagi masa depan organisasi. Pada tataran ini, teridentifikasi dua fenomena strategis yang menjadi inti dari tantangan dan peluang DPKP Gresik.

Paradoks Kinerja Unggul di Tengah Keterbatasan Kapasitas.

Fenomena pertama adalah adanya sebuah paradoks fundamental: pencapaian kinerja pelayanan yang unggul diraih di tengah kondisi keterbatasan kapasitas sumber daya yang kritis. Di satu sisi, data menunjukkan pencapaian SPM 100%, waktu tanggap 13 menit, dan kepuasan publik di atas 92. Di sisi lain, analisis kondisi internal yang

dipaparkan dalam dokumen Renstra ini mengidentifikasi adanya defisit personel yang mencapai 70,6% (kekurangan 347 orang dari kebutuhan ideal) dan kesenjangan masif pada ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) standar, di mana hanya tersedia 15 set dari kebutuhan 144 set.

Kontradiksi antara dua set fakta ini hanya dapat dijelaskan oleh satu faktor: kinerja unggul tersebut ditopang oleh efisiensi operasional yang luar biasa dan dedikasi serta "heroisme" personel di lapangan yang bekerja melampaui kapasitas standar untuk menutupi defisit sistemik. Model operasional seperti ini, meskipun menghasilkan capaian yang patut diapresiasi, secara strategis sangat rapuh dan tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Ketergantungan pada kapabilitas individu yang bekerja di bawah tekanan beban kerja berlebih menciptakan risiko kelelahan personel (*burnout*) dan tidak memiliki kapasitas cadangan (*surge capacity*) untuk menangani insiden berskala besar atau yang terjadi secara simultan. Oleh karena itu, tugas paling mendesak bagi Renstra 2025-2029 adalah mentransformasikan keberhasilan yang rapuh dan bergantung pada manusia ini menjadi sebuah kapabilitas institusional yang kokoh dan berketahanan (*resilient*). Usulan investasi strategis pada penambahan personel dan modernisasi peralatan harus dipandang bukan sebagai "hadiah" atas kinerja baik, melainkan sebagai sebuah kebutuhan mendesak untuk memitigasi risiko kerapuhan sistemik dan menjamin keberlanjutan pelayanan prima.

Transformasi Fundamental Profil Layanan: Evolusi dari Pemadam menjadi Penyelamat. Fenomena strategis kedua adalah terjadinya transformasi fundamental pada mandat operasional DPKP secara *de facto*. Analisis data longitudinal dari tahun 2017 hingga 2025 menunjukkan pergeseran dramatis dalam komposisi layanan. Porsi layanan penyelamatan non-kebakaran telah melonjak secara eksponensial, dari hanya 0,98% dari total layanan pada tahun 2017, menjadi mayoritas beban kerja dengan mencapai 52,84% pada tahun 2024. Data parsial hingga Juli 2025 bahkan menunjukkan tren yang lebih ekstrem, di mana layanan penyelamatan mendominasi hingga 89,44% dari total operasi.

Data ini memberikan bukti yang tidak terbantahkan bahwa misi DPKP Gresik di lapangan telah berevolusi secara permanen. Organisasi ini tidak lagi dapat didefinisikan sebagai "dinas pemadam kebakaran yang sesekali melakukan penyelamatan", melainkan telah menjadi "dinas penyelamatan publik serbaguna yang juga menangani kebakaran". Transformasi ini didorong oleh tingginya kepercayaan publik yang membuat masyarakat memandang DPKP sebagai lembaga rujukan utama untuk berbagai kondisi darurat. Realitas operasional ini menjadikan sebuah rencana strategis yang masih berpusat dominan pada pemadaman kebakaran menjadi usang. Oleh karena itu, Renstra 2025-2029 harus secara sadar dan sistematis melakukan reorientasi untuk merefleksikan dan menginstitutionalisasikan mandat ganda ini. Perubahan ini harus tecermin dalam segala aspek, mulai dari perumusan visi dan misi, struktur program dan kegiatan, prioritas pengadaan sarana prasarana (misalnya, peralatan khusus *rescue*), hingga kurikulum pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

4. Implikasi Strategis dan Kontribusi terhadap Pembangunan Daerah

Sintesis dari keseluruhan analisis kinerja ini memberikan landasan empiris yang kokoh bagi arah kebijakan strategis DPKP untuk lima tahun ke depan. Temuan-temuan utama—bahwa DPKP Gresik telah membuktikan keunggulan operasionalnya dan meraih kepercayaan publik yang luar biasa, namun keberhasilan ini bertumpu pada fondasi sumber daya yang rapuh dan terjadi dalam konteks transformasi misi yang fundamental—merupakan justifikasi utama bagi identifikasi permasalahan pada sub-bab 2.2 serta perumusan program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang diusulkan pada Bab IV Renstra ini.

Lebih jauh, kinerja DPKP harus diposisikan dalam konteks agenda pembangunan daerah yang lebih luas. Setiap operasi yang dilakukan oleh DPKP memberikan kontribusi nyata dan terukur terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)*, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor

111 Tahun 2022. Secara spesifik, kinerja DPKP merupakan implementasi langsung dari

TPB 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan, khususnya pada **Target 11.5**, yaitu mengurangi secara signifikan jumlah kematian, korban terdampak, dan kerugian ekonomi akibat bencana.

Dengan membingkai kinerjanya dalam kerangka TPB, DPKP dapat mereposisi perannya di dalam struktur pemerintahan daerah. DPKP bukan lagi sekadar unit teknis operasional yang bersifat sebagai pusat biaya (*cost center*), melainkan merupakan aktor strategis dan enabler fundamental bagi terwujudnya ketahanan wilayah (*regional resilience*). Investasi pada penguatan kapasitas DPKP adalah investasi langsung untuk melindungi aset-aset pembangunan, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan keberlanjutan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik. Pemosisian strategis ini memberikan justifikasi tingkat tinggi yang selaras dengan visi pembangunan Bupati dan Bappeda, sehingga memperkuat argumentasi akan pentingnya dukungan kebijakan dan anggaran yang memadai untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ini.

2.1.5. Kelompok Sasaran Layanan

Subbab ini menyajikan analisis komprehensif mengenai kelompok sasaran layanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik. Analisis ini melampaui sekadar enumerasi konvensional penerima layanan, menuju sebuah segmentasi strategis yang didasarkan pada dualisme tipologi layanan (reaktif dan proaktif) serta pemrofilan berbasis risiko kewilayahan Kabupaten Gresik. Pendekatan ini dilandaskan pada analisis empiris terhadap data layanan longitudinal dan diselaraskan dengan mandat regulasi yang terus berevolusi, yang mengatur penyelenggaraan urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan di Indonesia.

Secara umum, kelompok sasaran layanan DPKP mencakup seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah di wilayah

yurisdiksi Kabupaten Gresik. Kelompok sasaran ini dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama:

1. **Masyarakat Umum:** Seluruh penduduk Kabupaten Gresik yang berpotensi terdampak bencana kebakaran di permukiman, fasilitas umum, dan ruang publik.
2. **Sektor Industri dan Dunia Usaha:** Perusahaan, pabrik, kawasan industri (termasuk KEK dan JIPE), pusat perbelanjaan, hotel, dan entitas komersial lainnya yang memiliki risiko kebakaran spesifik dan berdampak ekonomi tinggi.
3. **Instansi Pemerintah dan Fasilitas Publik:** Kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, pasar, dan infrastruktur vital lainnya.
4. **Kelompok Rentan:** Anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki kerentanan lebih tinggi terhadap dampak bencana.

Untuk memberikan landasan strategis yang lebih tajam bagi perencanaan, klasifikasi umum di atas diperdalam melalui analisis berbasis tipologi layanan dan profil risiko kewilayahan, sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian berikut.

1. Evolusi Mandat dan Tipologi Fundamental Sasaran Layanan

Untuk memahami secara utuh siapa yang menjadi sasaran layanan DPKP Gresik, esensial untuk terlebih dahulu memetakan konteks fundamental yang membentuk lanskap operasional dinas. Komposisi dan prioritas sasaran layanan telah mengalami transformasi signifikan, yang menuntut adanya sebuah kerangka analisis strategis baru yang mampu menangkap perubahan paradigma tersebut.

Pergeseran Paradigma dari Pemadaman Kebakaran menuju Penyelamatan Komprehensif

Analisis kuantitatif terhadap data rekapitulasi pelayanan DPKP Gresik periode Januari 2017 hingga Juli 2025 (parsial) menunjukkan sebuah

transformasi yang dramatis dan tidak dapat dimungkiri dalam profil permintaan layanan dari masyarakat. Pada tahun 2017, layanan penyelamatan non-kebakaran hanya merupakan fraksi minor dari total operasi, yakni sebanyak 2 dari 205 layanan atau setara dengan 0.98%. Kondisi ini relatif stagnan hingga tahun 2019. Namun, sejak tahun 2020, terjadi sebuah eskalasi eksponensial pada permintaan layanan penyelamatan. Proporsi layanan penyelamatan melonjak menjadi 27.43% pada tahun 2020, mencapai titik paritas dengan layanan pemadaman pada tahun 2021 (48.35%), dan kemudian secara konsisten mendominasi volume operasi pada tahun-tahun berikutnya, mencapai 64.08% pada tahun 2022 dan puncaknya 89.44% pada data parsial hingga Juli 2025.

Tren data ini bukan sekadar anomali statistik, melainkan merupakan validasi empiris dari pergeseran mandat regulasi yang dikukuhkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020. Regulasi ini secara eksplisit mengamanatkan perluasan tugas DPKP untuk mencakup operasi penyelamatan non-kebakaran, penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta fungsi-fungsi proteksi masyarakat lainnya. Transformasi ini menjadi faktor tunggal paling determinan yang membentuk definisi modern mengenai basis "pelanggan" atau sasaran layanan DPKP.

Implikasi strategis dari diversifikasi layanan ini bersifat fundamental dan meresap ke seluruh aspek kelembagaan. Jika panggilan penyelamatan kini mendominasi frekuensi operasi, maka identitas DPKP telah berevolusi dari sekadar "dinas pemadam kebakaran" menjadi sebuah "badan respons darurat multi-ancaman" (multi-hazard emergency response agency). Konsekuensinya, setiap elemen yang dibahas dalam Rencana Strategis ini, mulai dari pengembangan sumber daya manusia, pengadaan sarana prasarana, hingga sistem komando dan pengendalian, harus merefleksikan realitas operasional baru ini. Personel kini menuntut spektrum kompetensi yang lebih luas (misalnya, penanganan satwa, penyelamatan teknis, evakuasi di ruang terbatas), kebutuhan peralatan menjadi jauh lebih beragam (tidak lagi terbatas pada selang dan pompa, tetapi mencakup peralatan potong, alat

tangkap, dan detektor spesialis), serta persepsi dan ekspektasi publik yang telah meluas, yang pada gilirannya mendorong peningkatan variasi permintaan layanan. Oleh karena itu, setiap model perencanaan strategis yang masih berpusat secara eksklusif pada paradigma pemadaman kebakaran menjadi tidak valid. Definisi "kelompok sasaran layanan" harus diperluas dan disegmentasi ulang untuk mencerminkan realitas operasional yang telah bertransformasi ini.

Kerangka Konseptual: Sasaran Layanan Reaktif versus Proaktif

Berlandaskan pada pergeseran operasional yang telah teridentifikasi, subbab ini mengadopsi kerangka analisis konseptual untuk mengklasifikasikan kelompok sasaran layanan, sebagaimana diartikulasikan dalam riset pendukung. Kerangka ini membedakan sasaran layanan secara fundamental ke dalam dua tipologi: reaktif dan proaktif.

1. **Kelompok Sasaran Reaktif (Reactive Target Groups):** Kelompok ini mencakup keseluruhan populasi, entitas usaha, dan institusi yang berada dalam batas yurisdiksi administratif Kabupaten Gresik. Sifat dari kelompok sasaran ini adalah universal dan tidak terdiferensiasi. Definisinya berakar pada hak setiap warga negara untuk menerima layanan kedaruratan pada saat terjadi insiden, baik kebakaran maupun non-kebakaran. Kewajiban DPKP untuk melayani kelompok ini diatur secara tegas dalam kerangka Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Dalam konteks ini, setiap individu atau entitas yang menghubungi DPKP untuk meminta pertolongan darurat secara otomatis menjadi bagian dari kelompok sasaran reaktif.
2. **Kelompok Sasaran Proaktif (Proactive Target Groups):** Berbeda dengan sasaran reaktif yang bersifat universal, kelompok sasaran proaktif merupakan segmen-segmen spesifik dan dapat diidentifikasi dari populasi, sektor ekonomi, dan infrastruktur sosial yang menjadi prioritas untuk menerima layanan non-kedaruratan yang bersifat preventif. Layanan proaktif ini dirancang untuk memitigasi risiko *sebelum* sebuah insiden terjadi. Bentuk layanannya mencakup, namun

tidak terbatas pada, inspeksi keselamatan kebakaran, audit sistem proteksi, sosialisasi dan edukasi publik, pelatihan, serta program pemberdayaan masyarakat seperti pembentukan Relawan Kebakaran (Redkar).

Pembedaan antara sasaran reaktif dan proaktif ini lebih dari sekadar sebuah latihan akademis; ia secara fundamental membingkai ulang peran DPKP dalam arsitektur tata kelola pemerintahan daerah. Fungsi reaktif memosisikan DPKP sebagai sebuah entitas yang esensial namun pada dasarnya merupakan pusat biaya (*cost center*)—sebuah alokasi anggaran yang diperlukan untuk menangani masalah setelah terjadi. Sebaliknya, fungsi proaktif mereposisi DPKP sebagai mitra strategis dalam pembangunan dan peningkatan ketahanan daerah (*regional resilience*). Ketika DPKP secara proaktif bekerja sama dengan sektor industri untuk mencegah kebakaran, mereka tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga melindungi aset ekonomi, menjaga iklim investasi, dan menjamin keberlangsungan rantai pasok. Ketika mereka mengedukasi masyarakat di permukiman padat, mereka sedang membangun ketahanan sosial dari tingkat akar rumput. Kerangka kerja ini menyediakan justifikasi yang kuat untuk alokasi anggaran, memungkinkan DPKP untuk berargumen tidak hanya untuk pendanaan guna "merespons lebih banyak kebakaran," tetapi untuk "investasi strategis guna mengurangi dampak ekonomi dan sosial dari insiden yang dapat dicegah," yang secara langsung menyelaraskan misinya dengan tujuan pembangunan Kabupaten Gresik yang lebih luas.

2. Analisis Kelompok Sasaran Proaktif Berbasis Profil Risiko Daerah

Bagian ini menyajikan analisis mendalam dan berbasis bukti terhadap kelompok-kelompok sasaran proaktif yang menjadi prioritas bagi DPKP Gresik. Identifikasi dan pemrofilan kelompok sasaran ini dilakukan melalui integrasi data demografis, struktur ekonomi, dan profil risiko spesifik daerah dengan analisis kuantitatif terhadap data historis insiden dari rekam jejak layanan DPKP periode 2017-2025.

Profil Demografi dan Kategori Risiko Kebakaran Permukiman per Kecamatan

Untuk memprioritaskan alokasi sumber daya proaktif secara efektif, pemetaan risiko kebakaran di tingkat kecamatan menjadi krusial. Analisis ini mengintegrasikan data demografi (jumlah dan kepadatan penduduk) dengan data konsentrasi industri untuk menghasilkan kategori risiko yang dapat ditindaklanjuti. Kepadatan penduduk merupakan proksi utama untuk risiko kebakaran permukiman, di mana area yang lebih padat cenderung meningkatkan potensi penyalaran api dan mempersulit akses evakuasi serta mobilisasi unit pemadam. Sementara itu, konsentrasi industri menunjukkan adanya risiko spesifik yang terkait dengan proses produksi, penyimpanan bahan mudah terbakar, dan dampak ekonomi yang tinggi.

Tabel II.15 Profil Demografi dan Kategori Risiko Kebakaran per Kecamatan

<i>N o</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Luas Wilaya h (Km²) 5</i>	<i>Jumlah Pendudu k (Jiwa, 2023) 6</i>	<i>Kepadata n Penduduk (Jiwa/Km²) 7</i>	<i>Jumlah Industri/Usah a 4</i>	<i>Kategori Risiko Kebakaran Permukima n</i>
1	Gresik	5.34	77,144	14,446	100	Sangat Tinggi
2	Kebomas	30.16	112,028	3,716	120	Tinggi
3	Driyorejo	51.29	111,048	2,165	410	Tinggi
4	Manyar	75.56	119,744	1,585	288	Tinggi
5	Menganti	68.73	127,809	1,859	120	Sedang- Tinggi
6	Cerme	71.73	81,093	1,131	150	Sedang- Tinggi
7	Wringinanom	62.62	72,672	1,160	100	Sedang
8	Kedamean	65.95	64,984	985	60	Sedang
9	Benjeng	61.26	63,332	1,034	36	Sedang
10	Bungah	57.06	67,127	1,176	35	Sedang
11	Dukun	59.69	62,556	1,048	25	Sedang
12	Balongpangan	63.88	51,760	810	43	Sedang
13	Sidayu	47.11	43,450	922	20	Rendah
14	Duduksampeyan	74.29	49,880	671	40	Rendah
15	Panceng	64.12	41,111	641	15	Rendah
16	Ujungpangkah	94.83	49,511	522	10	Rendah
17	Sangkapura	118.27	53,283	451	5	Rendah
18	Tambak	76.92	30,333	394	5	Rendah

Analisis dari pemetaan di atas menunjukkan adanya heterogenitas risiko yang signifikan antarwilayah. **Kecamatan Gresik** diklasifikasikan sebagai **Sangat Tinggi** karena memiliki kepadatan penduduk yang ekstrem

(14.446 jiwa/km²), menciptakan lingkungan perkotaan yang sangat padat di mana risiko penularan api sangat tinggi.

Kategori **Tinggi** ditetapkan untuk **Kecamatan Kebomas, Driyorejo, dan Manyar**. Kebomas memiliki kepadatan penduduk tertinggi kedua dan merupakan lokasi historis dengan frekuensi kebakaran yang signifikan. Driyorejo dan Manyar menonjol karena konsentrasi industri tertinggi di Kabupaten Gresik, dengan masing-masing 410 dan 288 unit usaha/industri, termasuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Manyar.

Kategori **Sedang-Tinggi** mencakup **Kecamatan Menganti dan Cerme**. Menganti memiliki populasi absolut tertinggi, yang berkorelasi dengan jumlah permukiman yang luas, sementara Cerme memiliki jumlah industri yang signifikan. Kecamatan-kecamatan lainnya diklasifikasikan sebagai

Sedang atau **Rendah** berdasarkan kombinasi kepadatan penduduk dan aktivitas industri yang lebih rendah, dengan kecamatan di Pulau Bawean (Sangkapura dan Tambak) menunjukkan risiko terendah karena kepadatan penduduk dan industri yang minimal.

Kawasan dengan risiko sedang hingga rendah diidentifikasi berdasarkan kombinasi kepadatan penduduk dan aktivitas industri yang relatif rendah. Kecamatan di Pulau Bawean, yaitu Sangkapura dan Tambak, menunjukkan risiko terendah karena karakteristik demografi dan industri yang minimal. Meskipun demikian, kecamatan-kecamatan di Pulau Bawean tidak dapat diabaikan dalam perencanaan mitigasi risiko kebakaran, mengingat keterbatasan akses terhadap layanan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Gresik akibat kurangnya sarana dan prasarana pendukung di wilayah tersebut.

1. Masyarakat Umum dan Permukiman

Kelompok sasaran ini mencakup seluruh penduduk Kabupaten Gresik, dengan penekanan khusus pada mereka yang bermukim di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi. Profil risiko utama untuk segmen ini adalah kebakaran domestik (di dalam rumah) dan insiden kebakaran di lahan

kosong atau tempat pembuangan sampah liar yang memiliki frekuensi kejadian sangat tinggi. Analisis risiko demografis mengidentifikasi Kecamatan Gresik (kepadatan 14.690 jiwa/km²) dan Kecamatan Kebomas (kepadatan 3.660 jiwa/km²) sebagai wilayah dengan kategori risiko "Sangat Tinggi" untuk kebakaran permukiman.

Analisis terhadap data riwayat layanan DPKP Gresik memberikan validasi empiris yang kuat terhadap profil risiko ini :

1. **Risiko Kebakaran Domestik:** Rekam jejak layanan secara konsisten mencatat insiden dengan klasifikasi "Rumah". Penyebabnya sangat beragam, mencerminkan aktivitas sehari-hari, mulai dari insiden terkait kelistrikan seperti "Konsleting Listrik" hingga insiden yang bersumber dari aktivitas dapur seperti "Kebocoran Tabung Gas LPG" atau "Gas Kompor Bocor". Insiden-insiden ini memiliki potensi konsekuensi yang fatal dan kerugian material yang signifikan bagi individu dan keluarga.
2. **Risiko Kebakaran Lahan dan Sampah:** Kategori ini merupakan jenis insiden dengan volume tertinggi yang ditangani oleh DPKP. Data riwayat layanan dipenuhi oleh entri dengan klasifikasi "Lahan Kosong" di mana media yang terbakar adalah "Ilalang", "Sampah", atau "Rumput Ilalang". Penyebab yang paling sering tercatat adalah "Pembakaran Sampah" yang tidak terkendali. Pola ini bersifat kronis, terjadi secara konsisten sepanjang tahun (dengan eskalasi pada musim kemarau) dan tersebar di berbagai kecamatan, dengan frekuensi yang sangat tinggi tercatat di Kecamatan Driyorejo, Kebomas, dan Menganti.

Kebutuhan layanan proaktif yang paling mendesak untuk kelompok sasaran ini adalah edukasi dan kampanye penyadaran publik secara masif. Materi edukasi harus difokuskan pada mitigasi risiko yang paling umum terjadi, seperti praktik kelistrikan yang aman di rumah, penggunaan tabung gas LPG yang benar, dan yang paling krusial, kampanye agresif mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari praktik membakar sampah dan pembukaan lahan dengan cara membakar. Intervensi ini selaras dengan

fungsi "Sosialisasi dan Edukasi" serta "Pemberdayaan Masyarakat" yang diamanatkan kepada DPKP.

Frekuensi kejadian kebakaran lahan kosong yang sangat tinggi bukanlah fenomena acak, melainkan konsekuensi langsung dari perilaku masyarakat yang meluas terkait pengelolaan sampah dan pembersihan lahan. Perilaku ini, pada gilirannya, menciptakan beban operasional yang signifikan dan dapat diprediksi terhadap sumber daya reaktif DPKP. Setiap kali satu unit mobil pemadam beserta personelnya dikerahkan untuk memadamkan api ilalang atau tumpukan sampah yang dapat dicegah, unit tersebut menjadi tidak tersedia untuk merespons insiden lain yang mungkin lebih kritis dan mengancam jiwa, seperti kebakaran rumah dengan korban terperangkap atau kecelakaan lalu lintas yang memerlukan evakuasi. Dengan demikian, investasi pada program proaktif yang menargetkan perubahan perilaku ini bukan sekadar sebuah program "pelengkap", melainkan sebuah keharusan strategis untuk mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi pengerahan aset reaktif yang terbatas. Mengurangi frekuensi insiden berdampak rendah namun bervolume tinggi ini secara langsung akan meningkatkan kesiapsiagaan dan ketersediaan sumber daya untuk menangani keadaan darurat yang berdampak tinggi.

2. Sektor Ekonomi, Industri, dan Komersial

Sebagai salah satu pilar ekonomi regional dengan konsentrasi industri yang signifikan, sektor ekonomi Kabupaten Gresik merupakan kelompok sasaran proaktif dengan profil risiko yang unik: berfrekuensi insiden relatif lebih rendah namun berpotensi menimbulkan konsekuensi yang sangat tinggi (*low-frequency, high-consequence*). Sebuah insiden di fasilitas industri tidak hanya mengancam jiwa pekerja, tetapi juga berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi masif, kerusakan lingkungan, dan disrupsi terhadap stabilitas ekonomi regional.

Data riwayat layanan DPKP Gresik menyajikan spektrum risiko industri yang luas dan beragam :

1. **Manufaktur dan Produksi:** Insiden yang tercatat seringkali melibatkan material dan proses industri yang spesifik dan berbahaya, seperti kebakaran di "INDUSTRI KAPAS", "Serbuk Kayu dan Boiler", "Pabrik Tiner", "Gudang Oven Jagung", hingga kegagalan mesin produksi seperti "BLOWER".
2. **Pergudangan dan Logistik:** Kebakaran di fasilitas penyimpanan merupakan ancaman yang konstan, mengingat akumulasi material mudah terbakar dalam volume besar. Insiden yang ditangani mencakup kebakaran di "Gudang Bahan Produksi", "Gudang Plastik", dan "gudang kertas".
3. **Fasilitas Khusus dan Berisiko Tinggi:** Data juga mencakup layanan di fasilitas yang memerlukan penanganan dan pengetahuan teknis spesifik. Hal ini paling jelas terlihat pada data "Layanan Rekomendasi" (LAYANAN REKOM), yang merupakan catatan dari inspeksi proaktif. DPKP secara rutin melakukan pemeriksaan di fasilitas seperti SPBU, "Industri Kimia", "Industri Gas", dan "Pabrik Pengolahan Makanan. Ratusan entri layanan rekomendasi ini adalah bukti nyata bahwa fungsi proaktif terhadap sektor industri telah berjalan dan menjadi bagian integral dari operasi DPKP.

Kelompok sasaran ini menuntut layanan proaktif yang sangat terspesialisasi, yang berfokus pada penegakan regulasi dan asistensi teknis. Kebutuhan utamanya meliputi pelaksanaan inspeksi keselamatan kebakaran secara berkala dan mandatori, audit terhadap sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif, tinjauan teknis terhadap desain bangunan dari aspek keselamatan kebakaran, serta asistensi dalam penyusunan Prosedur Tanggap Darurat (Emergency Response Plan - ERP) dan pembinaan tim tanggap darurat internal perusahaan.

Sebuah insiden kebakaran di kawasan industri bukanlah peristiwa yang terisolasi dan dampaknya tidak berhenti di gerbang pabrik. Kebakaran besar di sebuah pabrik kimia, misalnya, berpotensi melepaskan awan beracun yang dapat secara langsung membahayakan kesehatan masyarakat

di permukiman sekitar (keterkaitan langsung dengan Kelompok Sasaran 1). Kebakaran di sebuah gudang logistik utama dapat melumpuhkan rantai pasok regional, yang berdampak pada kelangsungan puluhan atau bahkan ratusan bisnis lainnya (efek domino di dalam Kelompok Sasaran 2). Kebakaran yang menyebabkan penutupan pabrik padat karya akan menimbulkan konsekuensi sosial yang serius bagi para pekerja dan keluarga mereka. Oleh karena itu, keterlibatan proaktif DPKP dengan sektor industri merupakan bentuk perlindungan publik yang jangkauannya jauh melampaui lokasi fisik risiko. Ini adalah komponen krusial dalam menjamin stabilitas ekonomi dan sosial seluruh wilayah Kabupaten Gresik.

3. Pengelola Fasilitas Publik dan Sosial

Kelompok sasaran ini terdiri dari para pengelola fasilitas yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, seperti sekolah, rumah sakit, klinik, pasar tradisional dan modern, serta tempat ibadah. Profil risiko utama pada fasilitas-fasilitas ini tidak selalu terletak pada probabilitas terjadinya kebakaran, melainkan pada potensi konsekuensi katastropik akibat konsentrasi tinggi manusia, termasuk di dalamnya populasi rentan seperti anak-anak, pasien, dan lansia. Tantangan terbesar adalah memastikan proses evakuasi massal dapat berlangsung secara aman dan teratur dalam kondisi panik.

Meskipun insiden besar di fasilitas ini jarang terjadi—yang mungkin mencerminkan efektivitas regulasi yang ada—data riwayat layanan DPKP tetap mengandung contoh-contoh relevan yang menggarisbawahi potensi risiko tersebut :

1. DPKP tercatat pernah menangani insiden di lokasi-lokasi seperti "Ruko di dalam pasar", "Ruang Kelas" sekolah, "pure / tempat ibadah", dan infrastruktur publik vital seperti "Gardu Listrik".
2. Lebih lanjut, data "LAYANAN REKOM" sekali lagi mengonfirmasi bahwa DPKP secara aktif terlibat dalam mitigasi risiko di sektor ini melalui inspeksi proaktif pada "Rumah Sakit", "Klinik Kesehatan", dan "Pusat Pendidikan".

Kebutuhan layanan proaktif yang esensial bagi kelompok sasaran ini adalah audit dan pengujian fungsional sistem proteksi kebakaran (misalnya, alarm, *sprinkler*, hidran), asistensi dalam penyusunan dan pelaksanaan latihan evakuasi (simulasi/drill) secara berkala, serta pelatihan bagi staf pengelola fasilitas mengenai peran dan tanggung jawab mereka selama keadaan darurat.

Investasi proaktif pada kelompok sasaran ini memiliki "efek pengganda" (*multiplier effect*) yang signifikan. Satu jam yang diinvestasikan untuk simulasi kebakaran di sebuah sekolah yang memiliki 500 siswa bukanlah sekadar satu jam kerja proaktif; itu adalah 500 pengalaman belajar individu. Setiap siswa tersebut kemudian membawa pulang pengetahuan dan kesadaran akan keselamatan, yang berpotensi memengaruhi praktik keselamatan di dalam keluarga mereka (berdampak pada Kelompok Sasaran 1). Simulasi evakuasi yang berhasil di sebuah rumah sakit tidak hanya melindungi pasien pada saat itu, tetapi juga memvalidasi prosedur kompleks yang dapat diaplikasikan pada skenario darurat massal lainnya. Dengan demikian, keterlibatan proaktif dengan pengelola fasilitas publik dan sosial merupakan salah satu metode paling efisien untuk menyebarkan budaya keselamatan ke seluruh lapisan masyarakat, menciptakan dampak berjenjang yang memperkuat ketahanan kelompok sasaran lainnya.

3. Segmentasi Sasaran Layanan Penyelamatan Non-Kebakaran

Mengingat pertumbuhan eksponensial dalam volume operasi penyelamatan non-kebakaran, kategori layanan ini memerlukan segmentasi tersendiri untuk dapat menginformasikan perencanaan strategis, khususnya dalam hal pengembangan kompetensi personel dan pengadaan peralatan spesialis. Analisis segmentasi ini diderivasikan secara langsung dari klasifikasi keragaman jenis "PELAYANAN PENYELAMATAN" yang tercatat dalam data riwayat layanan DPKP Gresik.

1. **Penyelamatan Hewan (Animal Rescue):** Kategori ini merupakan salah satu jenis layanan penyelamatan dengan frekuensi permintaan tertinggi, yang menuntut keterampilan penanganan khusus dan peralatan yang sesuai untuk

meminimalisir risiko baik bagi petugas maupun hewan itu sendiri.

- a. **Sub-kategori Evakuasi Satwa Liar/Berbisa:** Operasi ini didominasi oleh penanganan ular dan biawak yang masuk ke area permukiman atau bangunan. Klasifikasi yang paling sering muncul adalah "RESCUE Ular Lain", "RESCUE Ular Python", dan "RESCUE Biawak".
 - b. **Sub-kategori Evakuasi Hama/Serangga Berbahaya:** Permintaan evakuasi sarang serangga yang dianggap membahayakan, terutama tawon, merupakan volume yang sangat signifikan dalam kategori ini. Klasifikasi yang dominan adalah "RESCUE Tawon Lain".
 - c. **Sub-kategori Evakuasi Hewan Domestik:** Mencakup penyelamatan hewan peliharaan atau ternak yang terperangkap atau berada dalam situasi berbahaya, seperti "RESCUE Kucing" atau "RESCUE Owl".
2. **Penyelamatan Manusia dalam Kondisi Non-Kebakaran (Human Rescue):** Kategori ini mencakup operasi yang memerlukan keterampilan teknis penyelamatan (technical rescue) dan penggunaan peralatan spesialis untuk membebaskan atau mengevakuasi manusia.
- a. **Sub-kategori Pelepasan Objek dari Tubuh:** Jenis layanan ini memiliki frekuensi yang tinggi secara mengejutkan, didominasi oleh permintaan untuk melepaskan cincin yang tidak bisa dilepas dari jari. Klasifikasi yang digunakan adalah "RESCUE Cincin".
 - b. **Sub-kategori Evakuasi di Ruang Terbatas (Confined Space):** Meliputi penyelamatan individu yang terperangkap, seperti korban yang jatuh ke dalam sumur, anak kecil yang terkunci di dalam kendaraan atau kamar, atau evakuasi dari lokasi sulit.
3. **Penanganan Insiden B3 dan Kondisi Membahayakan Umum (Hazardous Conditions):** Kategori ini mencakup intervensi

terhadap situasi yang dapat membahayakan keselamatan publik secara luas.

- a. **Sub-kategori Penanganan Kebocoran Gas:** Respons terhadap laporan kebocoran gas, terutama dari tabung LPG di lingkungan domestik atau komersial. Klasifikasi yang digunakan adalah "RESCUE Gas Elpiji (B3)".
- b. **Sub-kategori Penanganan Bahaya Terkait Infrastruktur:** Mitigasi bahaya yang timbul dari infrastruktur publik, seperti kabel listrik yang terlepas dan membahayakan atau evakuasi pohon tumbang yang mengganggu akses publik.

4. Matriks Sintesis Kelompok Sasaran Layanan Proaktif

Sebagai penutup dari analisis mendalam ini dan untuk menyediakan sebuah ringkasan yang jelas dan dapat ditindaklanjuti untuk perencanaan strategis, matriks berikut menyintesis analisis kelompok sasaran proaktif. Tabel ini berfungsi sebagai alat strategis yang merangkum dan menghubungkan setiap kelompok sasaran prioritas dengan profil risikonya yang unik serta kebutuhan layanan proaktif yang spesifik.

Nilai strategis dari matriks ini terletak pada kemampuannya untuk menyaring analisis naratif yang kompleks menjadi sebuah alat bantu pengambilan keputusan yang ringkas dan berbasis bukti. Bagi perencana di Bappeda maupun pimpinan DPKP, matriks ini secara instan menghubungkan elemen-elemen krusial: **siapa** yang harus menjadi target intervensi, **mengapa** mereka menjadi target (profil risiko), **apa** yang harus dilakukan (jenis layanan proaktif), dan **apa dasar** dari keputusan tersebut. Matriks ini mentransformasikan analisis menjadi sebuah peta jalan praktis untuk perancangan program, alokasi sumber daya, dan penetapan indikator kinerja. Dengan demikian, matriks ini menyediakan fondasi yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan, di mana program, kegiatan, dan alokasi anggaran yang dirinci pada Bab III dan Bab IV Rencana Strategis ini dapat dibangun dengan keyakinan.

Tabel II.16 Matriks Kelompok Sasaran Proaktif, Profil Risiko, dan Kebutuhan Layanan DPKP Gresik

Kelompok Sasaran Prioritas	Profil dan Karakteristik Risiko Utama	Kebutuhan Layanan Proaktif Prioritas	Dasar Analisis
1. Masyarakat Umum & Permukiman	Frekuensi tinggi kebakaran lahan akibat pembakaran sampah dan ilalang. Risiko kebakaran domestik (listrik, LPG) di permukiman padat penduduk. Kurangnya kesadaran publik mengenai pencegahan kebakaran.	Sosialisasi dan edukasi publik secara masif mengenai bahaya membakar sampah dan keamanan domestik. Pembentukan dan pemberdayaan Relawan Kebakaran (Redkar) di tingkat komunitas. Asistensi dalam penyusunan sistem keamanan lingkungan.	Analisis Tren Insiden (2017-2025); Profil Risiko Demografis; Permendagri 16/2020
2. Sektor Ekonomi, Industri, & Komersial	Risiko kebakaran berkonsekuensi tinggi (<i>high-consequence</i>) yang melibatkan bahan berbahaya, proses industri kompleks, dan aset ekonomi vital. Potensi dampak sistemik terhadap ekonomi regional dan lingkungan.	Inspeksi dan audit keselamatan kebakaran yang bersifat mandatori dan berkala. Asistensi teknis dalam penyusunan Prosedur Tanggap Darurat (ERP). Pelatihan dan pembinaan Satuan Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja (SPK-TK). Tinjauan teknis desain bangunan industri.	Analisis Insiden Industri; Data Layanan Rekomendasi; Profil Ekonomi Daerah; Perbup Gresik 23/2022
3. Pengelola Fasilitas Publik & Sosial	Risiko kepanikan massal dan evakuasi yang kompleks akibat konsentrasi tinggi manusia, termasuk populasi rentan (anak-anak, pasien, lansia). Potensi kegagalan sistem proteksi kebakaran pasif dan aktif.	Audit dan pengujian fungsional sistem proteksi kebakaran (alarm, hidran, <i>sprinkler</i>). Asistensi dalam penyusunan dan pelaksanaan simulasi/latihan evakuasi darurat secara rutin. Pelatihan bagi staf pengelola fasilitas mengenai prosedur tanggap darurat.	Analisis Insiden Fasilitas Publik ; Data Layanan Rekomendasi; Profil Fasilitas Sosial; PP No. 2/2018 (SPM)

2.1.6. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

1. Imperatif Kolaborasi dalam Ekosistem Pelayanan Modern

Penyelenggaraan urusan kebakaran dan penyelamatan dalam konteks modern tidak dapat lagi dipandang sebagai fungsi soliter yang diemban oleh satu dinas. Kompleksitas risiko yang dihadapi Kabupaten Gresik—meliputi akselerasi industrialisasi masif, laju urbanisasi yang pesat, serta peningkatan ancaman bencana hidrometeorologis—menciptakan sebuah lanskap tantangan yang secara inheren melampaui kapasitas operasional satu entitas tunggal. Oleh karena itu, efektivitas pelayanan DPKP Gresik sangat bergantung pada kemampuannya untuk berfungsi sebagai simpul sentral dalam sebuah ekosistem kemitraan yang terintegrasi dan responsif. Kolaborasi yang terinstitusionalisasi bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah imperatif strategis untuk menjamin ketahanan daerah. Sub-bab ini akan memetakan secara sistematis ekosistem kemitraan strategis DPKP Gresik, menganalisis peran fungsional setiap mitra, serta mengevaluasi potensi sinergi dan kesenjangan koordinasi yang fundamental.

2. Identifikasi Ekosistem Kemitraan Strategis DPKP Gresik

Ekosistem kemitraan DPKP Gresik terbentang dalam spektrum yang luas, mencakup kolaborasi horizontal di tingkat pemerintah daerah, koordinasi vertikal dengan instansi pusat, serta sinergi dengan masyarakat sipil dan sektor swasta. Pemetaan mitra-mitra kunci ini esensial untuk memahami jejaring sumber daya yang dapat dimobilisasi dalam manajemen kedaruratan.

Kemitraan Horizontal (Lintas Perangkat Daerah Pemkab Gresik):

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD): Sebagai mitra utama dalam manajemen bencana yang lebih luas. Sinergi diperlukan dalam penyusunan rencana kontingensi, sistem peringatan dini, dan pelaksanaan operasi gabungan saat terjadi bencana hidrometeorologis seperti banjir luapan Kali Lamong, di mana DPKP seringkali terlibat dalam proses evakuasi.

2. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP): Mitra dalam aspek penegakan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, terutama terkait inspeksi sistem proteksi kebakaran pada bangunan, serta dalam manajemen massa dan pengamanan lokasi saat terjadi insiden besar.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) & Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Permukiman (CKPKP): Mitra vital dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung, mencakup jaminan aksesibilitas jalan bagi armada pemadam, pengawasan standar keselamatan bangunan, serta yang paling krusial, potensi pengembangan jaringan hidran kota.
4. Dinas Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan: Mitra krusial dalam sistem penanganan gawat darurat terpadu untuk memberikan pertolongan medis bagi korban, baik dari masyarakat maupun petugas di lapangan.
5. Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Mitra strategis dalam penanganan dampak lingkungan akibat insiden yang melibatkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta dalam mengatasi isu kronis pembakaran sampah ilegal yang menjadi pemicu signifikan kebakaran lahan.
6. Dinas Perhubungan (Dishub): Mitra penting dalam manajemen rekayasa lalu lintas untuk memastikan prioritas dan kelancaran akses armada darurat menuju lokasi kejadian.
7. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: Berperan sebagai garda terdepan dalam deteksi dini, pelaporan awal insiden, dan fasilitator utama dalam pembentukan serta pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di tingkat komunitas.

Kemitraan Vertikal (Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah Lainnya):

8. Kepolisian Resor (Polres) Gresik: Mitra esensial dalam pengamanan Tempat Kejadian Perkara (TKP), pengaturan lalu

lintas darurat, dan pelaksanaan investigasi untuk mengidentifikasi penyebab kebakaran, terutama jika terdapat unsur pidana.

9. Tentara Nasional Indonesia (TNI - Kodim 0817/Gresik): Mitra strategis yang dapat dimobilisasi untuk dukungan sumber daya manusia dan peralatan dalam penanganan bencana skala besar yang memerlukan pengerahan personel masif dan terorganisir.
10. Pemerintah Provinsi Jawa Timur: Mitra dalam konteks sinkronisasi kebijakan, potensi dukungan anggaran, dan koordinasi penanggulangan bencana pada level provinsi.

Kemitraan dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS):

11. Palang Merah Indonesia (PMI): Mitra fundamental dalam pelayanan pertolongan pertama pada korban, dukungan medis awal di lapangan, dan manajemen posko pengungsian.
12. Organisasi Radio Amatir Republik Indonesia (ORARI): Mitra vital yang menyediakan jalur komunikasi darurat alternatif yang andal ketika infrastruktur komunikasi konvensional mengalami kegagalan atau kelebihan beban saat terjadi bencana besar.
13. Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI): Serupa dengan ORARI, RAPI juga merupakan mitra strategis dalam penyediaan komunikasi darurat. Anggota RAPI dapat dengan cepat membangun jembatan komunikasi alternatif ketika infrastruktur telekomunikasi utama lumpuh akibat bencana, memastikan aliran informasi penting untuk koordinasi respons tetap berjalan.
14. Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR): Mitra strategis di tingkat akar rumput yang berfungsi sebagai first responder dan agen pencegahan, membangun ketahanan dari dalam komunitas itu sendiri.

Kemitraan dengan Sektor Swasta:

15. Forum Pemadam Kebakaran Kabupaten Gresik: Wadah kolaborasi paling konkret dan efektif, yang mengintegrasikan unit-unit pemadam kebakaran milik perusahaan industri. Forum ini telah terbukti sangat berharga dalam memberikan dukungan armada dan personel terlatih saat penanganan insiden besar.
16. Pengelola Kawasan Industri (KEK JIPE, KIG): Mitra kunci dalam manajemen risiko kebakaran industri yang kompleks, penanganan insiden B3, dan implementasi standar keselamatan yang tinggi di lingkungan mereka.
17. Perusahaan Swasta Lainnya: Merupakan sumber potensi kemitraan melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Corporate Social Responsibility - CSR) untuk pendanaan program pelatihan, sertifikasi personel, atau pengadaan peralatan spesifik.

3. Analisis Peran Fungsional dan Kesenjangan Koordinasi

Setiap mitra memiliki peran fungsional yang spesifik dalam siklus manajemen bencana. Pada tahap pra-bencana, DPUTR dan Satpol PP berperan dalam mitigasi risiko struktural dan penegakan regulasi. Saat tanggap darurat, DPKP memegang komando operasi dengan dukungan masif dari TNI/Polri, Forum Damkar, Dinkes, dan PMI. Pada tahap pasca-bencana, BPBD dan Polres mengambil peran utama dalam asesmen dan investigasi.

Potensi sinergi dari jejaring ini sangat besar. Latihan gabungan yang terstruktur untuk skenario insiden B3 di KEK JIPE, misalnya, dapat meningkatkan kesiapsiagaan regional secara eksponensial. Namun, analisis mendalam mengungkap sebuah kerentanan strategis: kinerja unggul DPKP Gresik saat ini, yang ditandai dengan pencapaian SPM 100% dan Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) di atas 92, dicapai *meskipun* sistem koordinasi antar-lembaga masih bersifat *ad-hoc* dan reaktif, bukan *karena* adanya sistem tersebut.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa koordinasi yang terjalin cenderung bersifat insidental, hanya terjadi ketika sebuah insiden sudah berlangsung. Keberhasilan respons kolektif sangat bergantung pada inisiatif personal, jaringan informal, dan heroisme individu di lapangan, bukan pada sebuah sistem yang terlembagakan dan teruji. Model operasional seperti ini sangat rapuh dan tidak berkelanjutan. Sebuah insiden berskala besar yang memerlukan respons multi-agensi yang kompleks dan tersinkronisasi—seperti kebakaran katastropik di kawasan industri yang menuntut evakuasi massal, penanganan B3, dan manajemen lalu lintas regional—berpotensi mengekspos kelemahan sistemik ini dan dapat berujung pada kegagalan operasional.

Kesenjangan fundamental yang teridentifikasi bukanlah ketiadaan mitra, melainkan **absensi suatu platform koordinasi formal dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Bersama yang mengikat antar-Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya**. Untuk mentransformasikan paradigma kolaborasi dari reaktif menjadi proaktif dan terstruktur, diperlukan langkah-langkah pelebagaan yang konkret, seperti:

1. **Pembentukan Forum Koordinasi Lintas Sektor untuk Kesiapsiagaan Bencana dan Kebakaran:** Sebuah platform rutin untuk sinkronisasi data risiko, perencanaan bersama, alokasi sumber daya, dan evaluasi pasca-insiden.
2. **Penyusunan dan Simulasi SOP Bersama:** Mengembangkan dan menguji secara berkala SOP Bersama untuk penanganan skenario-skenario spesifik yang memerlukan respons multi-agensi, seperti kebakaran industri, evakuasi korban banjir, dan insiden B3.
3. **Mendorong Skema Resource Pooling:** Mengembangkan mekanisme penggunaan sumber daya bersama untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas operasional.

Tabel berikut menyajikan matriks kemitraan strategis DPKP Gresik sebagai alat analisis untuk memvisualisasikan ekosistem kolaborasi secara komprehensif.

Tabel II.17 Matriks Kemitraan Strategis DPKP Gresik

Mitra	Domain	Peran Kunci (Pencegahan/Respon/ Pemulihan)	Bentuk Sinergi Potensial	Kesenjangan Koordinasi Utama
<i>BPBD</i>	Horizontal	Pencegahan, Respon, Pemulihan	Latihan gabungan, Rencana Kontingensi Bersama	Koordinasi cenderung reaktif saat bencana hidrometeorologi.
<i>Polres Gresik</i>	Vertikal	Respon, Pemulihan	SOP pengamanan TKP & investigasi bersama	Belum ada protokol formal untuk rekayasa lalin darurat.
<i>TNI (Kodim 0817)</i>	Vertikal	Respon	Dukungan personel & alutsista untuk bencana skala besar	Mekanisme permintaan bantuan belum terstandarisasi.
<i>Forum Damkar</i>	Swasta	Respon	Perjanjian Bantuan Timbal Balik (<i>Mutual Aid</i>)	Interoperabilitas peralatan dan komando perlu distandarisasi.
<i>Pengelola KEK JIPE</i>	Swasta	Pencegahan, Respon	Audit keselamatan bersama, simulasi insiden B3	Belum ada SOP terintegrasi untuk insiden skala masif.
<i>PDAM Giri Tirta</i>	BUMD	Pencegahan	Pengembangan & pemeliharaan jaringan hidran	Ketersediaan dan tekanan hidran belum terjamin.
<i>Kecamatan/Desa</i>	Horizontal	Pencegahan, Respon	Pembentukan & pembinaan REDKAR	Peran dan kapasitas aparatur desa dalam respon awal belum optimal.
<i>ORARI/RAPI/PMI</i>	OMS	Respon	Dukungan komunikasi alternatif & medis darurat	Integrasi dalam sistem komando insiden belum formal.

2.1.7. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

1. Reposisi Peran Strategis BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki posisi strategis yang dapat diinstrumentalisasi untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik. Peran BUMD tidak seharusnya terbatas pada kontributor fiskal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan dapat diperluas menjadi mitra operasional yang vital. Landasan hukum dan teori manajemen modern menegaskan bahwa BUMD mengemban mandat ganda (dual mandate): orientasi bisnis untuk mencari keuntungan (profit-oriented) dan kewajiban pelayanan publik (public service obligation). Kewajiban inilah yang menjadi dasar yuridis dan strategis untuk membangun kemitraan teknis antara DPKP Gresik dan BUMD, menggeser paradigma relasional dari yang bersifat transaksional (menyetor dividen) menjadi transformasional (menjadi pemungkin peningkatan pelayanan publik).

2. Identifikasi BUMD Potensial dan Jenis Dukungan

Di Kabupaten Gresik, beberapa BUMD memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan operasional DPKP:

1. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Tirta: Sebagai pengelola jaringan distribusi air bersih, PDAM merupakan mitra paling vital dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur hidran perkotaan. Dukungan yang dapat diberikan mencakup pengembangan jaringan hidran ke area-area strategis yang belum terjangkau, pemeliharaan rutin untuk memastikan fungsionalitas, serta penjaminan tekanan air yang memadai saat operasi pemadaman berlangsung.
2. PT. Gresik Migas: Sebagai BUMD yang bergerak di sektor energi, khususnya gas bumi, PT. Gresik Migas memiliki keahlian teknis dan infrastruktur yang relevan dengan penanganan bahan mudah terbakar dan bertekanan tinggi. Dukungan potensial meliputi penyediaan tenaga ahli sebagai instruktur dalam pelatihan penanganan insiden kebocoran

gas, fasilitasi akses ke peralatan khusus, atau bahkan sponsor program sertifikasi personel DPKP dalam penanganan B3.

3. BUMD Lainnya: BUMD yang mengelola aset strategis seperti pasar daerah atau properti dapat didorong untuk menjadi percontohan dalam implementasi sistem proteksi kebakaran yang andal. Selain itu, BUMD dapat menyalurkan sebagian dari dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR) untuk pengadaan peralatan spesifik bagi DPKP, seperti Alat Pelindung Diri (APD) khusus B3 atau peralatan penyelamatan teknis.

3. Analisis Potensi Manfaat dan Tantangan

Kerja sama dengan BUMD menawarkan manfaat signifikan, antara lain akses terhadap sumber daya finansial, teknis, dan sarana prasarana di luar alokasi APBD yang terbatas. Hal ini dapat mengakselerasi modernisasi peralatan dan peningkatan kapabilitas teknis personel DPKP melalui transfer pengetahuan.

Namun, tantangan fundamental dalam merealisasikan potensi ini adalah **menyelaraskan insentif korporat BUMD yang berorientasi laba dengan kebutuhan pelayanan publik DPKP yang bersifat non-profit**. Dari perspektif neraca keuangan BUMD, setiap dukungan yang diberikan kepada DPKP dapat dipersepsikan sebagai "biaya" yang mengurangi profitabilitas dan dividen. Tanpa kerangka kebijakan yang jelas, permintaan dukungan dari DPKP berisiko dianggap sebagai beban.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan sebuah konstruksi kebijakan yang tegas dari Kepala Daerah. Kebijakan ini harus secara eksplisit memasukkan "kontribusi terhadap ketahanan daerah dan dukungan pada pelayanan dasar" sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi direksi BUMD. Dengan demikian, "biaya" untuk mendukung DPKP dapat direposisi menjadi "investasi" strategis dalam pemenuhan mandat dan penciptaan nilai bersama (*shared value*). BUMD sejatinya berinvestasi dalam keamanan lingkungan usahanya sendiri, yang pada akhirnya akan melindungi aset dan keberlangsungan operasional mereka, menciptakan

stabilitas yang diperlukan untuk profitabilitas jangka panjang. Oleh karena itu, diusulkan adanya penyusunan Nota Kesepahaman Induk (MoU Induk) antara Pemerintah Kabupaten, DPKP, dan seluruh BUMD untuk mengatur kerangka kerja sama ini secara formal.

2.1.8. Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

1. Konteks Regional dan Keterbatasan Batas Administratif

Api, asap, dan dampak bencana lainnya tidak mengenal batas administrasi kabupaten/kota. Posisi strategis Kabupaten Gresik dalam konstelasi kawasan metropolitan GERBANGKERTOSUSILA (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan) secara inheren menciptakan risiko dan ketergantungan lintas batas. Sebuah insiden kebakaran besar di kawasan industri yang berbatasan langsung dengan Surabaya atau Sidoarjo dapat dengan cepat melampaui kapasitas respons satu daerah saja. Oleh karena itu, pelebagaan kerja sama antar-daerah menjadi sebuah keniscayaan untuk membangun ketahanan regional yang solid.

2. Identifikasi Lingkup, Tujuan, dan Manfaat Kerja Sama

Lingkup kerja sama daerah yang paling mendesak adalah pada level **regional GERBANGKERTOSUSILA**, terutama dengan daerah yang berbatasan langsung seperti Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Lamongan. Fokus utamanya adalah pembentukan Perjanjian Bantuan Timbal Balik (*Mutual Aid Agreement*) untuk pengerahan sumber daya (armada dan personel) saat terjadi insiden yang melampaui kapasitas satu daerah saja.

Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas respons kolektif, mengoptimalkan penggunaan sumber daya regional yang terbatas, dan menstandarisasi prosedur operasional untuk meningkatkan interoperabilitas. Manfaatnya sangat strategis: efektivitas operasional dalam menangani insiden besar akan meningkat drastis, efisiensi anggaran dapat tercapai dengan menghindari duplikasi pengadaan peralatan

super-spesialis yang mahal oleh setiap daerah, serta peningkatan kapasitas SDM melalui pelaksanaan latihan gabungan (*joint exercises*) secara rutin.

3. Analisis Potensi Tantangan dan Peluang

Peluang untuk merealisasikan kerja sama ini terbuka lebar, didorong oleh adanya kesadaran bersama akan tingginya konsentrasi risiko industri dan urbanisasi di kawasan Gerbangkertosusila. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga dapat berperan sebagai fasilitator utama dalam memediasi pembentukan kerangka kerja sama ini.

Namun, tantangan terbesar dan paling fundamental yang dihadapi saat ini adalah **adanya kekosongan hukum dan kelembagaan**. Analisis isu strategis secara eksplisit mengidentifikasi "**Belum ada MoU kerjasama dengan kabupaten/kota sekitar**" sebagai salah satu kelemahan kritis dalam klaster kebijakan dan tata kelola. Ketiadaan perjanjian formal ini menciptakan risiko operasional yang sangat tinggi.

Saat terjadi insiden lintas batas yang kritis, ketiadaan MoU akan menimbulkan serangkaian pertanyaan yang dapat melumpuhkan efektivitas respons: Siapa yang akan memegang komando terpadu di lapangan (*unified command*)? Bagaimana prosedur komunikasi yang terstandarisasi? Siapa yang akan menanggung biaya operasional dan pertanggungjawaban hukum jika terjadi kecelakaan pada personel atau kerusakan peralatan yang diperbantukan? Keraguan dan kebingungan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di saat-saat genting dapat menyebabkan penundaan yang fatal. Dengan demikian, tantangan utamanya bukanlah bersifat teknis, melainkan **politis dan birokratis**, yang menuntut adanya kemauan politik dari para kepala daerah di Gerbangkertosusila untuk menyepakati sebuah kerangka kerja sama yang mengikat secara hukum.

Sebagai langkah strategis, DPKP Gresik perlu secara proaktif menginisiasi dan mengadvokasi penyusunan **Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Penanggulangan Bencana dan Kebakaran se-Gerbangkertosusila**. MoU ini harus secara komprehensif mengatur aspek-aspek krusial seperti Komando dan Kendali Terpadu, Prosedur Permintaan

dan Pengerahan Bantuan, Standar Interoperabilitas Komunikasi dan Peralatan, serta Skema Pembiayaan dan Pertanggungjawaban.

2.1.9. Inovasi Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan responsivitas pelayanan, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik terus berkomitmen pada pengembangan inovasi strategis. Inovasi yang telah berhasil diimplementasikan pada tahun 2024, yaitu FORPEKA dan SIP KE MAS, akan dilanjutkan dan diperkuat pada periode 2026-2029. Selain itu, akan dilaksanakan pula inovasi baru untuk melengkapi inisiatif yang sudah ada. Seluruh inovasi ini dirancang untuk memperkuat kapasitas internal, meningkatkan sinergi dengan pemangku kepentingan eksternal, dan memberdayakan masyarakat secara proaktif.

1. FORPEKA (Forum Pemadam Kebakaran Gresik)

FORPEKA merupakan pengembangan dari inisiatif Forum Pemadam Kebakaran Gresik (ForPeKa) yang telah diimplementasikan pada tahun 2023. Inovasi ini secara spesifik menambahkan komponen Pelatihan Bersama (*Join Training*) yang didanai melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* - CSR) dari perusahaan-perusahaan swasta yang tergabung dalam forum. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas dan standardisasi kompetensi teknis personel pemadam kebakaran, baik dari DPKP Gresik maupun dari unit pemadam kebakaran milik perusahaan swasta. Melalui pelatihan bersama yang terstruktur dan periodik, FORPEKA tidak hanya mengasah keterampilan teknis pemadaman dan penyelamatan, tetapi juga memperkuat sinergi dan interoperabilitas antara sektor publik dan swasta. Inisiatif ini diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kualitas layanan, dan pada akhirnya menciptakan lingkungan yang lebih aman yang dapat mendukung iklim investasi di Kabupaten Gresik.

2. SIP KE MAS (Sistem Informasi Pelayanan Kebakaran dan Penyelamatan Untuk Masyarakat)

SIP KE MAS adalah sebuah platform digital yang berfungsi sebagai portal informasi terpadu bagi masyarakat terkait layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan. Inovasi ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, aksesibilitas informasi, dan partisipasi publik dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Melalui SIP KE MAS, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi krusial seperti prosedur darurat, kontak penting, lokasi pos pemadam, serta berbagai materi edukasi mengenai mitigasi risiko kebakaran. Salah satu fitur utamanya adalah mekanisme pelaporan kebakaran secara daring (*online*), yang bertujuan untuk mempercepat waktu respons tim pemadam. Dengan menyediakan sarana interaktif dan edukatif, SIP KE MAS mentransformasikan hubungan antara dinas dan masyarakat dari yang bersifat reaktif menjadi kolaboratif, memperkuat kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menjaga keselamatan bersama.

3. DAMKAR GRESIK SIAP (2026-2029)

Menyongsong periode Renstra 2026-2029, DPKP Gresik merancang inovasi baru bernama DAMKAR GRESIK SIAP, yang merupakan akronim dari "Sinergi, Inovasi, Aksi, Perlindungan Bersama Legislatif untuk Masyarakat". Program ini merupakan sebuah kolaborasi strategis antara DPKP Gresik dengan DPRD Kabupaten Gresik yang bertujuan untuk memperkuat kualitas pelayanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan kebakaran. Inovasi ini secara fundamental memanfaatkan kewenangan legislatif, termasuk melalui mekanisme Pokok-Pokok Pikiran (POKIR) dan Jaring Aspirasi Masyarakat (JASMAS), untuk mendukung pemenuhan sarana-prasarana, percepatan respons kebakaran, serta penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat. Program ini bertumpu pada empat pilar: **Sinergi** melalui formalisasi kerja sama DPKP -DPRD; **Inovasi** melalui pemutakhiran Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM) serta adopsi teknologi digital; **Aksi** melalui pembinaan aparatur, pelatihan relawan, dan sosialisasi publik serta **Perlindungan** melalui monitoring, evaluasi, dan pemberian apresiasi bagi

entitas yang patuh terhadap standar keselamatan. Keterlibatan aktif legislatif diharapkan dapat memperkuat pengawasan, memperluas partisipasi masyarakat, dan memastikan keberlanjutan program dalam kebijakan daerah.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik berada pada suatu titik persimpangan strategis yang akan menentukan postur dan arah pengembangan institusional dalam lima tahun mendatang. Analisis mendalam terhadap kondisi internal dan kinerja pelayanan menyajikan sebuah kontradiksi inheren yang signifikan: pada satu sisi, DPKP telah menunjukkan keunggulan operasional yang tervalidasi secara empiris, tercermin dari pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-urusan Kebakaran sebesar 100% secara konsisten dan perolehan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang melampaui ambang batas sangat baik. Capaian ini merupakan manifestasi dari dedikasi, profesionalisme, dan efisiensi personel di lapangan.

Namun, pada sisi lain, narasi keberhasilan ini ditopang oleh sebuah fondasi sumber daya yang secara sistemik rapuh dan beroperasi dalam konteks lanskap risiko yang terus berevolusi secara dinamis dan semakin kompleks. Kapabilitas operasional yang tinggi tersebut dicapai di tengah kondisi defisit personel yang kritis, amortisasi sarana prasarana yang belum diimbangi modernisasi, serta alokasi anggaran yang belum proporsional dengan skala tantangan. Lebih jauh lagi, mandat pelayanan DPKP di lapangan telah mengalami transformasi fundamental, bergeser dari fokus tunggal pada pemadaman kebakaran menjadi sebuah entitas respons kedaruratan multi-ancaman yang dominan menangani operasi penyelamatan non-kebakaran.

Kondisi ini menempatkan DPKP pada tingkat kerentanan institusional yang tinggi, di mana model operasional yang ada saat ini—yang sangat bergantung pada etos kerja dan dedikasi personel untuk mengkompensasi kesenjangan sistemik—tidak dapat dipertahankan secara strategis dalam jangka panjang. Untuk memetakan interkoneksi yang

kompleks antara potensi, permasalahan, dan dinamika lingkungan strategis, disajikan tabel teknis berikut yang menjadi landasan bagi perumusan isu strategis DPKP.

Tabel II.18 Teknik Menyimpulkan ISU Strategis

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
1. Pertumbuhan Pesat Kawasan Industri (risiko kebakaran tinggi akibat bahan mudah terbakar, proses industri, kepadatan infrastruktur, potensi insiden B3).	Kurangnya sarana & prasarana untuk penanganan kebakaran industri & B3, SDM dengan spesialisasi B3 terbatas, risiko dari operasional JIPE, keterbatasan anggaran untuk modernisasi peralatan, belum ada MoU dengan semua industri.	Dampak lingkungan dari pembangunan & operasional industri, standar keselamatan bangunan & instalasi industri, pengelolaan limbah B3, penilaian risiko kecelakaan industri skala besar.	Perkembangan teknologi industri (membawa risiko baru & solusi baru), standar keselamatan industri global, rantai pasok global (ketergantungan pada bahan kimia/B3).	Kebijakan Nasional terkait Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3), regulasi pengelolaan B3, Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti KEK, kebijakan hilirisasi industri.	Peran strategis Gresik dalam aglomerasi Gerbangke rtosusila, kebutuhan sinergi dan interoperabilitas sistem proteksi kebakaran dengan kawasan industri di wilayah sekitar (misal: Surabaya, Sidoarjo).	Eskalasi Profil Risiko dan Non-Kebakaran Berdampak Signifikan sebagai Konsekuensi Akselerasi Pembangunan Ekonomi.
2. Laju Urbanisasi dan Pertumbuhan Demografis (peningkatan kepadatan penduduk, munculnya kawasan permukiman baru, tekanan pada	Aksesibilitas terbatas di kawasan padat (jalan sempit), ancaman terhadap pencapaian <i>response time</i> , minimnya sumber	Peningkatan volume limbah domestik dan industri, penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya air, konversilah	Tren mega-urban dan kota pintar (<i>smart city</i>), Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs (khususnya SDG 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan), standar	Kebijakan pembangunan perkotaan nasional, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk	Tekanan pembangunan di wilayah penyangga kota metropolitan Surabaya, kebutuhan integrasi perencanaan tata ruang dan sistem transportasi	Evolusi Mandat Pelayanan dan Transformasi Misi Institusional Menuju Entitas Respons Kedaruratan Multi-

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
infrastruktur).	air (ketiadaan hidran), defisit personel yang tidak sebanding dengan laju pertumbuhan penduduk.	yang tidak terkendali, peningkatan polusi udara akibat aktivitas perkotaan.	internasional untuk kota tangguh bencana.	wilayah perkotaan, program perumahan nasional, dan pengembangan infrastruktur konektivitas.	i dalam kerangka Gerbangke rtosusila.	Ancaman.
3. Wilayah Pelayanan yang Luas dan Beragam (mencakup daratan, pesisir, hingga kepulauan/Bawean).	Adanya <i>blank spot</i> (titik buta) pelayanan di wilayah kepulauan Bawean, ketidakmerataan sebaran pos dan sarana prasarana, keterbatasan anggaran untuk pemerataan jangkauan layanan.	Kerentan an ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil terhadap perubahan iklim dan bencana hidrometeorologi, isu abrasi, dan intrusi air laut.	Prinsip Pembangunan Berkelanjutan <i>Leave No One Behind</i> , standar layanan universal, komitmen global untuk adaptasi perubahan iklim di wilayah rentan.	Arah kebijakan pembangunan dari pinggiran dan daerah tertinggal, pemenuhan hak dasar warga negara atas rasa aman, program tol laut dan konektivitas antar pulau.	Isu konektivitas antar wilayah di Provinsi Jawa Timur, program pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di tingkat provinsi.	Imperatif Ganda: Optimalisasi Ketahanan Komunitas dan Pemerataan Akses Pelayanan Proteksi Dasar.
4. Kelembagaan DPKP sebagai Penyedia Layanan Dasar Wajib.	Defisit masif kuantitas SDM, sarana prasarana yang menua dan tidak terstandar, alokasi anggaran yang	Kapasitas kelembagaan dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait standar keselama	Tuntutan global akan profesionalisme, modernisasi, dan akuntabilitas layanan publik (prinsip <i>Good Governance</i>).	Amanat pemenuhan SPM Sub-urusan Kebakaran, kebijakan reformasi birokras	Upaya peningkatan standar pelayanan publik dan Indeks Reformasi Birokrasi di tingkat Provinsi Jawa Timur.	Kesenjangan Kapasitas Institusional (The Capability Gap) sebagai Hambatan Fundam

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
	belum proporsional dengan beban tugas, kompetensi personel yang belum tersertifikasi secara merata.	tan lingkungan dan bangunan.		i, standar kompetensi aparatur sipil negara, dan sistem perencanaan-penganggaran berbasis kinerja.		ental Keberlanjutan Pelayanan.
5. Peran dalam Menjaga Stabilitas Sosio-Ekonomi (melindungi aset ekonomi produktif dan sosial masyarakat dari dampak bencana).	Rendahnya kesadaran publik dan pemangku kebijakan akan peran DPKP dalam menjaga stabilitas ekonomi, program pemberdayaan masyarakat (REDKAR) yang belum optimal dan masif.	Keterkaitan erat antara degradasi lingkungan, peningkatan risiko bencana, dan dampaknya terhadap kerentanan sosial-ekonomi masyarakat.	Agenda global SDGs (SDG 1: Tanpa Kemiskinan, SDG 11, SDG 13: Penanganan Perubahan Iklim), Kerangka Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana.	Program prioritas nasional terkait pengentasan kemiskinan ekstrem, perlindungan sosial, ketahanan ekonomi nasional, dan pembangunan rendah karbon.	Target peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.	Reposisi Peran Strategis DPKP sebagai Pilar Ketahanan Sosio-Ekonomi dan Akselerator Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Oleh karena itu, identifikasi permasalahan fundamental secara akurat dan perumusan isu-isu strategis yang relevan menjadi sebuah imperatif. Sub-bab berikut akan menguraikan secara sistematis permasalahan-permasalahan pelayanan yang dihadapi dan mensintesisnya menjadi isu-isu strategis utama yang harus dijawab secara komprehensif

melalui Rencana Strategis (Renstra) DPKP Kabupaten Gresik periode 2025-2029. Renstra ini diposisikan sebagai instrumen untuk menjembatani diskrepansi antara kinerja yang telah terbukti dan kapasitas yang rentan, guna mewujudkan sebuah sistem pelayanan proteksi masyarakat yang tangguh, modern, dan berkelanjutan.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis komprehensif terhadap penyelenggaraan pelayanan DPKP Kabupaten Gresik mengidentifikasi serangkaian permasalahan fundamental yang saling terkait. Permasalahan-permasalahan ini tidak hanya bersifat sebagai defisit input sumber daya, tetapi juga memiliki implikasi strategis terhadap keberlanjutan, efektivitas, dan pemerataan kualitas pelayanan dalam jangka menengah dan panjang. Untuk memberikan pemahaman yang holistik, permasalahan tersebut diklasifikasikan ke dalam enam domain utama sebagai berikut:

1. Permasalahan Aspek Kebijakan dan Tata Kelola

Domain ini mencakup kerangka regulasi, struktur komando, dan mekanisme koordinasi yang menjadi fondasi operasional DPKP. Permasalahan utama yang teridentifikasi adalah:

1. Insufisiensi Dukungan Kebijakan Strategis: Terdapat persepsi bahwa DPKP masih menghadapi keterbatasan atensi dan dukungan kebijakan dari jajaran pimpinan dan pemangku kebijakan di tingkat daerah. Hal ini berimplikasi pada prioritas pengalokasian sumber daya (anggaran, SDM, sarana) yang belum sepenuhnya proporsional dengan eskalasi risiko dan mandat pelayanan yang diemban.
2. Inadekuasi Kerangka Regulasi: Peraturan Daerah yang ada terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran dinilai perlu direvisi secara komprehensif agar dapat merespons secara efektif dinamika risiko terkini, terutama yang berkaitan dengan akselerasi industrialisasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), peningkatan volume Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta laju urbanisasi yang pesat.

3. Absensi Pusat Komando dan Kendali Operasi (Command Center) Modern: DPKP belum memiliki pusat komando dan kendali operasi yang terintegrasi dan modern. Ketiadaan fasilitas ini merupakan kelemahan strategis dalam manajemen respons darurat, menghambat kecepatan pengambilan keputusan berbasis data secara real-time, koordinasi multi-agensi, dan optimalisasi pengalokasian sumber daya saat terjadi insiden berskala besar.
4. Defisit Formalisasi Kerangka Kerja Sama Lintas Sektor: Belum terformalisasinya kerja sama melalui Nota Kesepahaman (MoU) dengan seluruh kawasan industri maupun dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah aglomerasi Gerbangkertosusila menjadi hambatan dalam interoperabilitas dan mobilisasi sumber daya gabungan saat terjadi insiden di wilayah perbatasan atau yang memerlukan kapabilitas respons yang terpadu.

2. Permasalahan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Personel merupakan aset paling vital dalam pelayanan DPKP. Namun, domain ini menghadapi tantangan kuantitas dan kualitas yang sangat serius:

1. Disparitas Kuantitatif Personel yang Kritis: Permasalahan paling fundamental adalah defisit struktural pada jumlah personel. Kesenjangan masif antara jumlah personel eksisting dengan kebutuhan ideal menciptakan beban kerja yang berlebih, secara langsung menurunkan rasio cakupan layanan per personel, meningkatkan risiko kelelahan fisik dan mental (burnout), serta membatasi kemampuan dinas untuk menjalankan fungsi-fungsi proaktif seperti inspeksi, edukasi, dan pembinaan secara masif.
2. Defisit Kualifikasi dan Kompetensi Spesialis: Mayoritas personel belum memiliki kualifikasi teknis yang terstandarisasi. Lebih jauh lagi, terdapat kekurangan personel

dengan kompetensi spesialis yang sangat dibutuhkan untuk menangani insiden berisiko tinggi dan kompleks, seperti kebakaran industri, penanganan B3, dan operasi penyelamatan non-kebakaran yang beragam (misalnya, water rescue, vertical rescue, collapsed structure search and rescue).

3. Keterbatasan Sistem Kesejahteraan dan Fasilitas Penunjang: Isu terkait tingkat kesejahteraan personel serta kondisi infrastruktur penunjang seperti barak atau tempat siaga di beberapa pos yang dinilai tidak layak huni berpotensi menurunkan moral, motivasi, dan tingkat kesiapsiagaan operasional personel dalam menjalankan tugas berisiko tinggi.

3. Permasalahan Aspek Sarana dan Prasarana

Kesiapan operasional sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang andal dan sesuai dengan karakteristik risiko wilayah. Permasalahan yang teridentifikasi meliputi:

1. Amortisasi dan Defisit Armada Operasional Terspesialisasi: Sebagian besar dari unit kendaraan operasional yang dimiliki telah melampaui usia teknis ideal dan tidak lagi memenuhi standar operasional modern, yang berimplikasi pada penurunan tingkat keandalan dan peningkatan risiko operasional. Terdapat pula defisit unit-unit dengan kapabilitas khusus seperti mobil tangga (turntable ladder) untuk penanganan kebakaran di bangunan bertingkat dan kendaraan respons cepat penanganan B3 (Hazmat response vehicle).
2. Absensi Infrastruktur Hidran Perkotaan sebagai Jaringan Pasokan Air Vital: Kabupaten Gresik belum memiliki sistem hidran perkotaan yang terpasang dan berfungsi. Ketiadaan infrastruktur vital ini merupakan kerentanan fatal yang sangat membatasi kemampuan pasokan air secara berkelanjutan saat terjadi operasi pemadaman skala besar dan berdurasi panjang,

memaksa DPKP sepenuhnya bergantung pada metode water relay yang terbatas efektivitasnya.

3. Insufisiensi Alat Pelindung Diri (APD) dan Peralatan Penyelamatan Spesifik: Kondisi APD bagi personel di lapangan sebagian telah usang dan kuantitasnya belum memadai untuk seluruh anggota regu. Seiring dengan evolusi mandat menuju penyelamatan non-kebakaran, terdapat kekurangan peralatan teknis spesifik yang diperlukan untuk menangani berbagai jenis insiden penyelamatan secara aman dan efektif.

4. Permasalahan Aspek Anggaran dan Pembiayaan

Dukungan finansial adalah enabler utama bagi penguatan kapasitas kelembagaan. Permasalahan dalam domain ini mencakup:

1. Disparitas Alokasi Anggaran Terhadap Eskalasi Beban Tugas: Keterbatasan alokasi anggaran secara langsung menjadi kendala utama bagi upaya modernisasi sarana prasarana, penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan (Diklat) berkelanjutan untuk pengembangan modal manusia, serta implementasi program pencegahan dan edukasi publik yang bersifat proaktif dan masif.
2. Imposisi Beban Operasional Non-Produktif: Munculnya kewajiban pembayaran pajak tahunan untuk kendaraan operasional serta kesulitan dalam mengakses BBM jenis solar bersubsidi menambah beban pada anggaran operasional dinas yang sudah terbatas, yang seharusnya dapat dialokasikan untuk pemeliharaan dan peningkatan kesiapsiagaan.

5. Permasalahan Aspek Lingkungan dan Risiko Eksternal

Permasalahan ini muncul dari interaksi antara kapabilitas DPKP dengan kondisi geografis dan dinamika pembangunan Kabupaten Gresik:

1. Disparitas Jangkauan Pelayanan Geografis (Blank Spot): Pelayanan DPKP secara efektif belum menjangkau wilayah kepulauan, yakni Kecamatan Sangkapura dan Tambak di

Pulau Bawean. Absensi pos dan sarana di wilayah ini merupakan manifestasi nyata dari ketidakmerataan pelayanan dasar dan menempatkan puluhan ribu warga dalam kondisi sangat rentan tanpa proteksi kebakaran dan penyelamatan yang memadai.

2. Implikasi Akselerasi Urbanisasi terhadap Aksesibilitas Operasional: Konsentrasi insiden yang sangat tinggi terjadi di kecamatan-kecamatan dengan laju urbanisasi dan industrialisasi pesat. Perkembangan ini seringkali tidak diimbangi dengan penataan infrastruktur yang memadai, mengakibatkan munculnya kawasan padat dengan aksesibilitas terbatas yang menjadi hambatan fisik signifikan dan secara langsung mengancam pencapaian waktu tanggap (response time) standar.
3. Kerentanan Hidrologis dan Keterbatasan Sumber Air Alternatif: Terdapat keterbatasan jumlah dan aksesibilitas sumber air permukaan alternatif (waduk, embung, sungai) yang dapat dimanfaatkan untuk operasi pemadaman. Kerentanan ini dieksaserbasi oleh dampak perubahan iklim, terutama saat musim kemarau panjang yang menyebabkan penurunan debit air secara drastis.

6. Permasalahan Aspek Komunikasi dan Partisipasi Publik

Efektivitas pelayanan darurat tidak hanya ditentukan oleh faktor internal DPKP, tetapi juga oleh interaksinya dengan masyarakat:

1. Defisit Kesadaran Publik tentang Prioritas Akses Darurat: Masih sering dijumpai rendahnya kesadaran pengguna jalan untuk memberikan prioritas bagi kendaraan darurat yang sedang dalam perjalanan menuju lokasi insiden. Perilaku ini menjadi hambatan non-fisik yang krusial karena secara langsung memperpanjang waktu tanggap dan dapat berakibat fatal bagi korban.

2. Optimalisasi Partisipasi Masyarakat yang Belum Tercapai:
Meskipun potensi partisipasi masyarakat sangat besar, program pembentukan dan pembinaan Relawan Kebakaran (REDKAR) di tingkat desa/kelurahan belum terimplementasi secara optimal dan masif. Penguatan peran masyarakat sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan dini merupakan aset strategis yang belum tergarap secara maksimal.

Tabel II.19 Matriks Identifikasi Permasalahan Fundamental Pelayanan DPKP

Gresik				
DOMAIN PERMASALAHAN	URAIAN PERMASALAHAN SPESIFIK	DATA/FAKTA PENDUKUNG	IMPLIKASI STRATEGIS	
KEBIJAKAN & TATA KELOLA	Absensi Pusat Komando Operasi (Command Center) yang modern dan terintegrasi.	Kebutuhan diidentifikasi dalam analisis internal DPKP.	Menghambat pengambilan keputusan strategis berbasis data secara <i>real-time</i> , mempersulit koordinasi multi-agensi, dan menurunkan efektivitas manajemen sumber daya saat insiden.	
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	Disparitas kuantitatif personel yang kritis, menciptakan defisit struktural.	Jumlah personel jauh di bawah kebutuhan ideal yang direkomendasikan .	Menurunkan rasio cakupan layanan, meningkatkan risiko kelelahan (<i>burnout</i>) personel, dan membatasi kemampuan untuk menjalankan fungsi proaktif secara efektif.	
	Defisit kualifikasi dan kompetensi personel yang	Mayoritas personel belum memiliki	Menurunkan efektivitas penanganan	

DOMAIN PERMASALAHAN	URAIAN PERMASALAHAN SPESIFIK	DATA/FAKTA PENDUKUNG	IMPLIKASI STRATEGIS
	belum terstandarisasi secara merata.	sertifikasi kualifikasi teknis terstandar.	insiden kompleks (industri, B3) dan meningkatkan risiko keselamatan bagi petugas di lapangan.
SARANA & PRASARANA	Absensi infrastruktur hidran kota untuk pasokan air berkelanjutan.	Diidentifikasi sebagai kelemahan utama dalam berbagai dokumen perencanaan dan analisis.	Menciptakan kerentanan fatal saat operasi pemadaman skala besar, memperpanjang durasi pemadaman, dan meningkatkan potensi kerugian material dan jiwa.
	Amortisasi armada operasional dan defisit unit dengan spesialisasi khusus.	Beberapa unit tidak memiliki <i>power steering</i> ; kurangnya unit tangga dan B3.	Menurunkan keandalan respons, membatasi kapabilitas penanganan di bangunan tinggi, dan menciptakan ketidaksiapan dalam menghadapi insiden B3.
ANGGARAN & PEMBIAYAAN	Disparitas alokasi anggaran terhadap eskalasi risiko dan kebutuhan modernisasi.	Keterbatasan anggaran berdampak pada seluruh aspek operasional dan pembinaan.	Menghambat modernisasi peralatan, pengembangan modal manusia (SDM), dan implementasi program pencegahan

DOMAIN PERMASALAHAN	URAIAN PERMASALAHAN SPESIFIK	DATA/FAKTA PENDUKUNG	IMPLIKASI STRATEGIS
LINGKUNGAN & RISIKO EKSTERNAL	Disparitas jangkauan pelayanan (<i>blank spot</i>) di wilayah kepulauan (Pulau Bawean).	Kecamatan Sangkapura dan Tambak tidak memiliki pos sarana maupun DPKP.	yang efektif dan berkelanjutan. Merupakan bentuk ketidakadilan dalam penyediaan pelayanan dasar dan menempatkan puluhan ribu warga dalam kondisi kerentanan yang sangat tinggi.
	Tekanan urbanisasi menghambat aksesibilitas dan memperpanjang waktu tanggap.	Konsentrasi insiden tinggi di kecamatan urban (Kebomas, Menganti, Driyorejo).	Mengancam pencapaian target SPM waktu tanggap, yang merupakan indikator kinerja paling kritis dalam misi penyelamatan jiwa.
KOMUNIKASI & PARTISIPASI PUBLIK	Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanganan dini belum optimal.	Kebutuhan penguatan Relawan Kebakaran (REDKAR) diidentifikasi sebagai strategi penting.	Beban operasional pada unit reaktif tetap tinggi untuk insiden yang seharusnya dapat dicegah atau ditangani pada tingkat komunitas, menunjukkan inefisiensi sistemik.

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis mendalam terhadap serangkaian permasalahan yang telah diuraikan, teridentifikasi lima isu strategis utama yang harus menjadi fokus perhatian dan landasan perumusan arah kebijakan DPKP Kabupaten Gresik untuk periode 2025-2029. Isu strategis ini merupakan agregasi dari berbagai permasalahan yang saling terkait, bersifat fundamental, memiliki dampak signifikan, dan mendesak untuk ditangani guna menjamin terwujudnya pelayanan proteksi masyarakat yang andal dan berkelanjutan. Setiap isu strategis ini secara inheren selaras dan berkontribusi pada pencapaian arah kebijakan pembangunan di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional.

1. Isu Strategis 1: Eskalasi Profil Risiko Kebakaran dan Non-Kebakaran Berdampak Signifikan sebagai Konsekuensi Akselerasi Pembangunan Ekonomi

Kabupaten Gresik, yang diposisikan sebagai "Pusat Pertumbuhan Ekonomi", mengalami akselerasi pembangunan yang sangat pesat, terutama pada sektor industri. Operasionalisasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE), serta revitalisasi kawasan industri lainnya secara langsung meningkatkan profil risiko daerah. Eskalasi ini tidak hanya berupa peningkatan frekuensi, tetapi juga kompleksitas insiden, termasuk potensi kebakaran industri skala besar dan kecelakaan yang melibatkan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pada saat yang sama, laju urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk dan munculnya kawasan permukiman baru, terutama di kecamatan penyangga, yang meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran domestik.

Implikasi dari isu ini bersifat fundamental. Sebuah insiden di KEK atau kawasan industri strategis lainnya tidak lagi hanya menjadi kerugian aset lokal, melainkan berpotensi menjadi disrupsi terhadap rantai pasok regional dan nasional, serta merusak iklim investasi. Dengan demikian, peran DPKP bertransformasi dari sekadar penyedia layanan publik menjadi garda terdepan dalam mitigasi risiko ekonomi dan penjaga stabilitas pembangunan

daerah. Isu strategis ini selaras secara vertikal dengan Visi Bupati Gresik dan Misi Ketiga Nawa Karsa Jilid II terkait penyelesaian infrastruktur berkelanjutan, serta mendukung agenda nasional dalam Asta Cita ketiga (pengembangan infrastruktur) dan kelima (hilirisasi industri).

2. Isu Strategis 2: Evolusi Mandat Pelayanan dan Transformasi Misi Institusional Menuju Entitas Respons Kedaruratan Multi-Ancaman

Analisis data operasional longitudinal menunjukkan adanya pergeseran tektonik dalam lanskap permintaan layanan publik kepada DPKP. Secara empiris, frekuensi layanan penyelamatan non-kebakaran (non-fire rescue) telah melampaui layanan pemadaman kebakaran, dengan persentase yang melonjak secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir.

Fenomena ini, yang didorong oleh tingginya kepercayaan publik, menandakan bahwa DPKP secara de facto telah berevolusi dari "dinas pemadam kebakaran" menjadi sebuah "dinas penyelamatan publik serbaguna" (multi-hazard emergency response agency). Namun, transformasi misi ini belum diimbangi dengan adaptasi yang sepadan pada aspek regulasi, doktrin operasional, spesialisasi kompetensi SDM, dan jenis peralatan yang dimiliki. Terdapat asimetri antara mandat riil di lapangan dengan kapasitas de jure yang ada. Isu strategis ini menuntut adanya redefinisi dan penguatan identitas kelembagaan agar selaras dengan realitas pelayanan. Hal ini sejalan dengan isu strategis daerah terkait "Penguatan Ketangguhan Daerah terhadap Perubahan Iklim dan Bencana Hidrometeorologi" serta mandat Undang-Undang yang mengklasifikasikan urusan kebakaran sebagai bagian dari pelayanan dasar perlindungan masyarakat.

3. Isu Strategis 3: Kesenjangan Kapasitas Institusional (The Capability Gap) sebagai Hambatan Fundamental Keberlanjutan Pelayanan

Isu strategis ini merupakan agregasi dari seluruh permasalahan terkait defisit sumber daya yang telah diidentifikasi dan menjadi akar dari kerapuhan sistemik DPKP. Kesenjangan kapasitas ini mencakup tiga dimensi utama: defisit sumber daya manusia (kuantitas dan kualitas); defisit sarana

dan prasarana (amortisasi armada, absensi hidran, minimnya peralatan spesialis); serta defisit anggaran yang membatasi kemampuan untuk modernisasi dan pengembangan.

Kesenjangan kapasitas ini menciptakan jurang yang lebar antara mandat dan ekspektasi publik yang semakin tinggi dengan realitas kemampuan yang dimiliki DPKP. Model operasional yang saat ini berjalan, yang sangat bergantung pada efisiensi dan dedikasi personel untuk menutupi defisit sistemik, secara strategis tidak berkelanjutan dan sangat berisiko. Tanpa adanya investasi yang terencana dan signifikan untuk menutup kesenjangan kapasitas ini, DPKP tidak akan mampu merespons Isu Strategis 1 dan 2 secara efektif dan andal. Pemenuhan kapasitas ini merupakan prasyarat untuk merealisasikan Misi Kelima RPJMD Kabupaten Gresik terkait tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan terbaik, sekaligus menjadi kewajiban hukum untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM).

4. Isu Strategis 4: Imperatif Ganda: Optimalisasi Ketahanan Komunitas dan Pemerataan Akses Pelayanan Proteksi Dasar

Isu strategis ini menyoroti dua dimensi penting dalam penyelenggaraan pelayanan DPKP: penguatan aspek proaktif-preventif dan pemenuhan aspek keadilan-pemerataan. Di satu sisi, data historis menunjukkan tingginya frekuensi kebakaran lahan dan sampah yang disebabkan oleh perilaku masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi penanggulangan kebakaran tidak akan efektif tanpa diimbangi dengan upaya masif untuk membangun kesadaran dan ketahanan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan dan pembinaan Relawan Kebakaran (REDKAR) menjadi strategi efisien untuk mengurangi beban operasional reaktif dan membangun budaya sadar risiko.

Di sisi lain, terdapat permasalahan fundamental terkait pemerataan jangkauan pelayanan, di mana wilayah kepulauan Bawean masih menjadi blank spot area tanpa adanya proteksi kebakaran dan penyelamatan yang memadai. Mengatasi kesenjangan ini bukan hanya persoalan teknis operasional, tetapi merupakan isu pemenuhan hak dasar warga negara atas

rasa aman dan perwujudan keadilan distributif dalam pembangunan. Isu strategis ini selaras dengan arah kebijakan daerah terkait "Pembangunan Desa berbasis Kebutuhan Lokal" dan "Pemerataan Akses... di Seluruh Wilayah", serta sejalan dengan semangat pembangunan nasional yang berorientasi pada penguatan partisipasi komunitas dan pembangunan dari wilayah terdepan.

**5. Isu Strategis 5: Reposisi Peran Strategis DPKP sebagai Pilar
Ketahanan Sosio-Ekonomi dan Akselerator Pencapaian
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**

Peran DPKP melampaui fungsi teknis pemadaman dan penyelamatan; ia merupakan instrumen vital dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi dan mendukung pencapaian agenda pembangunan yang lebih luas. Setiap insiden kebakaran, baik di sektor industri maupun permukiman, membawa dampak ekonomi negatif yang signifikan, mulai dari kerusakan properti, disrupsi operasional bisnis, hingga hilangnya mata pencaharian. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kebakaran rumah tinggal dapat menjadi guncangan katastrofik yang menjerumuskan keluarga ke dalam kemiskinan ekstrem.

Dengan demikian, fungsi pencegahan dan respons cepat DPKP secara langsung bertindak sebagai jaring pengaman ekonomi, melindungi aset produktif, dan mencegah jatuhnya masyarakat ke dalam jurang kemiskinan. Peran ini sangat selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Secara spesifik, DPKP berkontribusi pada **SDG 1 (Tanpa Kemiskinan)** dengan melindungi aset masyarakat rentan dari guncangan ekonomi; **SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan)** dengan menciptakan lingkungan yang aman dan tangguh terhadap bencana; serta **SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim)** melalui mitigasi kebakaran lahan. Mengarusutamakan peran ini akan mereposisi DPKP dari sekadar pusat biaya (*cost center*) menjadi investasi strategis untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan.

Tabel II.20 Matriks Keterkaitan Isu Strategis DPKP dengan Arah Kebijakan Pembangunan

No.	Isu Strategis DPKP Gresik	Keterkaitan dengan Arah Kebijakan Daerah (Kabupaten Gresik)	Keterkaitan dengan Arah Kebijakan Provinsi (Jawa Timur) & Nasional
1.	Eskalasi Profil Risiko Kebakaran dan Non-Kebakaran Berdampak Signifikan sebagai Konsekuensi Akselerasi Pembangunan Ekonomi.	Mendukung Visi "Pembangunan Gresik Baru... sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi" dan Misi 3 RPJMD (Infrastruktur Berkelanjutan) dengan melindungi aset-aset investasi strategis di KEK, JIPE, dan kawasan industri lainnya.	Berkontribusi pada Asta Cita ke-3 (Infrastruktur) dan ke-5 (Hilirisasi Industri) dengan menjamin keamanan dan keberlanjutan operasional industri strategis nasional yang berlokasi di Gresik.
2.	Evolusi Mandat Pelayanan dan Transformasi Misi Institusional Menuju Entitas Respons Kedaruratan Multi-Ancaman.	Selaras dengan isu strategis daerah tentang "Ketahanan Bencana dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim". Peran DPKP dalam penanganan berbagai jenis penyelamatan adalah manifestasi nyata dari ketahanan daerah.	Sejalan dengan mandat UU yang mengamanatkan urusan kebakaran sebagai pelayanan dasar dalam rangka perlindungan masyarakat dari berbagai ancaman, serta mendukung agenda nasional pengurangan risiko bencana.
3.	Kesenjangan Kapasitas Institusional (<i>The Capability Gap</i>) sebagai Hambatan Fundamental Keberlanjutan Pelayanan.	Menjadi prasyarat utama dalam realisasi Misi Kelima RPJMD tentang "Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional... dan Berorientasi pada Pelayanan yang Terbaik bagi Masyarakat".	Merupakan implementasi dari kewajiban hukum daerah untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-urusan Kebakaran sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.	Imperatif Ganda: Optimalisasi Ketahanan Komunitas dan Pemerataan Akses Pelayanan Proteksi Dasar.	Mengimplementasikan isu strategis daerah "Pembangunan Desa berbasis Kebutuhan Lokal" dan "Pemerataan Akses... di Seluruh Wilayah", khususnya melalui pembentukan REDKAR	Mendukung arah kebijakan nasional yang menekankan pembangunan dari pinggiran, penguatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan

		dan penyediaan layanan di Pulau Bawean.	bencana, dan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5.	Reposisi Peran Strategis DPKP sebagai Pilar Ketahanan Sosio-Ekonomi dan Akselerator Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).	Mendukung Visi "Kesejahteraan Masyarakat" dan Misi "Pembangunan Ekonomi Inklusif" dengan mencegah guncangan ekonomi akibat bencana yang dapat menyebabkan kemiskinan dan menghambat pertumbuhan UMKM.	Selaras secara langsung dengan komitmen nasional untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik periode 2025-2029 didasarkan pada prinsip koherensi kebijakan (*policy coherence*). Prinsip ini menegaskan bahwa DPKP tidak beroperasi sebagai entitas teknis yang terisolasi, melainkan merupakan perangkat daerah strategis yang perannya terintegrasi secara fundamental dalam arsitektur pembangunan daerah. Arah strategis DPKP merupakan derivasi dan penjabaran operasional dari agenda pembangunan yang lebih tinggi, yang secara langsung diamanatkan untuk melindungi dan meningkatkan ketahanan aset pembangunan serta resiliensi masyarakat.

Visi pembangunan Kabupaten Gresik untuk periode 2025-2029, sebagaimana termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), adalah **“Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat”**. Visi ini menggarisbawahi komitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dengan tetap menjaga keberlanjutan ekologis dan sosial. Dalam kerangka pencapaian visi tersebut, peran DPKP secara eksplisit selaras dengan

Misi Ketiga RPJMD Kabupaten Gresik, yaitu “Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat”.

Keterkaitan ini menempatkan DPKP pada posisi sentral. Dalam konteks pembangunan kontemporer yang diwarnai oleh akselerasi industrialisasi, urbanisasi yang pesat, dan eskalasi ancaman bencana hidrometeorologis akibat perubahan iklim, konsep "ketangguhan infrastruktur" (*infrastructure resilience*) tidak lagi dapat dipandang sebagai isu teknis semata. Ketangguhan infrastruktur telah menjadi prasyarat fundamental (*fundamental prerequisite*) bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi, stabilitas iklim investasi, dan jaminan kesejahteraan publik.

Dengan demikian, peran DPKP bertransformasi dari sekadar unit respons kedaruratan menjadi mitra strategis pembangunan yang berfungsi menjamin keamanan dan keberlangsungan aset-aset vital yang menjadi tulang punggung perekonomian dan kehidupan masyarakat Gresik.

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 2025-2029 memosisikan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai salah satu pilar fundamental dalam mewujudkan ketangguhan infrastruktur daerah. Analisis terhadap tujuan, sasaran, dan strategi yang dicanangkan menunjukkan sebuah pendekatan yang pragmatis, berbasis data, dan sadar akan keterbatasan fiskal.

Berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik untuk periode 2025-2030, dirumuskan serangkaian tujuan dan sasaran strategis yang relevan dengan kewenangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Kerangka logis perencanaan ini menunjukkan adanya hubungan hierarkis antara sasaran makro, tujuan, sasaran spesifik, dan indikator kinerja yang terukur sebagaimana yang telah dimuat dalam Table III.1 Tabel Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran.

Sasaran utama RPJMD yang menjadi payung bagi program-program terkait kebencanaan adalah "**Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah**". Sasaran makro ini kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan yang lebih operasional, yaitu "**Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan**".

Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, ditetapkan indikator kinerja utama berupa **Indeks Risiko Bencana (IRB)**. Nilai dasar (baseline) IRB pada tahun 2024 adalah **105,07**. Proyeksi target untuk indikator ini menunjukkan dinamika sebagai berikut:

1. **Target 2025:** 132,58
2. **Target 2026:** 129,42

3. **Target 2027:** 126,42
4. **Target 2028:** 123,55
5. **Target 2029:** 120,79
6. **Target 2030:** 117,17

Meskipun terdapat kenaikan pada target awal tahun 2025, tren yang diproyeksikan dari tahun 2026 hingga 2030 menunjukkan adanya komitmen untuk **penurunan risiko bencana secara progresif**. Penurunan nilai indeks ini merefleksikan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan sistem mitigasi untuk mengurangi kerentanan daerah terhadap potensi bencana.

Secara lebih spesifik, dalam kerangka tujuan besar di atas, ditetapkan sasaran yang menjadi domain langsung Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, yaitu "**Meningkatkan ketangguhan desa terhadap bencana, mempercepat respons penanganan kebakaran, dan menurunkan kerugian pasca bencana**".

Indikator kinerja kunci yang digunakan untuk mengukur sasaran ini adalah "**Rerata Respon Time Rate Penanganan Kebakaran**", yang diukur dalam satuan menit. Berdasarkan data, nilai dasar indikator ini pada tahun 2024 tercatat sebesar **48,83 menit**. Menariknya, target untuk indikator ini ditetapkan **stagnan pada angka 48,83 menit** untuk seluruh periode perencanaan dari tahun 2025 hingga 2030.

Stagnasi target waktu respons penanganan kebakaran ini mengindikasikan adanya pengakuan realistis terhadap tantangan yang ada. Berdasarkan keterangan dalam dokumen, penetapan target yang konstan ini didasari oleh pertimbangan bahwa upaya untuk menurunkan (mempercepat) rerata waktu respons secara signifikan menuntut **investasi yang sangat besar**.

Peningkatan kinerja pada aspek ini memerlukan penambahan masif pada sarana dan prasarana (seperti pos pemadam baru, kendaraan, dan peralatan modern) serta peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM). **Keterbatasan kapasitas keuangan daerah** diidentifikasi

sebagai kendala utama yang menyebabkan target kinerja pada layanan krusial ini dipertahankan pada level optimal yang dapat dicapai dengan sumber daya yang ada saat ini. Dengan kata lain, pemerintah daerah memprioritaskan pemeliharaan standar layanan yang sudah ada sambil mengakui bahwa peningkatan lebih lanjut terhambat oleh keterbatasan fiskal.

Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator	IKU RPJMD	IKD RPJMD	IKK RPJMD	IUP	Baseline Tahun 2024	2025	2026	Target Tahun				Keterangan
1	2	3	4					5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan		Indeks Risiko Bencana	✓				105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	
		Meningkatkan ketangguhan desa terhadap bencana, mempercepat respons penanganan kebakaran, dan menurunkan kerugian pasca bencana.	Rerata Respon Time Rate Penanganan Kebakaran (Menit)		✓			48,83	48,83	48,83	48,83	48,83	48,83	48,83	

3.1.1. Tujuan: Penguatan Resiliensi Infrastruktur Daerah

Secara hierarkis, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berkontribusi pada tujuan makro, yaitu "Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan." Formulasi ini menggaris bawahi bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari aspek kuantitas fisik, tetapi juga dari kualitas ketahanannya (resilience) terhadap berbagai disrupsi, termasuk bencana alam dan non-alam.

Sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur pencapaian tujuan ini, ditetapkan Indeks Risiko Bencana (IRB). Proyeksi target IRB memperlihatkan sebuah kurva yang logis: setelah kenaikan awal pada tahun 2025 (dari baseline 105,07 menjadi 132,58)—kemungkinan merefleksikan asesmen risiko yang lebih komprehensif—target kemudian diproyeksikan menurun secara gradual hingga mencapai 120,79 pada tahun 2029. Hal ini mengindikasikan adanya serangkaian intervensi kebijakan yang dirancang untuk menekan tingkat risiko secara sistematis dan terukur.

3.1.2. Sasaran: Optimalisasi Kinerja Tri-Fungsi Penanggulangan Bencana

Untuk menerjemahkan tujuan makro ke dalam ranah operasional, ditetapkan sasaran spesifik, yaitu "Meningkatkan ketangguhan desa terhadap bencana, mempercepat respons penanganan kebakaran, dan menurunkan kerugian pasca bencana." Sasaran ini secara efektif mencakup tiga domain utama dalam siklus manajemen kebencanaan dan kebakaran:

1. Dimensi Pra-Bencana (Preventif-Mitigatif): Diartikulasikan melalui "meningkatkan ketangguhan desa".
2. Dimensi Saat Bencana (Responsif): Tercermin dalam "mempercepat respons penanganan kebakaran".
3. Dimensi Pasca-Bencana (Rehabilitatif): Diwakili oleh "menurunkan kerugian pasca bencana".

Indikator Kinerja Sasaran yang dipilih untuk mengukur dimensi responsif adalah "Rerata Respon Time Rate Penanganan Kebakaran," dengan nilai baseline 48,83 menit.

3.1.3. Strategi: Realisme Fiskal dalam Penetapan Standar Pelayanan Minimum

Analisis terhadap target indikator sasaran mengungkapkan inti dari strategi yang dianut. Target untuk **"Rerata Respon Time Rate"** ditetapkan **stagnan pada angka 48,83 menit** sepanjang periode perencanaan. Dokumen perencanaan secara eksplisit menyatakan bahwa keputusan ini didasarkan pada pertimbangan **realisme fiskal**. Upaya untuk menurunkan *response time*—yang secara inheren membutuhkan investasi modal yang signifikan untuk penambahan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia—diakui melampaui kapasitas keuangan daerah saat ini.

Oleh karena itu, strategi yang diadopsi adalah **pemeliharaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) atau *service level maintenance***. Alih-alih menetapkan target yang tidak realistis, pemerintah daerah memilih untuk memastikan bahwa tingkat layanan yang ada tidak mengalami degradasi. Strategi ini memungkinkan alokasi sumber daya yang terbatas untuk difokuskan pada program-program mitigasi risiko yang lebih luas dan preventif, yang sejalan dengan tujuan utama penurunan Indeks Risiko Bencana.

Secara konseptual, ini adalah manifestasi dari *rational planning* (perencanaan rasional), di mana aspirasi untuk perbaikan layanan diseimbangkan dengan pengakuan objektif terhadap kendala sumber daya. Arah kebijakan ini mencerminkan sebuah perencanaan yang matang dan bertanggung jawab, menghindari penetapan target yang tidak dapat dicapai (*unachievable goals*) demi menjaga kredibilitas dokumen perencanaan itu sendiri.

3.2. Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran strategis DPKP periode 2025-2029 disusun melalui pendekatan analitis yang sistematis untuk memastikan adanya benang merah (*golden thread*) yang menghubungkan mandat kebijakan pada level nasional hingga implementasi di tingkat perangkat daerah.

3.2.1. Kerangka Regulasi dan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM) sebagai Landasan Strategis

Strategi DPKP Gresik berlandaskan pada kerangka regulasi yang jelas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menempatkan sub-urusan kebakaran sebagai bagian dari pelayanan dasar wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Amanat ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang kemudian dijabarkan secara teknis melalui

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018. Regulasi ini menetapkan standar mutu pelayanan dasar sub-urusan kebakaran, dengan indikator kinerja utama berupa

tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit sejak laporan diterima hingga unit pertama tiba di lokasi. Untuk mengoperasionalkan SPM tersebut dalam konteks lokal, DPKP diamanatkan untuk menyusun dokumen Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM). NSPM berfungsi sebagai panduan teknis yang komprehensif, mencakup :

1. Norma: Prinsip-prinsip dasar yang memandu setiap tindakan, seperti "Keselamatan Petugas dan Korban adalah Prioritas Utama".
2. Standar: Tolok ukur kuantitatif yang harus dicapai, misalnya "Waktu gelar selang tidak lebih dari 3 menit".
3. Prosedur: Rangkaian langkah baku untuk setiap skenario, seperti Prosedur Operasional Standar (POS) pemadaman gedung bertingkat atau penyelamatan kecelakaan lalu lintas.
4. Manual/Kriteria: Indikator keberhasilan untuk setiap operasi, misalnya "Api berhasil dilokalisasi dalam 20 menit".

Mengingat profil risiko Kabupaten Gresik yang heterogen, dengan adanya kawasan industri berisiko tinggi seperti KEK JIPE, standar waktu tanggap nasional 15 menit dinilai tidak memadai untuk seluruh wilayah. Oleh karena itu, NSPM DPKP Gresik mengadopsi

Model Pelayanan Berjenjang Berbasis Risiko (*Tiered-Risk Model*)

yang membedakan target waktu tanggap :

1. Tingkat 1 (Risiko Sangat Tinggi): Kawasan KEK JIPE dan Objek Vital Nasional, dengan target waktu tanggap di bawah 7 menit.
2. Tingkat 2 (Risiko Tinggi): Kawasan industri lain dan pusat komersial padat, dengan target di bawah 10 menit.
3. Tingkat 3 (Risiko Sedang/Rendah): Area permukiman dan perdesaan, dengan target sesuai SPM nasional, yaitu maksimal 15 menit.

Pendekatan berbasis risiko ini menjadi landasan bagi seluruh perumusan strategi, mulai dari penempatan pos strategis, alokasi sumber daya, hingga pengembangan kompetensi personel.

3.2.2. Analisis Penurunan Sasaran (Cascading Objectives Analysis)

Justifikasi perumusan tujuan dan sasaran DPKP dilandaskan pada hierarki dokumen perencanaan sebagai berikut:

1. **Tingkat Nasional (RPJMN 2025-2029):** Mandat DPKP selaras dengan dua Prioritas Nasional (Asta Cita) yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Pertama, **Prioritas Nasional 3** yang berfokus pada **“Melanjutkan pengembangan infrastruktur...”**, secara langsung mengamanatkan peran DPKP dalam melindungi investasi infrastruktur publik dan swasta dari berbagai ancaman. Kedua, **Prioritas Nasional 8** yang bertujuan **“Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam...”**, mengaitkan fungsi DPKP dengan agenda nasional yang lebih luas dalam manajemen risiko bencana, mitigasi perubahan iklim, dan pengelolaan lingkungan hidup. Agenda pembangunan RPJPN 2025-2045 secara spesifik menargetkan "Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim" sebagai salah satu pilar ketahanan ekologi.

2. **Tingkat Daerah (RPJMD Kabupaten Gresik 2025-2029):** Prioritas nasional tersebut diturunkan ke dalam kerangka pembangunan daerah melalui serangkaian tingkatan. **Misi 3** RPJMD mengenai infrastruktur yang berkelanjutan dijabarkan lebih lanjut menjadi **Tujuan** pembangunan, yaitu “Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan”. Puncak dari penurunan sasaran ini adalah ditetapkan **Sasaran 11** RPJMD, yang menjadi target utama bagi DPKP, yakni **“Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah”**.

3.2.3. Perumusan Tujuan dan Sasaran Strategis DPKP

Berdasarkan analisis penurunan sasaran tersebut, dirumuskan tujuan dan sasaran strategis DPKP untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

Tujuan Perangkat Daerah:

Terwujudnya Ketangguhan Infrastruktur dan Resiliensi Masyarakat Kabupaten Gresik melalui Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Profesional, Modern, dan Responsif.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Efektivitas dan Kecepatan Respons Pelayanan Kedaruratan.
 - a. **Indikator Kinerja Sasaran:** Rerata Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Penanganan Kebakaran (Menit).
 - b. **Kondisi Awal (2024):** 48,83 Menit.
 - c. **Target (2025-2029):** 48,83 Menit (Stagnan).

Penetapan target yang stagnan untuk indikator waktu tanggap merefleksikan sebuah tantangan strategis yang fundamental. Data perencanaan secara eksplisit menyatakan bahwa stagnasi ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk melakukan investasi signifikan dalam penambahan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia. Kondisi ini menghadirkan sebuah kontradiksi: sementara sasaran RPJMD

adalah untuk *meningkatkan* ketangguhan infrastruktur, indikator kinerja kunci yang mengukur kecepatan respons justru tidak menunjukkan perbaikan. Dalam Renstra ini, stagnasi tersebut tidak dimaknai sebagai penerimaan atas kinerja yang tidak optimal, melainkan sebagai sebuah *baseline* kritis yang menyoroti adanya kesenjangan sumber daya (*resource gap*). Dengan demikian, seluruh strategi yang diuraikan dalam bab ini, seperti pembangunan pos strategis dan modernisasi peralatan, dirancang secara spesifik untuk memecahkan stagnasi ini. Keberhasilan implementasi Renstra ini akan diukur dari kemampuannya untuk melampaui target stagnan tersebut, yang memerlukan komitmen politik dan alokasi anggaran yang tegas.

2. Sasaran 2: Menguatnya Sistem Mitigasi dan Ketahanan Daerah terhadap Risiko Bencana.

- a. **Indikator Kinerja Sasaran:** Indeks Risiko Bencana (IRB).
- b. **Kondisi Awal (2024):** 91,42 (Kategori Sedang).
- c. **Target (2029):** Penurunan menuju 120,79 (perbaikan/penurunan risiko).

Sasaran ini menandai sebuah pergeseran imperatif dari postur reaktif menuju proaktif. Eskalasi profil risiko Kabupaten Gresik yang didorong oleh industrialisasi masif—termasuk keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIPE—dan dampak perubahan iklim yang terukur menjadikan model pelayanan yang hanya berfokus pada respons tidak lagi memadai. Data operasional menunjukkan adanya transformasi mandat DPKP di lapangan, di mana frekuensi operasi penyelamatan non-kebakaran kini mendominasi beban kerja. Hal ini memberikan justifikasi empiris bahwa DPKP telah berevolusi menjadi badan respons multi-ancaman. Oleh karena itu, upaya untuk memperbaiki Indeks Risiko Bencana tidak hanya bergantung pada peningkatan kecepatan respons, tetapi secara fundamental menuntut penguatan sistem mitigasi, pencegahan, dan kesiapsiagaan. Sasaran ini menjadi landasan strategis bagi DPKP untuk memperkuat perannya sebagai aktor utama dalam manajemen risiko daerah melalui program edukasi

publik, inspeksi keselamatan kebakaran industri, dan pemberdayaan masyarakat.

3. Sasaran 3: Terwujudnya Transformasi Kelembagaan DPKP yang Adaptif dan Berbasis Kinerja.

1. **Indikator Kinerja Sasaran:** (1) Persentase Pemenuhan Kebutuhan Personel Ideal (%); (2) Indeks Profesionalitas Aparatur; (3) Persentase Sarana Prasarana Sesuai Standar Minimal (%).

Sasaran ini dirumuskan untuk mengatasi paradoks fundamental yang teridentifikasi dalam analisis kinerja DPKP: pencapaian target Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 100% dan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi dicapai di tengah defisit personel yang mencapai 70,6% dan kondisi sarana prasarana yang menua. Kinerja unggul ini ditopang oleh efisiensi operasional dan dedikasi personel di lapangan yang bekerja melampaui kapasitas standar, sebuah model yang digambarkan sebagai "heroisme" sistemik. Model operasional semacam ini secara inheren rapuh dan tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Ketergantungan pada upaya individual yang luar biasa menciptakan kerentanan institusional yang signifikan; satu insiden berskala besar atau kompleks berpotensi memicu kegagalan sistemik. Oleh karena itu, sasaran transformasi kelembagaan ini menjadi fondasi yang memungkinkan (*foundational enabler*) bagi pencapaian dua sasaran lainnya. Sasaran ini secara eksplisit menargetkan penutupan kesenjangan sumber daya, modernisasi aset, dan profesionalisasi aparatur untuk melembagakan kinerja unggul dan mentransisikan DPKP dari model yang berbasis heroisme individual menjadi model yang berbasis ketahanan sistemik.

3.2.4. Keselarasan Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan dengan Pembangunan Nasional, Provinsi, Daerah, dan NSPM

Kerangka strategis DPKP Gresik dirancang dengan memastikan adanya koherensi vertikal, di mana tujuan dan sasarannya merupakan penjabaran operasional dari agenda pembangunan pada tingkat yang lebih

tinggi, mulai dari nasional, provinsi, hingga kabupaten, serta berlandaskan pada kerangka regulasi teknis yang berlaku.

1. **Tingkat Nasional:** Arah strategis DPKP selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Secara spesifik, peran DPKP mendukung dua Prioritas Nasional (Asta Cita). Pertama, **Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur**, di mana DPKP berfungsi melindungi investasi infrastruktur dari berbagai ancaman. Kedua, **Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam**, yang mengaitkan fungsi DPKP dengan agenda manajemen risiko bencana dan mitigasi perubahan iklim. Penyelarasan ini juga sejalan dengan agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang menargetkan "Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim" sebagai pilar ketahanan ekologi.
2. **Tingkat Provinsi:** Kebijakan DPKP terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2025-2029. Dukungan ini termanifestasi dalam keselarasan dengan **Misi "Jatim Akses"** yang berfokus pada penguatan infrastruktur dan konektivitas, serta **Misi "Jatim Lestari"** yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan. Peran DPKP dalam mitigasi bencana secara langsung menjawab salah satu isu strategis utama provinsi, yaitu "Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana".
3. **Tingkat Daerah:** Pada tingkat kabupaten, Renstra DPKP merupakan instrumen implementasi utama untuk **Misi 3 RPJMD Kabupaten Gresik 2025-2029**. Seluruh tujuan, sasaran, dan program DPKP diturunkan secara langsung dari mandat untuk mencapai **Sasaran RPJMD "Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah"**, yang bertujuan

mewujudkan pembangunan infrastruktur strategis yang tangguh dan berkelanjutan.

4. **NSPM (Norma, Standar, Prosedur, dan Manual):** Tujuan dan sasaran DPKP berlandaskan pada mandat hukum untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Kebakaran, sebagaimana diatur dalam **Permendagri Nomor 114 Tahun 2018**. Regulasi ini menetapkan standar teknis pelayanan dasar, termasuk indikator kinerja utama berupa **tingkat waktu tanggap (*response time*) 15 menit**. Pemenuhan standar ini menjadi justifikasi fundamental bagi perumusan Sasaran 1 (peningkatan respons) dan Sasaran 3 (transformasi kelembagaan untuk memenuhi standar).

Tabel III.2 Matriks Keselarasan Strategis DPKP Gresik dengan Kebijakan Pembangunan dan NSPM

Tingkat Kebijakan	Dokumen Rujukan	Amanat/Arah Kebijakan Relevan	Tujuan/Sasaran Strategis DPKP yang Selaras
Nasional	RPJMN 2025-2029	PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur. PN 8: Memperkuat Penyelarasan dengan Lingkungan Alam (mencakup resiliensi bencana).	Sasaran 1, 2, dan 3: Melindungi infrastruktur (respons & mitigasi) dan memerlukan kelembagaan yang kuat untuk melakukannya.
Provinsi	RPJMD Jawa Timur 2025-2029	Misi "Jatim Akses": Penguatan infrastruktur. Misi "Jatim Lestari": Kelestarian lingkungan. Isu Strategis: Ketahanan Bencana.	Sasaran 1 & 2: Mendukung ketahanan infrastruktur dan mitigasi bencana sejalan dengan prioritas provinsi.

Daerah	RPJMD Kab. Gresik 2025-2029	Misi 3: Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan. Sasaran: Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah.	Tujuan & Seluruh Sasaran (1, 2, 3): Merupakan penjabaran langsung dari mandat utama yang diberikan oleh RPJMD Kabupaten.
NSPM	Permendagri No. 114 Tahun 2018	SPM Sub-Urusan Kebakaran: Kewajiban pemenuhan mutu pelayanan dasar, termasuk waktu tanggap (<i>response time</i>) maksimal 15 menit.	Sasaran 1 & 3: Menjadi landasan teknis dan hukum untuk meningkatkan kecepatan respons serta justifikasi untuk penguatan kelembagaan (SDM & sarpras) agar dapat memenuhi standar minimal.

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan

Perumusan strategi dan arah kebijakan DPKP Gresik periode 2025-2029 merupakan kerangka kerja implementatif yang dirancang untuk menjawab secara langsung isu-isu strategis yang teridentifikasi, selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik, serta dapat dioperasionalkan secara realistis. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip **SMART** (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*), dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah, serta mengintegrasikan inovasi, landasan regulasi NSPM, dan analisis data sektoral (DSSD) untuk memastikan setiap intervensi kebijakan bersifat tepat sasaran dan berdampak optimal.

3.3.1. Strategi Pencapaian Sasaran

Strategi yang dirumuskan merupakan jawaban langsung terhadap tiga sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan justifikasi yang berakar pada analisis isu strategis pada Bab II.

**Tabel III.3 Matriks Keterkaitan Isu Strategis, Sasaran, dan Strategi DPKP
2025-2029**

Isu Strategis (Bab II)	Sasaran Strategis Terkait	Strategi yang Dirumuskan
1. Eskalasi Profil Risiko vs. Kesenjangan Kapasitas 2. Keterbatasan Jangkauan Layanan (Blank Spot)	Sasaran 1: Meningkatnya Efektivitas dan Kecepatan Respons Pelayanan Kedaruratan.	Strategi 1: Implementasi Model Pelayanan Berjenjang Berbasis Risiko (<i>Tiered-Risk Model</i>) dan Modernisasi Teknologi Operasional.
3. Transformasi Mandat dari Reaktif ke Proaktif 4. Kebutuhan Penguatan Peran Pencegahan	Sasaran 2: Menguatnya Sistem Mitigasi dan Ketahanan Daerah terhadap Risiko Bencana.	Strategi 2: Penguatan Kapasitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan melalui Edukasi Publik, Inspeksi Proaktif, dan Pemberdayaan Komunitas.
1. Eskalasi Profil Risiko vs. Kesenjangan Kapasitas 3. Transformasi Mandat dari Reaktif ke Proaktif	Sasaran 3: Terwujudnya Transformasi Kelembagaan DPKP yang Adaptif dan Berbasis Kinerja.	Strategi 3: Pemenuhan Bertahap Kebutuhan Sumber Daya Esensial dan Peningkatan Profesionalisme Aparatur.

1. Strategi 1: Implementasi Model Pelayanan Berjenjang Berbasis Risiko (*Tiered-Risk Model*) dan Modernisasi Teknologi Operasional.

Strategi ini secara langsung menjawab isu eskalasi profil risiko, terutama di kawasan industri strategis seperti KEK JIPE, di mana standar waktu tanggap nasional 15 menit (sesuai SPM Permendagri 114/2018) tidak lagi memadai. Dengan mengadopsi model berjenjang yang direkomendasikan dalam analisis NSPK, DPKP dapat memprioritaskan alokasi sumber daya yang terbatas secara lebih efektif. Pendekatan ini bersifat realistis karena tidak menuntut peningkatan kapasitas serentak di seluruh wilayah, melainkan fokus pada zona berisiko tertinggi terlebih dahulu. Inovasi dalam strategi ini adalah penerapan *force multipliers* seperti pemetaan risiko berbasis GIS dan penggunaan *drone* untuk asesmen insiden yang cepat dan aman, yang memungkinkan peningkatan efektivitas operasional tanpa penambahan personel secara masif di tahap awal.

2. Strategi 2: Penguatan Kapasitas Pencegahan dan Kesiapsiagaan melalui Edukasi Publik, Inspeksi Proaktif, dan Pemberdayaan Komunitas.

Strategi ini merupakan manifestasi dari transformasi mandat DPKP dari reaktif ke proaktif. Dengan tingginya frekuensi kebakaran lahan akibat perilaku masyarakat dan meningkatnya risiko di sektor industri, pendekatan pencegahan menjadi lebih efisien secara biaya dibandingkan respons pasca-kejadian. Inovasi utama adalah formalisasi dan penguatan program Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) sebagai jaringan respons pertama berbasis komunitas. Program ini secara efektif memperluas jangkauan layanan untuk mengatasi *blank spot* dengan biaya yang relatif rendah, sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat (*community resilience*), sejalan dengan amanat NSPM untuk pemberdayaan masyarakat.

3. Strategi 3: Pemenuhan Bertahap Kebutuhan Sumber Daya Esensial dan Peningkatan Profesionalisme Aparatur.

Strategi ini merupakan fondasi untuk mencapai dua strategi lainnya dan menjawab isu paling fundamental: kesenjangan kapasitas kritis. Tanpa sumber daya yang memadai, pencapaian target SPM dan implementasi *Tiered-Risk Model* tidak akan berkelanjutan. Pendekatan "pemenuhan bertahap" diadopsi sebagai respons realistis terhadap keterbatasan fiskal daerah, dengan menyusun peta jalan rekrutmen dan modernisasi aset multi-tahun. Peningkatan profesionalisme melalui pelatihan dan sertifikasi juga krusial untuk menjawab transformasi mandat DPKP menjadi lembaga respons multi-ancaman, yang kini lebih banyak menangani operasi penyelamatan non-kebakaran.

3.3.2. Arah Kebijakan Tahunan (Pentahapan 2025-2029)

Arah kebijakan tahunan dirancang secara sistematis untuk memastikan implementasi strategi yang terukur dan selaras dengan pentahapan arah kebijakan **Misi 3 RPJMD Kabupaten Gresik**. Peta jalan ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengikat secara waktu (*Time-Bound*), memastikan setiap langkah strategis dapat diimplementasikan secara logis dan berkelanjutan.

**Tabel III.4 Peta Jalan Arah Kebijakan DPKP Selaras dengan Pentahapan
RPJMD 2025-2029**

TAHUN	FOKUS ARAH KEBIJAKAN RPJMD (MISI 3) ⁷	ARAH KEBIJAKAN OPERASIONAL DPKP	INDIKATOR KUNCI (SMART)
2025	Fondasi Perencanaan Adaptif: Penyusunan strategi ketangguhan infrastruktur melalui pemetaan risiko bencana dan kerentanan iklim.	Finalisasi dan adopsi <i>Tiered-Risk Model</i> ; Pelaksanaan pemetaan risiko berbasis GIS secara detail; Perumusan <i>master plan</i> pengembangan pos-pos strategis.	Dokumen NSPM berbasis risiko disahkan; Peta risiko digital tersedia untuk 50% wilayah prioritas.
2026	Penguatan Kapasitas Awal: Pembangunan infrastruktur dasar dan strategis secara merata dan terintegrasi.	Memulai fase rekrutmen awal personel (15% dari defisit); Pengadaan APD esensial dan peralatan dasar; Memulai pembangunan 1 pos strategis prioritas di dekat kawasan industri.	Jumlah personel meningkat 15%; 1 pos baru mulai dibangun; Pemenuhan APD standar mencapai 50%.
2027	Peningkatan Kapasitas Adaptif: Peningkatan kapasitas adaptif wilayah melalui penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.	Intensifikasi program pembentukan dan pembinaan REDKAR di 50% desa/kelurahan prioritas; Peluncuran kampanye edukasi publik berskala besar; Pelaksanaan <i>joint drills</i> dengan industri di KEK JIPE.	50% desa prioritas memiliki unit REDKAR aktif; Jumlah insiden kebakaran akibat kelalaian menurun 5%.
2028	Integrasi Sistem dan Teknologi: Pengintegrasian sistem manajemen risiko dan pemanfaatan teknologi cerdas dan digitalisasi.	Implementasi sistem komando dan kendali modern; Operasionalisasi penggunaan <i>drone</i> untuk asesmen insiden; Integrasi basis data insiden DPKP dengan platform GISS.	Sistem komando terpusat beroperasi; Tim <i>drone</i> terbentuk dan tersertifikasi; Data insiden terintegrasi secara <i>real-time</i> .
2029	Konsolidasi dan Keberlanjutan:	Evaluasi komprehensif efektivitas <i>Tiered-Risk</i>	Laporan evaluasi dampak

TAHUN	FOKUS ARAH KEBIJAKAN RPJMD (MISI 3) ⁷	ARAH KEBIJAKAN OPERASIONAL DPKP	INDIKATOR KUNCI (SMART)
	Penguatan teknologi dan inovasi; Penyempurnaan kebijakan pengelolaan infrastruktur berbasis data.	<i>Model</i> ; Institusionalisasi kurikulum pelatihan dan sertifikasi; Perumusan rancangan strategis untuk periode 2030-2034.	<i>response time</i> diterbitkan; Standar kompetensi personel ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Peta jalan kebijakan tahunan ini merupakan manifestasi dari perencanaan rasional (*rational planning*), di mana setiap tahapan dibangun di atas fondasi yang diletakkan pada tahun sebelumnya, dengan mempertimbangkan secara cermat prinsip-prinsip SMART dan realitas kapasitas fiskal daerah.

1. **Tahun 2025: Fondasi Perencanaan Adaptif** Selaras dengan fokus RPJMD pada "Penyusunan strategi ketangguhan infrastruktur daerah melalui pemetaan risiko bencana," tahun 2025 didedikasikan sebagai fase fondasi analitis. Arah kebijakan ini **spesifik**, yaitu memfinalisasi dokumen NSPM yang mengadopsi *Tiered-Risk Model* dan memetakan risiko secara detail menggunakan GIS. Keberhasilannya **terukur** melalui tersedianya dokumen NSPM yang sah dan peta risiko digital yang mencakup wilayah prioritas. Kebijakan ini **dapat dicapai** (*achievable*) karena berfokus pada perencanaan dan analisis yang lebih mengandalkan modal intelektual daripada belanja modal masif, sebuah langkah yang **relevan** dan realistis mengingat keterbatasan fiskal. Langkah ini secara langsung menjawab isu strategis "eskalasi profil risiko" dengan menciptakan landasan data (DSSD) yang akan mengarahkan investasi masa depan secara lebih presisi, sebagai prasyarat untuk mencapai Sasaran 1 dan 2.

2. **Tahun 2026: Penguatan Kapasitas Awal** Sejalan dengan arah kebijakan RPJMD untuk "Pembangunan infrastruktur dasar," tahun 2026 menandai transisi dari perencanaan ke implementasi fisik awal. Kebijakan ini **spesifik** dengan menargetkan rekrutmen personel tahap pertama, pengadaan APD esensial, dan pembangunan satu pos strategis di lokasi yang telah diidentifikasi pada tahun 2025. Capaiannya **terukur** melalui peningkatan jumlah personel, persentase pemenuhan standar APD, dan progres fisik pembangunan pos. Kebijakan ini **dapat dicapai** karena bersifat inkremental dan tidak menargetkan penyelesaian seluruh defisit dalam satu tahun anggaran. Langkah ini sangat **relevan** untuk mulai mengatasi isu "kesenjangan kapasitas" (Sasaran 3) dan "keterbatasan jangkauan layanan" secara terarah dan berbasis bukti.
3. **Tahun 2027: Peningkatan Kapasitas Adaptif** Mengacu pada fokus RPJMD pada "Peningkatan kapasitas adaptif wilayah melalui partisipasi masyarakat," tahun 2027 mengalihkan fokus pada penguatan resiliensi dari luar ke dalam. Arah kebijakan ini **spesifik** pada intensifikasi program inovatif Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dan pelaksanaan latihan gabungan dengan sektor industri. Keberhasilannya **terukur** dari jumlah unit REDKAR yang aktif dan penurunan insiden kebakaran akibat kelalaian. Kebijakan ini sangat **dapat dicapai** karena memanfaatkan modal sosial dan kemitraan strategis yang bersifat *low-cost, high-impact*. Langkah ini **relevan** untuk menjawab isu "transformasi mandat ke proaktif" (Sasaran 2) dengan memperkuat fungsi pencegahan dan kesiapsiagaan di tingkat komunitas, sejalan dengan amanat NSPM.
4. **Tahun 2028: Integrasi Sistem dan Teknologi** Selaras dengan arah kebijakan RPJMD untuk "Pemanfaatan teknologi cerdas

dan digitalisasi," tahun 2028 adalah fase modernisasi sistemik. Kebijakan ini **spesifik** pada implementasi sistem komando dan kendali modern, operasionalisasi *drone*, dan integrasi data insiden dengan platform *smart city* (GISS). Keberhasilannya **terukur** melalui beroperasinya sistem komando terpusat dan integrasi data secara *real-time*. Kebijakan ini **dapat dicapai** karena merupakan evolusi logis setelah kapasitas dasar (personel dan pos) mulai terpenuhi. Langkah ini sangat **relevan** untuk menjawab isu "sistem komando yang belum modern" dan menjadi inti dari pencapaian Sasaran 1 dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas respons secara signifikan.

5. **Tahun 2029: Konsolidasi dan Keberlanjutan** Sejalan dengan fokus RPJMD pada "Penyempurnaan kebijakan pengelolaan infrastruktur berbasis data," tahun 2029 berfungsi sebagai fase evaluasi dan pelembagaan. Arah kebijakan ini **spesifik** pada pelaksanaan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas *Tiered-Risk Model* dan institusionalisasi kurikulum pelatihan. Keberhasilannya **terukur** melalui terbitnya laporan evaluasi dampak dan ditetapkan standar kompetensi personel dalam produk hukum daerah. Kebijakan ini **dapat dicapai** karena merupakan aktivitas manajerial dan kebijakan. Langkah ini sangat **relevan** untuk memastikan keberlanjutan dari seluruh transformasi yang telah dilakukan, menutup siklus perencanaan strategis, dan menyediakan landasan berbasis bukti untuk penyusunan Renstra periode berikutnya.

3.3.3. Program Prioritas dan Keterkaitan dengan Nomenklatur Perencanaan

Untuk memastikan bahwa kerangka strategis ini dapat diimplementasikan dan didanai secara efektif, seluruh tujuan, sasaran, dan strategi dijabarkan ke dalam struktur program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang sesuai dengan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah yang

berlaku. Program utama yang menjadi payung bagi seluruh inisiatif strategis DPKP, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, adalah PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN dengan kode 1.05.04.

Program ini kemudian diuraikan ke dalam kegiatan dan sub-kegiatan yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan:

1. Kegiatan: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Kode: 1.05.04.2.01)
 - i.Sub-Kegiatan: Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (mendukung Sasaran 2: Menguatnya Sistem Mitigasi).
 - ii.Sub-Kegiatan: Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (mendukung Sasaran 1: Meningkatnya Efektivitas dan Kecepatan Respons).
 - iii.Sub-Kegiatan: Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran (mendukung Sasaran 1 dan 2).
 - iv.Sub-Kegiatan: Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (mendukung Sasaran 1 dan 2).

1. Analisis Keselarasan Program dengan Visi, Misi, dan Sasaran Daerah

Keterkaitan yang utuh antara visi-misi daerah hingga program perangkat daerah disajikan dalam matriks keselarasan strategis, yang berfungsi sebagai instrumen utama untuk perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, dan evaluasi.

Matriks berikut ini mendemonstrasikan adanya alur logika yang koheren (*golden thread*) dari tingkat visi hingga tingkat program. Matriks ini berfungsi sebagai instrumen utama untuk perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, dan evaluasi, yang secara visual menegaskan bahwa setiap program yang dijalankan oleh DPKP merupakan derivasi langsung dari mandat pembangunan daerah yang lebih tinggi. Penyelarasan ini memastikan bahwa alokasi sumber daya pada tingkat program secara langsung berkontribusi pada pencapaian sasaran strategis DPKP, yang pada gilirannya mendukung realisasi sasaran dan tujuan RPJMD, serta Misi 3 pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Tabel III.5 Matriks Keselarasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, Target, dan Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan & Sasaran Strategis DPKP	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Target Tahunan (2025-2029)	Program/Kegiatan /Sub-Kegiatan
Misi 3: Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.	Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik didukung pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang tangguh dan berkelanjutan.	Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah.	Tujuan: Terwujudnya Ketangguhan Infrastruktur dan Resiliensi Masyarakat Kabupaten Gresik melalui Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang Profesional, Modern, dan Responsif.				PROGRAM 1.05.04: PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN
			Sasaran 1: Meningkatnya Efektivitas dan Kecepatan Respons Pelayanan Kedaruratan.	Rerata Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Kebakaran (Menit)	48,83	2025: 48,83 2026: 48,83 2027: 48,83 2028: 48,83 2029: 48,83	Kegiatan 1.05.04.2.01: - Sub-Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran - Sub-Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi - Sub-Kegiatan Penanganan B3
			Sasaran 2: Menguatnya Sistem Mitigasi dan Ketahanan Daerah terhadap Risiko Bencana.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	91,42	2025: 132,58 2026: 129,42 2027: 126,42 2028: 123,55 2029: 120,79	Kegiatan 1.05.04.2.01: - Sub-Kegiatan Pencegahan Kebakaran - Sub-

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan & Sasaran Strategis DPKP	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal (2024)	Target Tahunan (2025-2029)	Program/Kegiatan /Sub-Kegiatan
							Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi - Sub-Kegiatan Penanganan B3
			Sasaran 3: Terwujudnya Transformasi Kelembagaan DPKP yang Adaptif dan Berbasis Kinerja.	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Personel Ideal (%)		2025: 35% 2026: 45% 2027: 55% 2028: 65% 2029: 75%	Seluruh Program dan Kegiatan yang terkait dengan Penguatan SDM dan Sarpras
				Persentase Sarana Prasarana Sesuai Standar Minimal (%)	<i>Data Kualitatif : Menua/Tidak Standar</i>	2025: 40% 2026: 50% 2027: 60% 2028: 70% 2029: 80%	Seluruh Program dan Kegiatan yang terkait dengan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarpras

2. Keterkaitan Program Prioritas dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM)

Struktur program dan kegiatan DPKP tidak hanya selaras secara vertikal dengan RPJMD, tetapi juga secara horizontal dengan kerangka regulasi teknis yang mengaturnya. Setiap sub-kegiatan yang dirancang merupakan instrumen operasional untuk memenuhi amanat yang terkandung dalam Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM), khususnya yang dijabarkan dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-Urusan Kebakaran. Keterkaitan ini memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan memiliki landasan hukum yang kuat dan secara langsung berkontribusi pada pencapaian standar pelayanan nasional.

Matriks berikut menjabarkan korelasi antara amanat NSPM dengan program dan sub-kegiatan DPKP, beserta justifikasi operasionalnya.

Tabel III.6 Matriks Korelasi Program Prioritas DPKP dengan Amanat NSPM

<i>Amanat NSPM (Permendagri 114/2018)</i>	<i>Program/Kegiatan/Sub- Kegiatan Terkait</i>	<i>Korelasi dan Justifikasi Operasional</i>
<i>Layanan Respons Cepat (Response Time) Mutu pelayanan dasar dengan tingkat waktu tanggap maksimal 15 menit sejak laporan diterima hingga tiba di lokasi.</i>	Sub-Kegiatan: Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Sub- Kegiatan: Penyelamatan dan Evakuasi Korban	Kedua sub-kegiatan ini merupakan ujung tombak operasional DPKP dalam merespons insiden. Kinerja utama dari sub-kegiatan ini diukur secara langsung melalui indikator <i>response time</i> . Oleh karena itu, seluruh investasi dalam penguatan kapasitas pada sub-kegiatan ini (penambahan pos, modernisasi armada, rekrutmen personel) merupakan upaya langsung untuk memenuhi dan melampaui standar SPM.

Layanan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Amanat untuk melaksanakan layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran serta inspeksi.

**Sub-Kegiatan:
Pencegahan Kebakaran**

Sub-kegiatan ini secara eksplisit mengoperasionalkan paradigma proaktif yang diamanatkan NSPM. Program seperti pembentukan REDKAR, edukasi publik, dan inspeksi keselamatan kebakaran pada bangunan merupakan implementasi langsung dari mandat ini, yang bertujuan untuk mengurangi frekuensi dan dampak insiden, sehingga berkontribusi pada perbaikan Indeks Risiko Bencana (Sasaran 2).

Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi kebakaran maupun non-kebakaran (kondisi yang membahayakan manusia).

**Sub-Kegiatan:
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran**

Sub-kegiatan ini adalah jawaban atas transformasi dan perluasan mandat DPKP yang diakui dalam regulasi modern. Ini menjadi landasan bagi alokasi sumber daya untuk pengadaan peralatan *rescue* non-kebakaran dan pengembangan kompetensi personel penyelamat, menjawab data statistik (DSSD) yang menunjukkan dominasi operasi penyelamatan.

Layanan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Mandat untuk menangani insiden yang melibatkan B3, yang merupakan bagian dari risiko tinggi di kawasan industri.

**Sub-Kegiatan:
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran**

Mengingat profil risiko tinggi Kabupaten Gresik sebagai kawasan industri, sub-kegiatan ini menjadi krusial. Ini memberikan justifikasi untuk pengadaan peralatan khusus Hazmat (Hazardous

Materials) dan pelatihan spesialis bagi personel, sebagai bentuk mitigasi risiko terhadap ancaman berkonsekuensi tinggi yang tidak dapat ditangani dengan kapabilitas pemadaman konvensional.

Dengan demikian, struktur program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang diadopsi oleh DPKP Gresik merupakan arsitektur yang dirancang secara sistematis untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, menjawab tantangan operasional di lapangan, dan secara terukur berkontribusi pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang menjadi hak dasar bagi seluruh masyarakat.

3.4. Kerangka Kerja Prospektif Tahun 2030: Menjaga Kestinambungan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah siklus yang berkelanjutan. Untuk menjembatani akhir periode Renstra 2025-2029 dengan periode perencanaan berikutnya, serta untuk memastikan tidak terjadinya kevakuman arah kebijakan, disusunlah kerangka kerja prospektif untuk tahun 2030. Kerangka ini berfungsi sebagai pedoman transisi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025, yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPKP Tahun 2030 sebelum ditetapkan Renstra DPKP periode 2030-2034.

Penyusunan kerangka ini didasarkan pada prinsip suksesi perencanaan yang rasional, di mana arah kebijakan tahun 2030 merupakan derivasi logis dari pencapaian target tahun 2029 dan selaras dengan agenda pembangunan jangka panjang pada tingkat daerah (RPJPD Gresik & Jawa Timur) maupun nasional (RPJPN). Secara diplomatis, kerangka ini disajikan sebagai sebuah rekomendasi strategis yang telah dianalisis secara mendalam,

di mana implementasi penuh dan penyesuaiannya akan menjadi prerogatif dari kepemimpinan daerah selanjutnya.

Tujuan Strategis 2030: *Memantapkan Ketangguhan Infrastruktur dan Resiliensi Masyarakat melalui Kelembagaan DPKP yang Unggul dan Berkelanjutan.*

Sasaran Strategis 2030:

1. Terkonsolidasinya Efektivitas Respons Pelayanan Kedaruratan: Fokus pada evaluasi dampak implementasi *Tiered-Risk Model* dan optimalisasi sistem komando untuk menjaga dan meningkatkan kinerja waktu tanggap.
2. Terwujudnya Penurunan Risiko Bencana yang Berkelanjutan: Melanjutkan tren positif penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) menuju target 117,17, sejalan dengan target RPJMD.
3. Terlembagakannya Kapasitas DPKP yang Profesional: Melanjutkan pemenuhan kebutuhan personel dan sarana prasarana secara terukur, serta menginstitutionalisasi standar kompetensi aparatur.

Strategi dan Arah Kebijakan 2030:

Strategi untuk tahun 2030 berfokus pada “Konsolidasi dan Optimalisasi Sistem Ketangguhan Daerah Berbasis Evaluasi Kinerja dan Inovasi Berkelanjutan.” Arah kebijakan ini selaras dengan pentahapan RPJMD Gresik untuk tahun 2030, yang menekankan pada evaluasi, integrasi, dan penguatan menyeluruh :

1. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi (Monev) Berbasis Data: Melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas program 2025-2029 dengan memanfaatkan data spasial dan *real-time* untuk mengukur dampak nyata terhadap penurunan waktu tanggap dan risiko bencana.
2. Pengintegrasian Pembangunan Infrastruktur DPKP dengan Strategi Wilayah: Menyelaraskan rencana pengembangan pos dan alokasi sumber daya DPKP dengan strategi pembangunan wilayah yang lebih

luas, mereplikasi praktik baik, dan melakukan inovasi kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.

3. Penguatan Ketangguhan Infrastruktur DPKP Secara Menyeluruh: Fokus pada pemeliharaan prediktif, peremajaan aset kritis, dan peningkatan redundansi sistem untuk menjamin kesinambungan pelayanan publik dalam menghadapi berbagai skenario disrupsi.
4. Pengukuran dan Evaluasi Keberhasilan Mitigasi: Melakukan analisis kuantitatif terhadap keberhasilan program pencegahan (edukasi, REDKAR, inspeksi) dalam menurunkan frekuensi dan dampak insiden, sebagai dasar penyempurnaan kebijakan mitigasi di masa depan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV merupakan inti operasional dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik periode 2025-2029. Bab ini berfungsi sebagai jembatan yang mentransformasikan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah dirumuskan pada Bab III menjadi sebuah kerangka kerja implementatif yang terukur, dapat dilaksanakan, dan dapat didanai. Penyusunan bab ini didasarkan pada prinsip koherensi kebijakan (policy coherence), yang memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang tidak hanya berdiri sendiri, melainkan merupakan instrumen yang terintegrasi secara logis untuk menjawab isu-isu strategis fundamental yang telah diidentifikasi pada bab-bab sebelumnya.

Isu-isu strategis tersebut mencakup paradoks antara pencapaian kinerja pelayanan yang tinggi di tengah keterbatasan sumber daya sistemik; transformasi paradigma dari lembaga pemadam kebakaran menjadi badan respons darurat multi-ancaman (multi-hazard emergency response agency); serta eskalasi profil risiko sebagai konsekuensi dari akselerasi pembangunan ekonomi di Kabupaten Gresik. Dengan demikian, program dan kegiatan yang dijabarkan dalam bab ini diposisikan sebagai intervensi strategis untuk membangun fondasi kelembagaan yang kokoh, modern, dan berkelanjutan. Bab ini menyajikan kerangka kerja definitif yang akan menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), untuk periode 2025 hingga 2029, serta memberikan landasan bagi kesinambungan perencanaan pada tahun transisi 2030.

4.1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Struktur perencanaan DPKP Kabupaten Gresik dirancang dengan mematuhi arsitektur programatik yang ditetapkan dalam kerangka regulasi nasional, khususnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kepatuhan terhadap nomenklatur ini menjamin keselarasan vertikal dalam sistem perencanaan dan penganggaran, mulai dari tingkat pusat hingga daerah.

Seluruh inisiatif strategis, arah kebijakan, dan sasaran operasional DPKP Kabupaten Gresik untuk periode 2025-2029 dikonsolidasikan di bawah satu program utama yang menjadi payung bagi seluruh aktivitas perangkat daerah, yaitu PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN. Program tunggal ini secara logis diturunkan ke dalam dua kegiatan utama yang mencerminkan fungsi inti dan fungsi pendukung organisasi. Kegiatan pertama adalah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, yang merupakan kegiatan teknis dan operasional utama. Kegiatan kedua adalah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang mencakup fungsi-fungsi administratif, manajerial, dan pendukung yang esensial untuk kelancaran operasional dinas.

Struktur hierarkis ini kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam serangkaian subkegiatan yang spesifik dan dapat diukur. Subkegiatan ini mencakup spektrum penuh dari mandat DPKP, mulai dari aspek proaktif seperti penyusunan norma, standar, prosedur, dan manual (NSPM), inspeksi keselamatan kebakaran, dan edukasi publik, hingga aspek reaktif seperti operasi pemadaman, penyelamatan non-kebakaran, dan penanganan insiden bahan berbahaya dan beracun (B3). Arsitektur programatik ini memastikan bahwa setiap alokasi sumber daya dan setiap tindakan yang direncanakan memiliki keterlacakan yang jelas, dari level subkegiatan hingga kontribusinya terhadap pencapaian sasaran program dan, pada akhirnya, tujuan strategis perangkat daerah.

Untuk menjamin akuntabilitas dan validitas data kinerja, setiap indikator keluaran (output) dari subkegiatan yang relevan ditetapkan sebagai Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD). Mekanisme ini diatur dalam kerangka kebijakan Satu Data Indonesia (Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019). Dalam mekanisme ini, DPKP bertindak sebagai Produsen Data, yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, mengolah, dan melaporkan data kinerja dari setiap subkegiatan. Data ini kemudian divalidasi oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Walidata sebelum diintegrasikan ke dalam SIPD. Proses ini memastikan bahwa data kinerja yang digunakan untuk perencanaan, penganggaran, dan evaluasi memiliki standar, metadata, dan kode referensi yang baku, sehingga menghasilkan basis data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

4.1.1. Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan

Perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 disusun menggunakan teknik perancangan hierarkis yang sistematis dan berorientasi pada hasil, seperti yang disajikan dalam tabel teknik merumuskan program / kegiatan / subkegiatan renstra PD pemerintah kabupaten gresik berikut.

Tabel IV.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN RENSTRA PD PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.02.0000 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							
- Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah	Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan				Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
		Meningkatkan ketangguhan desa terhadap bencana, mempercepat respons penanganan kebakaran, dan menurunkan kerugian pasca bencana.			Rerata Respon Time Rate Penanganan Kebakaran (Menit)		
			Terwujudnya tata kelola internal Dinas yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan dan sasaran Perangkat Daerah		Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (LHE INTERNAL) (Nilai)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran yang mendukung kelancaran tugas kedinasan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	1.05.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya barang milik daerah yang mendukung kelancaran urusan pemerintahan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang untuk operasional kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya kondisi Barang Milik Daerah penunjang urusan sehingga siap pakai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Terlaksananya layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal		Persentase Capaian SPM Sub urusan Pemadam Kebakaran (%)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				Terlaksananya layanan pemadaman dan pengendalian kebakaran serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban dengan tingkat kesiapsiagaan tinggi dan mobilisasi yang cepat sesuai standar SPM.	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran/Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran/Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01.0022 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01.0026 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Berfungsinya sistem komunikasi dan informasi kedaruratan (termasuk SKIK) secara optimal untuk mendukung kecepatan respons.	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran/Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
					Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)	1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	
					Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1.05.04.2.01.0015 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
					jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0016 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	
					Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01.0020 - Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0021 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	1.05.04.2.01.0023 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	
					Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang)	1.05.04.2.01.0024 - Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	
					Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penangulangan Kebakaran/Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01.0025 - Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1.05.04.2.01.0027 - Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota	
				1. Terlaksananya kegiatan pendataan, pemeriksaan, penilaian, dan inspeksi berkala terhadap sarana prasarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung, fasilitas publik, dan tempat kerja/area industri	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
					Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang)	1.05.04.2.02.0004 - Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	
				Tersedianya laporan hasil inspeksi yang akurat dan rekomendasi tindak lanjut untuk peningkatan sistem proteksi kebakaran.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	1.05.04.2.02.0003 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	
					Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	1.05.04.2.02.0005 - Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya proses investigasi yang sistematis dan mendalam terhadap setiap kejadian kebakaran signifikan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan penyebab pasti kejadian kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran	
					Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian (Laporan)	1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)	1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
					Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian (Laporan)	1.05.04.2.03.0002 - Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	
				Tersedianya dokumen dan laporan hasil investigasi kejadian kebakaran yang komprehensif, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan memuat hasil penelitian serta pengujian penyebab kebakaran	Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran (Laporan)	1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran	
					Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran (Laporan)	1.05.04.2.03.0004 - Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparaturnya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di bidang investigasi kejadian kebakaran.	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran (Orang)	1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran	
					Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran (Orang)	1.05.04.2.03.0003 - Peningkatan kompetensi teknis aparaturnya di bidang investigasi kebakaran	
				Terlaksananya program sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran yang menjangkau berbagai segmen masyarakat secara luas dan berkelanjutan	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	
					Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.04.0004 - Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04.0006 - Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	
				Terbentuk dan terbinanya Satuan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) atau kelompok masyarakat peduli api (MPA) yang aktif, terlatih, dan memiliki kapasitas respons awal di tingkat komunitas	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04.0007 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
				Tersedianya materi dan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan kebakaran yang efektif dan mudah diakses oleh publik	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar (Dokumen)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (Unit)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar (Dokumen)	1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	
					Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (Unit)	1.05.04.2.04.0005 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	
				Terlaksananya operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban dengan tingkat keberhasilan tinggi, sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM) yang ditetapkan, serta meminimalkan risiko bagi petugas dan korban	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)	1.05.04.2.05.0002 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan)	1.05.04.2.05.0006 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.05.0007 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1.05.04.2.05.0008 - Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.05.0009 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	1.05.04.2.05.0010 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	
					Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
				Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme aparatur pemadam kebakaran dan penyelamat melalui program pembinaan dan pelatihan berkelanjutan.	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)	1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	

Pendekatan ini memastikan adanya keselarasan vertikal (vertical alignment) antara sasaran strategis daerah yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan program dan kegiatan operasional Perangkat Daerah.

Dasar perumusan ini bertitik tolak dari sasaran RPJMD yang relevan, yaitu "Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah". Sasaran makro ini kemudian diturunkan menjadi Tujuan DPKP, yakni "Terwujudnya pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas daerah yang berkelanjutan". Dari tujuan tersebut, teknik perumusan dilanjutkan dengan menetapkan dua Sasaran strategis yang lebih spesifik dan terukur, yang mencerminkan mandat dan fungsi utama dinas:

1. Sasaran Eksternal (Pelayanan Publik): "Meningkatkan ketangguhan desa terhadap bencana, mempercepat respons penanganan kebakaran, dan menurunkan kerugian pasca bencana". Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja kunci seperti Indeks Risiko Bencana (IRB) dan Rerata Waktu Respons Penanganan Kebakaran (*Response Time Rate*).
2. Sasaran Internal (Tata Kelola): "Terwujudnya tata kelola internal Dinas yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan dan sasaran Perangkat Daerah". Ketercapaian sasaran ini diukur melalui Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kedua sasaran strategis tersebut kemudian menjadi landasan untuk merumuskan dua program utama yang saling menopang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Program 1.05.01)

Program ini dirumuskan untuk menjawab Sasaran Internal. Fungsinya adalah sebagai fondasi operasional yang memastikan seluruh sumber daya organisasi dikelola secara efektif untuk mendukung program inti. Program ini diuraikan lebih lanjut ke dalam beberapa kegiatan utama, seperti:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja (Kegiatan 1.05.01.2.01): Untuk memastikan siklus manajemen kinerja berjalan baik.
- b. Administrasi Keuangan (Kegiatan 1.05.01.2.02): Meliputi subkegiatan vital seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan keuangan.
- c. Administrasi Umum dan Pengelolaan Aset (Kegiatan 1.05.01.2.06 & 1.05.01.2.07): Mencakup pengadaan, pemeliharaan sarana prasarana, dan jasa penunjang perkantoran.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Program 1.05.04)

Program ini merupakan program teknis inti yang dirumuskan untuk mencapai Sasaran Eksternal. Tujuannya adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diukur dengan indikator Persentase Capaian SPM Sub-urusan Pemadam Kebakaran. Program ini dijabarkan secara rinci menjadi kegiatan-kegiatan strategis berikut:

Pencegahan, Pengendalian, dan Pemadaman (Kegiatan 1.05.04.2.01): Berfokus pada upaya proaktif dan responsif, termasuk pembinaan aparatur, pengelolaan sistem informasi, hingga penanganan bahan berbahaya.

- a. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran (Kegiatan 1.05.04.2.02): Dirancang untuk memastikan kepatuhan standar keselamatan pada bangunan dan fasilitas publik.
- b. Investigasi Kejadian Kebakaran (Kegiatan 1.05.04.2.03): Untuk menganalisis penyebab kebakaran sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan.
- c. Pemberdayaan Masyarakat (Kegiatan 1.05.04.2.04): Melibatkan pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) dan edukasi publik untuk meningkatkan kesiapsiagaan komunitas.

- d. Operasi Pencarian dan Pertolongan (Kegiatan 1.05.04.2.05):
Mencakup kegiatan penyelamatan pada kondisi yang membahayakan manusia, baik akibat kebakaran maupun non-kebakaran.

Secara metodologis, setiap kegiatan di atas dipecah lagi menjadi subkegiatan yang sangat spesifik dengan Indikator Output yang jelas (misalnya, jumlah dokumen, jumlah laporan, jumlah personil terlatih). Dengan demikian, teknik perumusan ini secara efektif menerjemahkan visi strategis daerah ke dalam aksi-aksi konkret yang dapat diimplementasikan, dimonitor, dan dievaluasi secara terukur. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap alokasi sumber daya memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

4.1.2. Program Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik untuk periode 2025-2029 dijabarkan ke dalam dua program utama yang secara komprehensif mencakup aspek tata kelola internal dan pelayanan publik. Kedua program ini dirancang untuk memastikan pencapaian sasaran strategis dinas dengan target kinerja dan pagu indikatif yang terukur, sebagaimana dirinci dalam Tabel program perangkat daerah pemerintah kabupaten gresik berikut.

Tabel IV.2 PROGRAM PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					11.317.195.000,00		11.652.837.000,00		12.080.745.000,00		12.685.955.000,00		13.073.241.000,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					9.753.904.000,00		10.043.182.000,00		10.411.981.000,00		10.933.591.000,00		11.267.380.000,00	
Terwujudnya tata kelola internal Dinas yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan dan sasaran Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (LHE INTERNAL) (Nilai)	81,92	81,92	81,92	9.753.904.000,00	81,92	10.043.182.000,00	81,92	10.411.981.000,00	81,92	10.933.591.000,00	81,92	11.267.380.000,00	DPKP Gresik
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					1.563.291.000,00		1.609.655.000,00		1.668.764.000,00		1.752.364.000,00		1.805.861.000,00	
Terlaksananya layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal	Persentase Capaian SPM Sub urusan Pemadam Kebakaran (%)	100	100	100	1.563.291.000,00	100	1.609.655.000,00	100	1.668.764.000,00	100	1.752.364.000,00	100	1.805.861.000,00	DPKP Gresik
TOTAL KESELURUHAN					11317195000.00		11652837000.00		12080745000.00		12685955000.00		13073241000.00	

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Program 1.05.01)

Program ini berfungsi sebagai fondasi tata kelola organisasi yang berorientasi pada akuntabilitas dan efektivitas kinerja internal. Luaran (outcome) yang diharapkan dari program ini adalah "Terwujudnya tata kelola internal Dinas yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan dan sasaran Perangkat Daerah".

Kinerja program ini diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Target nilai SAKIP ditetapkan secara konsisten pada angka 81.92 dari tahun 2024 hingga 2029, yang mengimplikasikan komitmen DPKP untuk mempertahankan standar akuntabilitas yang sangat baik secara berkelanjutan. Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pagu indikatif anggaran diproyeksikan mengalami peningkatan secara gradual, mulai dari Rp9.753.904.000,00 pada tahun 2025 hingga mencapai Rp11.267.380.000,00 pada tahun 2029.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Program 1.05.04)

Program ini merupakan program teknis inti yang merefleksikan mandat utama DPKP dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Luaran yang menjadi sasaran utama adalah "Terlaksananya layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal (SPM)".

Indikator keberhasilan program ini adalah Persentase Capaian SPM Sub-urusan Pemadam Kebakaran, dengan target kinerja yang ditetapkan sempurna pada angka 100% setiap tahunnya selama periode Renstra. Penetapan target maksimal ini menunjukkan komitmen DPKP untuk memberikan pelayanan publik yang paripurna dan sesuai dengan standar nasional. Proyeksi pagu indikatif untuk program ini juga menunjukkan tren peningkatan tahunan, dari Rp1.563.291.000,00 pada tahun 2025 menjadi Rp1.805.861.000,00 pada tahun 2029, guna memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk operasional layanan esensial.

3. Sintesis Program dan Pendanaan

Struktur dua program ini menunjukkan kerangka kerja strategis yang seimbang, di mana penguatan tata kelola internal berjalan selaras dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan pagu indikatif secara konsisten pada kedua program mengindikasikan adanya dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memperkuat kapasitas DPKP. Total keseluruhan anggaran yang dialokasikan meningkat dari

Rp11.317.195.000,00 pada tahun 2025 menjadi Rp13.073.241.000,00 pada tahun 2029, yang menegaskan komitmen untuk mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra ini.

4.2. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Perumusan rencana program, kegiatan, subkegiatan, dan alokasi pendanaan DPKP Kabupaten Gresik untuk periode 2026-2030 didasarkan pada prinsip realisme fiskal (*fiscal realism*). Prinsip ini merupakan pengakuan objektif terhadap keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang menjadi kendala fundamental dalam upaya akselerasi peningkatan mutu layanan. Analisis pada bab-bab sebelumnya secara eksplisit mengidentifikasi adanya diskoneksi strategis antara ambisi untuk modernisasi peralatan dan peningkatan kapasitas respons dengan realitas pagu indikatif anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah. Keterbatasan ini secara langsung berdampak pada penetapan target kinerja, terutama pada indikator kunci seperti "Rerata Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran" (*response time*), yang diproyeksikan mengalami stagnasi selama periode Renstra.

Kondisi ini menegaskan kembali temuan bahwa model operasional DPKP yang ada, meskipun berhasil mencapai target Standar Pelayanan Minimal (SPM), bertumpu pada fondasi sumber daya yang rapuh dan tidak berkelanjutan (*unsustainable*), yang sangat bergantung pada efisiensi operasional luar biasa dan dedikasi personel yang bekerja melampaui kapasitas standar. Oleh karena itu, Rencana Strategis ini tidak hanya

berfungsi sebagai dokumen perencanaan tindakan, tetapi juga sebagai dokumen advokasi yang secara transparan mengartikulasikan kebutuhan investasi strategis untuk mentransformasikan DPKP dari model operasional yang rapuh menuju model yang tangguh dan modern.

Tabel perencanaan berikut ini menyajikan rincian program, kegiatan, subkegiatan, beserta indikator kinerja, target tahunan, dan pagu indikatif anggaran untuk periode 2026-2030. Data yang disajikan merupakan komitmen terukur DPKP dalam menyelenggarakan pelayanan publik dengan sumber daya yang tersedia, seraya menjadi dasar argumentasi untuk penjajakan sumber-sumber pendanaan alternatif.

Tabel IV.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.317.195.000,0 0		11.652.837.000,0 0		12.080.745.000,0 0		12.685.955.000,0 0		13.073.241.000,0 0		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				9.753.904.000,00		10.043.182.000,0 0		10.411.981.000,0 0		10.933.591.000,0 0		11.267.380.000,0 0		
Terwujudnya tata kelola internal Dinas yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan dan sasaran Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah (LHE INTERNAL) (Nilai)	81,92	81,92	9.753.904.000,00	81,92	10.043.182.000,0 0	81,92	10.411.981.000,0 0	81,92	10.933.591.000,0 0	81,92	11.267.380.000,0 0	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14.702.482,00		14.547.959,19		14.395.060,42		16.479.477,51		16.973.860,81		
Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja yang dimiliki	100 %	100 %	14.702.482,00	100 %	14.547.959,19	100 %	14.395.060,42	100 %	16.479.477,51	100 %	16.973.860,81		
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.474.214,00		10.364.130,21		10.255.203,40		11.740.164,93		12.092.369,88		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	10.474.214,00	4	10.364.130,21	4	10.255.203,40	4	11.740.164,93	4	12.092.369,88		
1.05.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4.228.268,00		4.183.828,98		4.139.857,02		4.739.312,58		4.881.490,93		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	4.228.268,00	1	4.183.828,98	1	4.139.857,02	1	4.739.312,58	1	4.881.490,93		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.148.970.264,00		6.084.344.703,98		6.020.398.357,36		6.892.156.781,70		7.098.921.485,15		
Terlaksananya administrasi keuangan yang transparan dan akuntabel	Tingkat Ketersediaan Dokumen Keuangan dan Akuntansi yang dimiliki	100 %	100 %	6.148.970.264,00	100 %	6.084.344.703,98	100 %	6.020.398.357,36	100 %	6.892.156.781,70	100 %	7.098.921.485,15		
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.141.962.825,00		6.077.410.913,03		6.013.537.440,42		6.884.302.398,58		7.090.831.470,54		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	49	49	6.141.962.825,00	49	6.077.410.913,03	49	6.013.537.440,42	49	6.884.302.398,58	49	7.090.831.470,54		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3.052.060,00		3.019.982,91		2.988.242,95		3.420.942,88		3.523.571,16		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	3.052.060,00	1	3.019.982,91	1	2.988.242,95	1	3.420.942,88	1	3.523.571,16		
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				3.955.379,00		3.913.808,04		3.872.673,99		4.433.440,24		4.566.443,45		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3	3	3.955.379,00	3	3.913.808,04	3	3.872.673,99	3	4.433.440,24		4.566.443,45		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				404.257.636,54		400.188.471,60		396.162.073,52		453.750.249,76		473.103.547,96		
Terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perkantoran yang mendukung kelancaran tugas kedinasan	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum	100 %	100 %	404.257.636,54	100 %	400.188.471,60	100 %	396.162.073,52	100 %	453.750.249,76	100 %	473.103.547,96		
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15.208.000,00		15.048.164,21		14.890.008,29		17.046.093,22		17.557.476,02		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	15.208.000,00	1	15.048.164,21	1	14.890.008,29	1	17.046.093,22	1	17.557.476,02		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.868.074,77		7.868.074,77		7.868.074,77		9.216.916,70		12.384.069,56		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	1	7.868.074,77	1	7.868.074,77	1	7.868.074,77	1	9.216.916,70	1	12.384.069,56		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				7.868.074,77		7.868.074,77		7.868.074,77		9.216.916,69		12.384.069,55		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	1	7.868.074,77	1	7.868.074,77	1	7.868.074,77	1	9.216.916,69	1	12.384.069,55		
1.05.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				46.129.200,00		45.644.382,99		45.164.661,40		51.704.539,94		53.255.676,14		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	46.129.200,00	1	45.644.382,99	1	45.164.661,40	1	51.704.539,94	1	53.255.676,14		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				30.037.234,00		29.721.543,24		29.409.170,39		33.667.641,43		34.677.670,67		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	30.037.234,00	1	29.721.543,24	1	29.409.170,39	1	33.667.641,43	1	34.677.670,67		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)		12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00		
1.05.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				35.416.600,00		35.044.372,21		34.676.056,53		39.697.176,83		40.888.092,13		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	35.416.600,00	1	35.044.372,21	1	34.676.056,53	1	39.697.176,83	1	40.888.092,13		
1.05.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)		12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00		
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				176.389.000,00		174.535.154,98		172.700.793,83		197.708.004,82		203.639.244,96		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	176.389.000,00	12	174.535.154,98	12	172.700.793,83	12	197.708.004,82	12	203.639.244,96		
1.05.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)		12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00		
1.05.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				83.991.453,00		83.108.704,43		82.235.233,54		94.142.960,13		96.967.248,93		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	83.991.453,00	1	83.108.704,43	1	82.235.233,54	1	94.142.960,13	1	96.967.248,93		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.250.000,00		393.875.938,34		863.947.803,21		2.250.000,00		2.250.000,00		
Tersedianya barang milik daerah yang mendukung kelancaran urusan pemerintahan	Tingkat Pemenuhan Ketersediaan Barang Pendukung	100 %	100 %	2.250.000,00	100 %	393.875.938,34	100 %	863.947.803,21	100 %	2.250.000,00	100 %	2.250.000,00		
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	450.000,00	2	450.000,00	0	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00		
1.05.01.2.07.0004 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan (Unit)	0	0	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		25	450.000,00	25	450.000,00	25	450.000,00	25	450.000,00	25	450.000,00		
1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00		
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		391.625.938,34		861.697.803,21		0,00		0,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		1	0,00	1	391.625.938,34	1	861.697.803,21	1	0,00	1	0,00		
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)		100	450.000,00	100	450.000,00	100	450.000,00	100	450.000,00	100	450.000,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.740.179.600,00		2.711.342.528,81		2.682.808.534,70		3.071.802.606,57		3.164.064.684,77		
Tersedianya jasa penunjang untuk operasional kantor	Tingkat Pemenuhan Ketersedian Jasa Penunjang Operasional	100 %	100 %	2.740.179.600,00	100 %	2.711.342.528,81	100 %	2.682.808.534,70	100 %	3.071.802.606,57	100 %	3.164.064.684,77		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				194.199.600,00		192.158.565,91		190.138.983,06		217.671.257,57		224.201.395,30		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	194.199.600,00	12	192.158.565,91	12	190.138.983,06	12	217.671.257,57	12	224.201.395,30		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.545.980.000,00		2.519.183.962,90		2.492.669.551,64		2.854.131.349,00		2.939.863.289,47		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.545.980.000,00	12	2.519.183.962,90	12	2.492.669.551,64	12	2.854.131.349,00	12	2.939.863.289,47		
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				443.544.017,46		438.882.398,08		434.269.170,79		497.151.884,46		512.066.421,31		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpeliharanya kondisi Barang Milik Daerah penunjang urusan sehingga siap pakai	Tingkat Barang Milik Daerah Yang Terpelihara	100 %	100 %	443.544.017,46	100 %	438.882.398,08	100 %	434.269.170,79	100 %	497.151.884,46	100 %	512.066.421,31		
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				123.200.000,00		121.905.170,35		120.623.949,34		138.090.392,22		142.233.103,99		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	29	29	123.200.000,00	29	121.905.170,35	29	120.623.949,34	29	138.090.392,22	29	142.233.103,99		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				25.700.000,00		25.429.893,49		25.162.625,80		28.806.193,83		29.670.379,65		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	29	29	25.700.000,00	29	25.429.893,49	29	25.162.625,80	29	28.806.193,83	29	29.670.379,65		
1.05.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.000.000,00		42.548.070,82		42.100.891,41		48.197.133,65		49.643.047,66		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	80	80	43.000.000,00	80	42.548.070,82	80	42.100.891,41	80	48.197.133,65	80	49.643.047,66		
1.05.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				251.644.017,46		248.999.263,42		246.381.704,24		282.058.164,76		290.519.890,01		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	251.644.017,46	5	248.999.263,42	5	246.381.704,24	5	282.058.164,76	5	290.519.890,01		
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				1.563.291.000,00		1.609.655.000,00		1.668.764.000,00		1.752.364.000,00		1.805.861.000,00		
Terlaksananya layanan pemadam kebakaran dan penyelamatan sesuai ketentuan Standar Pelayanan Minimal	Persentase Capaian SPM Sub urusan Pemadam Kebakaran (%)	100	100	1.563.291.000,00	100	1.609.655.000,00	100	1.668.764.000,00	100	1.752.364.000,00	100	1.805.861.000,00	1.05.0.00.0.00.02.00 00 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.305.609.651,00		1.308.901.585,92		1.278.140.636,31		1.464.389.293,59		1.508.563.972,41		
Berfungsinya sistem komunikasi dan informasi kedaruratan (termasuk SKIK) secara optimal untuk mendukung kecepatan respons.	Tingkat Capaian SPM DAMKAR Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit	100 %	100 %	59.137.840,00	100 %	58.577.785,82	100 %	58.023.617,81	100 %	65.578.398,76		67.370.250,72		
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				4.795.200,00		4.744.802,54		4.694.934,76		5.374.765,01		5.536.007,96		
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1	1	4.795.200,00	1	4.744.802,54	1	4.694.934,76	1	5.374.765,01	1	5.536.007,96		
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				4.795.200,00		4.744.802,54		4.694.934,76		5.374.765,01		5.536.007,96		
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	50	67	4.795.200,00	67	4.744.802,54	67	4.694.934,76	67	5.374.765,01	67	5.536.007,96		
1.05.04.2.01.0008 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				24.935.040,00		24.672.973,21		24.413.660,73		27.948.778,03		28.787.241,37		
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1	1	24.935.040,00	1	24.672.973,21	1	24.413.660,73	1	27.948.778,03	1	28.787.241,37		
1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	3	3	450.000,00		450.000,00		450.000,00	18	450.000,00		450.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.01.0012 - Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran (laporan)	119	141	450.000,00	141	450.000,00	141	450.000,00	141	450.000,00	141	450.000,00		
1.05.04.2.01.0013 - Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	3	3	450.000,00		450.000,00		450.000,00	18	450.000,00		450.000,00		
1.05.04.2.01.0014 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran (Dokumen)	0	5	450.000,00	5	450.000,00	5	450.000,00	5	450.000,00	5	450.000,00		
1.05.04.2.01.0015 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)	3	3	450.000,00		450.000,00		450.000,00	18	450.000,00		450.000,00		
1.05.04.2.01.0016 - Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran (Dokumen)	2	50	450.000,00	50	450.000,00	50	450.000,00	50	450.000,00	50	450.000,00		
1.05.04.2.01.0018 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				18.762.400,00		18.565.207,53		18.370.087,56		21.030.090,71		21.660.993,43		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1	1	18.762.400,00	1	18.565.207,53	1	18.370.087,56	1	21.030.090,71	1	21.660.993,43		
1.05.04.2.01.0019 - Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga (Keluarga)	1.000	1.000	450.000,00	1.000	450.000,00	1.000	450.000,00	1.000	450.000,00	1.000	450.000,00		
1.05.04.2.01.0020 - Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00		
1.05.04.2.01.0021 - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00		
1.05.04.2.01.0023 - Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Dokumen)			450.000,00	3	450.000,00		450.000,00	18	450.000,00		450.000,00		
1.05.04.2.01.0024 - Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi (Orang)		5	450.000,00	5	450.000,00	5	450.000,00	5	450.000,00	5	450.000,00		
1.05.04.2.01.0025 - Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran/ Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran/ Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)		1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00		
1.05.04.2.01.0027 - Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota (Dokumen)		1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00		
Terlaksananya layanan pemadaman dan pengendalian kebakaran serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban dengan tingkat kesiapsiagaan tinggi dan mobilisasi yang cepat sesuai standar SPM.	Tingkat Capaian SPM DAMKAR Pemenuhan tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit	100 %	100 %	1.246.471.811,00	100 %	1.250.323.800,10	100 %	1.220.117.018,50	100 %	1.398.810.894,83	100 %	1.441.193.721,69		
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				333.922.000,00		330.412.486,16		326.939.857,24		374.281.006,09		385.509.436,28		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	12	365	333.922.000,00	365	330.412.486,16	365	326.939.857,24	365	374.281.006,09	365	385.509.436,28		
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	12	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	12	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00		
1.05.04.2.01.0005 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				251.046.799,00		248.408.301,94		245.797.535,43		281.389.212,17		289.830.888,54		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)	12	12	251.046.799,00	12	248.408.301,94	12	245.797.535,43	12	281.389.212,17	12	289.830.888,54		
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				659.703.012,00		669.703.012,00		645.579.625,83		741.340.676,57		764.053.396,87		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	108	200	659.703.012,00	200	669.703.012,00	196	645.579.625,83	224	741.340.676,57	231	764.053.396,87		
1.05.04.2.01.0022 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	365	365	450.000,00	365	450.000,00	365	450.000,00	365	450.000,00	365	450.000,00		
1.05.04.2.01.0026 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	365	365	450.000,00	365	450.000,00	365	450.000,00	365	450.000,00	365	450.000,00		
1.05.04.2.02 - Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				59.448.450,00		58.833.106,91		58.224.231,06		66.524.824,86		68.493.569,62		
1. Terlaksananya kegiatan pendataan, pemeriksaan, penilaian, dan inspeksi berkala terhadap sarana prasarana proteksi kebakaran pada bangunan gedung, fasilitas publik, dan tempat kerja/area industri	Tingkat Cakupan Layanan Inspeksi Proteksi Kebakaran di Wilayah Gresik.	100 %	100 %	41.509.250,00	100 %	41.077.718,07	100 %	40.650.721,52	100 %	46.471.817,66	100 %	47.852.472,20		
1.05.04.2.02.0001 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				4.168.950,00		4.125.134,42		4.081.779,33		4.672.824,19		4.813.008,92		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1	1	4.168.950,00	1	4.125.134,42	1	4.081.779,33	1	4.672.824,19	1	4.813.008,92		
1.05.04.2.02.0002 - Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				36.890.300,00		36.502.583,65		36.118.942,19		41.348.993,47		42.589.463,28		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Dokumen)	1	1	36.890.300,00	1	36.502.583,65	1	36.118.942,19	1	41.348.993,47	1	42.589.463,28		
1.05.04.2.02.0004 - Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran (Orang)	5	5	450.000,00	5	450.000,00	5	450.000,00	5	450.000,00	5	450.000,00		
Tersedianya laporan hasil inspeksi yang akurat dan rekomendasi tindak lanjut untuk peningkatan sistem proteksi kebakaran.	Tingkat Cakupan Layanan Inspeksi Proteksi Kebakaran di Wilayah Gresik.	100 %	100 %	17.939.200,00	100 %	17.755.388,84	100 %	17.573.509,54	100 %	20.053.007,20	100 %	20.641.097,42		
1.05.04.2.02.0003 - Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	1	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00		
1.05.04.2.02.0005 - Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				17.489.200,00		17.305.388,84		17.123.509,54		19.603.007,20		20.191.097,42		
Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran (Laporan)	2	2	17.489.200,00	2	17.305.388,84	2	17.123.509,54	2	19.603.007,20	2	20.191.097,42		
1.05.04.2.03 - Investigasi Kejadian Kebakaran				1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		1.800.000,00		
Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di bidang investigasi kejadian kebakaran.	Tingkat Efektivitas Investigasi Kejadian Kebakaran dalam Menghasilkan Rekomendasi Kunci untuk Perbaikan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan.	100 %	5	450.000,00	100 %	450.000,00	100 %	450.000,00	100 %	450.000,00	100 %	450.000,00		
1.05.04.2.03.0003 - Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran (Orang)		5	450.000,00	5	450.000,00	5	450.000,00	5	450.000,00	5	450.000,00		
Terlaksananya proses investigasi yang sistematis dan mendalam terhadap setiap kejadian kebakaran signifikan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan penyebab pasti kejadian kebakaran	Tingkat Efektivitas Investigasi Kejadian Kebakaran dalam Menghasilkan Rekomendasi Kunci untuk Perbaikan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan.	100 %	100 %	900.000,00	100 %	900.000,00	100 %	900.000,00	100 %	900.000,00	100 %	900.000,00		
1.05.04.2.03.0001 - Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian (Dokumen)		1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00		
1.05.04.2.03.0002 - Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian (Laporan)		1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00		
Tersedianya dokumen dan laporan hasil investigasi kejadian kebakaran yang komprehensif, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan memuat hasil penelitian serta pengujian penyebab kebakaran	Tingkat Efektivitas Investigasi Kejadian Kebakaran dalam Menghasilkan Rekomendasi Kunci untuk Perbaikan Sistem Pencegahan dan Penanggulangan.	100 %	100 %	450.000,00	100 %	450.000,00	100 %	450.000,00	100 %	450.000,00	100 %	450.000,00		
1.05.04.2.03.0004 - Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran (Laporan)		1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00		
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				33.543.732,00		33.214.835,47		32.889.395,65		37.326.004,27		38.378.284,39		
Terbentuk dan terbinanya Satuan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) atau kelompok masyarakat peduli api (MPA) yang aktif, terlatih, dan memiliki kapasitas respons awal di tingkat komunitas	Tingkat Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran di Wilayah Gresik	100 %	100%	11.663.532,00	100 %	11.545.677,99	100 %	11.429.062,63	100 %	13.018.839,55	100 %	13.395.904,73		
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				11.213.532,00		11.095.677,99		10.979.062,63		12.568.839,55		12.945.904,73		
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	210	182	11.213.532,00	180	11.095.677,99	178	10.979.062,63	204	12.568.839,55	210	12.945.904,73		
1.05.04.2.04.0007 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan)	210	182	450.000,00	180	450.000,00	178	450.000,00	204	450.000,00	210	450.000,00		
Terlaksananya program sosialisasi dan edukasi pencegahan kebakaran yang menjangkau berbagai segmen masyarakat secara luas dan berkelanjutan	Tingkat Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran di Wilayah Gresik	100 %	100 %	20.980.200,00	100 %	20.769.157,48	100 %	20.560.333,02	100 %	23.407.164,72	100 %	24.082.379,66		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				20.080.200,00		19.869.157,48		19.660.333,02		22.507.164,72		23.182.379,66		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.800	2.021	20.080.200,00	2.000	19.869.157,48	1.979	19.660.333,02	2.266	22.507.164,72	2.334	23.182.379,66		
1.05.04.2.04.0004 - Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran (Orang)		7.500	450.000,00	7.500	450.000,00	7.500	450.000,00	7.500	450.000,00	7.500	450.000,00		
1.05.04.2.04.0006 - Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Terlaksananya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya (Orang)		7.500	450.000,00	7.500	450.000,00	7.500	450.000,00	7.500	450.000,00	7.500	450.000,00		
Tersedianya materi dan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) pencegahan kebakaran yang efektif dan mudah diakses oleh publik	Tingkat Cakupan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran di Wilayah Gresik	100 %	100 %	900.000,00	100 %	900.000,00	100 %	900.000,00	100 %	900.000,00	100 %	900.000,00		
1.05.04.2.04.0003 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Spras Damkar (Dokumen)		1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00		
1.05.04.2.04.0005 - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran (Unit)		356	450.000,00	356	450.000,00	356	450.000,00	356	450.000,00	356	450.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.05 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia				162.889.167,00		206.905.471,70		297.709.736,98		182.323.877,28		188.625.173,58		
Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme aparatur pemadam kebakaran dan penyelamat melalui program pembinaan dan pelatihan berkelanjutan.	Tingkat Capaian SPM DAMKAR Mutu Layanan	100 %	100 %	450.000,00	100 %	450.000,00	100 %	450.000,00	100 %	450.000,00	100 %	450.000,00		
1.05.04.2.05.0004 - Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal (Laporan)		12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00		
Terlaksananya operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan korban dengan tingkat keberhasilan tinggi, sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual (NSPM) yang ditetapkan, serta meminimalkan risiko bagi petugas dan korban	Tingkat Capaian SPM DAMKAR Mutu Layanan	100 %	100 %	162.439.167,00	100 %	206.455.471,70	100 %	297.259.736,98	100 %	181.873.877,28	100 %	188.175.173,58		
1.05.04.2.05.0001 - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia				64.492.000,00		63.814.190,31		63.143.504,39		72.286.733,56		74.455.335,57		
Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia (Laporan)	12	12	64.492.000,00	12	63.814.190,31	12	63.143.504,39	12	72.286.733,56	12	74.455.335,57		
1.05.04.2.05.0002 - Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar (Dokumen)	12	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00		
1.05.04.2.05.0005 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi				95.247.167,00		139.941.281,39		231.416.232,59		106.887.143,72		111.019.838,01		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis (Unit)	28	24	95.247.167,00	24	139.941.281,39	24	231.416.232,59	27	106.887.143,72	28	111.019.838,01		
1.05.04.2.05.0006 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Laporan)	12	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00	12	450.000,00		
1.05.04.2.05.0007 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Terselenggaranya pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)		24	450.000,00	24	450.000,00	24	450.000,00	24	450.000,00	24	450.000,00		
1.05.04.2.05.0008 - Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal (Dokumen)		1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00	1	450.000,00		
1.05.04.2.05.0009 - Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)		24	450.000,00	24	450.000,00	24	450.000,00	24	450.000,00	24	450.000,00		
1.05.04.2.05.0010 - Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)				450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		450.000,00		
Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat (Laporan)		356	450.000,00	356	450.000,00	356	450.000,00	356	450.000,00	356	450.000,00		

Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Tahun 2030 yang tercantum dalam Rencana Strategis ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah. Rencana tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPKP Tahun 2030 sebelum ditetapkan Peraturan Bupati tentang Renstra Perangkat Daerah periode 2030-2034.

4.2.1. Strategi Mengatasi Keterbatasan Pendanaan

Menyadari bahwa ketergantungan tunggal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak akan mencukupi untuk mewujudkan transformasi yang dibutuhkan, DPKP Gresik akan secara proaktif menerapkan strategi pendanaan multi-sumber dan memaksimalkan efisiensi melalui inovasi.

1. Eksplorasi Sumber Pendanaan Alternatif:

- a. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL/CSR): DPKP akan secara sistematis menjalin kemitraan dengan perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Kabupaten Gresik, khususnya yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE). Kemitraan ini akan diarahkan untuk pendanaan pengadaan alat pelindung diri (APD) khusus, peralatan penanganan B3, atau program edukasi keselamatan kebakaran bagi masyarakat di sekitar kawasan industri.
- b. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU): Penjajakan skema KPBU akan dilakukan untuk proyek-proyek infrastruktur strategis, seperti pembangunan atau revitalisasi pos pemadam kebakaran di wilayah dengan risiko tinggi namun jangkauan layanan rendah. Skema ini memungkinkan investasi swasta dalam pembangunan aset publik dengan mekanisme pengembalian investasi yang disepakati.
- c. Sinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD): Kolaborasi dengan BUMD akan diperkuat, misalnya dengan Perumda Giri Tirta untuk pemeliharaan dan penambahan jaringan hidran

kota, atau dengan BUMD lain dalam bentuk penyediaan sumber daya atau dukungan logistik saat operasi darurat.

- d. Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Hibah Pemerintah Pusat/Provinsi: Dengan memposisikan perannya sebagai pelindung aset dan proyek strategis nasional, DPKP akan secara aktif menyusun proposal untuk mengakses DAK Fisik maupun Nonfisik dari pemerintah pusat, serta dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Optimalisasi Kinerja Melalui Inovasi:

Inovasi bukan hanya menjadi tujuan, melainkan juga instrumen strategis untuk memaksimalkan dampak dari setiap sumber daya yang ada. DPKP akan melanjutkan dan memperkuat inovasi yang telah terbukti efektif serta meluncurkan inisiatif baru:

- a. FORPEKA (Forum Pemadam Kebakaran): Forum ini akan terus diberdayakan sebagai platform kolaborasi antara DPKP dengan pengelola keselamatan di kawasan industri, gedung bertingkat, dan fasilitas publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan standar keselamatan internal dan membangun kapabilitas respons awal di setiap entitas, sehingga mengurangi beban DPKP saat terjadi insiden.
- b. SIP KE MAS (Sistem Informasi Pelayanan Kebakaran Masyarakat): Sistem Informasi ini akan dikembangkan lebih lanjut untuk tidak hanya berfungsi sebagai media pelaporan, tetapi juga sebagai platform edukasi publik interaktif dan sistem peringatan dini berbasis komunitas.
- c. DAMKAR GRESIK SIAP (Sinergi, Inovasi, Adaptif, dan Profesional): Inovasi baru ini dirancang sebagai kerangka kerja internal untuk memperkuat budaya organisasi. Fokusnya adalah pada peningkatan sinergi antar-bidang, mendorong inovasi proses kerja, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan risiko, dan memastikan profesionalisme personel melalui pelatihan berkelanjutan. Inovasi ini bertujuan

untuk meningkatkan efisiensi operasional dan efektivitas taktis di lapangan.

4.2.2. Rencana Inovasi Strategis 2025-2029

Untuk menjawab tantangan eskalasi risiko industri dan keterbatasan sumber daya, DPKP Gresik akan mengadopsi serangkaian inovasi transformatif yang terbagi dalam tiga pilar utama:

Pilar I: Tata Kelola Adaptif dan Kemitraan Strategis Pilar ini berfokus pada perbaikan fundamental di level kebijakan, perencanaan, dan koordinasi untuk menciptakan fondasi kelembagaan yang responsif.

a. **Reformasi Perencanaan & Anggaran Berbasis Kinerja:**

Mengubah fokus perencanaan dari *output* administratif menjadi *outcome* layanan yang berdampak. Setiap usulan anggaran akan didasarkan pada analisis risiko yang jelas, mengubah narasi dari "biaya operasional" menjadi "investasi perlindungan aset daerah".

b. **Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS) Proteksi Kawasan**

Industri: Membentuk "Forum Keselamatan KEK Gresik" yang beranggotakan DPKP dan seluruh perusahaan berisiko tinggi di kawasan tersebut. Tujuannya adalah membangun kerangka kerja hukum dan operasional untuk berbagi tanggung jawab dalam mitigasi risiko industri dan penanganan insiden Hazmat.

Pilar II: Modernisasi Kapasitas Operasional dan SDM Pilar ini bertujuan meningkatkan kapasitas teknis di lapangan melalui modernisasi sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia yang terspesialisasi.

a. **"Gresik Command Center 4.0":** Mentransformasikan sistem

komunikasi konvensional menjadi pusat komando cerdas yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber (CCTV, sensor, laporan warga) untuk pengambilan keputusan taktis yang lebih cepat dan akurat.

- b. **Rencana Induk Pengembangan SDM 2030 - "Mencetak Pasukan Elit"**: Mengembangkan rencana induk SDM yang komprehensif, termasuk matriks pelatihan wajib untuk setiap jenjang karir dan pemetaan sertifikasi nasional dari Kemnaker (Kelas D, C, B, A) dan BNSP (*Fireman, Fire Officer*).
- c. **Modernisasi Armada dan Sarpras Berbasis Risiko**: Melakukan studi penentuan lokasi pos pemadam baru menggunakan analisis Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk memodelkan waktu tempuh riil. Hasil studi ini akan menjadi dasar untuk pengadaan minimal satu jenis unit baru setiap tahunnya sesuai prioritas risiko.

Pilar III: Resiliensi Komunitas dan Mitigasi Proaktif Pilar ini menggeser paradigma dari respons reaktif menjadi pencegahan proaktif dengan melibatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam menciptakan lingkungan yang aman.

- a. **Program "Adopsi REDKAR" oleh Korporasi**: Meluncurkan program di mana perusahaan dapat "mengadopsi" satu atau lebih unit Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar) di desa-desa sekitar wilayah operasionalnya, dengan memberikan dukungan peralatan, pelatihan, dan insentif.
- b. **Kampanye Pencegahan Karhutla "GRESIK SADAR API"**: Mengadakan kampanye tahunan yang intensif dari April hingga Oktober, dengan fokus pada edukasi bahaya dan sanksi hukum dari praktik pembukaan lahan dengan cara membakar.
- c. **Pilot Project "Hidran Kampung Gresik"**: Meluncurkan proyek percontohan di Rukun Warga (RW) yang teridentifikasi sebagai area paling padat, rawan kebakaran, dan sulit diakses. Proyek ini meliputi instalasi hidran pilar sederhana yang terhubung dengan sumber air dan dikelola oleh komunitas terlatih.

Tabel IV.4 Matriks Rencana Aksi Inovasi DPKP Gresik 2025-2029

PILAR INOVASI	INOVASI	LANGKAH AKSI UTAMA	KELUARAN (OUTPUT)	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
I. TATA KELOLA ADAPTIF & KEMITRAAN STRATEGIS	1. Reformasi Perencanaan & Anggaran Berbasis Kinerja	- Redefinisi indikator kinerja Renstra & Renja. - Implementasi proposal anggaran berbasis risiko. - Penetapan target kinerja yang progresif & realistis.	- Dokumen Renstra & Renja dengan indikator berbasis outcome. - Dokumen usulan anggaran (RKA) yang argumentatif. - Tabel target kinerja yang logis dan akuntabel.	2025 - 2026	DPKP Gresik (Bidang Perencanaan & Keuangan)
	2. KPS Proteksi Kawasan Industri Strategis	- Pembentukan Forum Keselamatan KEK Gresik. - Penyusunan skema KPS untuk berbagi sumber daya (peralatan, personel) dalam penanganan insiden Hazmat.	- Terbentuknya Forum Keselamatan KEK Gresik. - Dokumen Nota Kesepahaman (MoU) KPS.	2026	DPKP Gresik (Bidang Pencegahan & Operasional)
	3. "Gresik Command Center 4.0"	- Kajian kebutuhan dan penyusunan DED. - Pengadaan hardware & software secara bertahap. - Integrasi data (CCTV, sensor, laporan warga). -	- Dokumen DED Command Center. - Sistem Command Center 4.0 beroperasi secara parsial. - Operator terlatih.	2026 - 2028	DPKP Gresik (Bidang Sarpras & Operasional)
II. MODERNISASI KAPASITAS OPERASIONAL & SDM					

PILAR INOVASI	INOVASI	LANGKAH AKSI UTAMA	KELUARAN (OUTPUT)	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
		Pelatihan operator.			
	4. Rencana Induk Pengembangan SDM 2030	- Analisis kesenjangan kompetensi (competency gap analysis). - Penyusunan matriks pelatihan wajib & sertifikasi per jenjang jabatan. - Kerjasama dengan lembaga sertifikasi (Kemnaker, BNSP).	- Dokumen Rencana Induk SDM. - Matriks Pelatihan & Sertifikasi. - Peningkatan jumlah personel bersertifikat.	2026 - 2029	DPKP Gresik (Bidang SDM & Kepegawaian)
	5. Modernisasi Armada & Sarpras Berbasis Risiko	- Studi penentuan lokasi pos baru menggunakan analisis SIG. - Pengadaan unit armada baru secara bertahap sesuai prioritas risiko (misal: unit Hazmat, unit tangga).	- Dokumen studi kelayakan & DED pos baru. - Bertambahnya unit armada modern.	2026 - 2029	DPKP Gresik (Bidang Sarpras & Perencanaan)
III. RESILIENSI KOMUNITAS & MITIGASI PROAKTIF	6. Program "Adopsi REDKAR" oleh Korporasi	- Sosialisasi program ke perusahaan di kawasan industri. - Penyusunan skema kemitraan & benefit bagi korporasi. - Penandatanganan MoU Adopsi REDKAR.	- Dokumen skema kemitraan "Adopsi REDKAR". - MoU dengan perusahaan. - Unit REDKAR binaan korporasi terbentuk.	2027 - 2029	DPKP Gresik (Bidang Pemberdayaan Masyarakat)

PILAR INOVASI	INOVASI	LANGKAH AKSI UTAMA	KELUARAN (OUTPUT)	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
	7. Kampanye Pencegahan Karhutla "GRESIK SADAR API"	- Desain materi kampanye (sosial media, spanduk). - Pelaksanaan sosialisasi intensif di wilayah rawan (April-Oktober). - Evaluasi dampak kampanye.	- Materi kampanye. - Laporan pelaksanaan sosialisasi tahunan.	2026 - 2029 (Tahunan)	DPKP Gresik (Bidang Pencegahan)
	8. Pilot Project "Hidran Kampung Gresik"	- Identifikasi & pemetaan RW percontohan (padat, rawan, sulit diakses). - Desain teknis dan instalasi hidran pilar sederhana. - Pelatihan tim tanggap darurat komunitas.	- Peta lokasi RW percontohan. - Prototipe Hidran Kampung terpasang. - Komunitas terlatih dalam penggunaan hidran.	2027 - 2028	DPKP Gresik (Bidang Sarpras & Pemberdayaan Masyarakat)

Tabel IV.5 Matriks Pemetaan Inovasi terhadap Sub Kegiatan

PILAR INOVASI	INOVASI	SUB KEGIATAN TERKAIT (NOMENKLATUR KEMENDAGRI)
I. TATA KELOLA ADAPTIF & KEMITRAAN STRATEGIS	1. Reformasi Perencanaan & Anggaran Berbasis Kinerja	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2. KPS Proteksi Kawasan Industri Strategis	- Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kebakaran - Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Lembaga dan Kemitraan
II. MODERNISASI KAPASITAS OPERASIONAL & SDM	3. "Gresik Command Center 4.0"	- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue) Non Kebakaran
	4. Rencana Induk Pengembangan SDM 2030	- Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran - Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

PILAR INOVASI	INOVASI	SUB KEGIATAN TERKAIT (NOMENKLATUR KEMENDAGRI)
III. RESILIENSI KOMUNITAS & MITIGASI PROAKTIF	5. Modernisasi Armada & Sarpras Berbasis Risiko	- Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) - Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran
	6. Program "Adopsi REDKAR" oleh Korporasi	- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran - Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran
	7. Kampanye Pencegahan Karhutla "GRESIK SADAR API"	- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
	8. Pilot Project "Hidran Kampung Gresik"	- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)

4.3. Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kinerja DPKP Kabupaten Gresik secara inheren terintegrasi dengan agenda pembangunan daerah yang lebih luas. Setiap subkegiatan yang dilaksanakan dirancang untuk memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian Visi Bupati Gresik: "Pembangunan Gresik Baru yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat". Secara spesifik, DPKP merupakan salah satu eksekutor kunci dari Misi Ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029, yaitu "Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat".

Peran DPKP dalam misi ini melampaui sekadar fungsi reaktif. Konsep "infrastruktur berkelanjutan" secara implisit mengandung makna ketahanan (resilience). DPKP, melalui fungsi pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran dan non-kebakaran, bertindak sebagai garda terdepan dalam melindungi aset-aset infrastruktur vital—mulai dari jalan, jembatan, fasilitas publik, hingga kawasan industri—dari ancaman yang dapat mengganggu fungsi dan keberlanjutannya. Dengan demikian, investasi pada penguatan

kapasitas DPKP adalah investasi langsung untuk menjamin keberhasilan Misi Ketiga RPJMD.

Tabel IV.6 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Pendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

N O	NAWAKAR SA	PROGRAM KERJA	INDIKATOR	TARGET INDIKATOR						OUTCOME	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				2025	2026	2027	2028	2029	2030										
1	GRESIK TUNTAS	<u>Gresik Integrated Smart System</u> . Sistem satu data terpadu yang mengintegrasikan seluruh data pembangunan baik layanan dasar maupun sektoral secara numerik dan spasial serta membentuk big data yang dapat dimanfaatkan dengan lugas, cepat, aman, dan mudah untuk menunjang seluruh pelayanan publik, demi terciptanya transparansi tata kelola pemerintahan daerah (One Data, One Portal, And Open Access)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	1	1	1	Terwujudnya tata kelola internal Dinas yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan dan sasaran Perangkat Daerah / Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	49.991.453,00	83.991.453,00	83.108.704,43	82.235.233,54	94.142.960,13	96.967.248,93
2		<u>Gresik Rambung Akur</u> Membangun pemerintahan yang kolaboratif dengan terus bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi demi Gresik	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	4	4	4	4	Terwujudnya tata kelola internal Dinas yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsif dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan dan sasaran Perangkat Daerah / Tersusun	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.481.697,00	10.474.214,00	10.364.130,21	10.255.203,40	11.740.164,93	12.092.369,88

		Baru Lebih Maju.								a Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah									
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kontribusi ini dioperasionalkan melalui penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah ke dalam sembilan program prioritas yang dikenal sebagai Nawa Karsa. Matriks berikut memetakan keselarasan antara subkegiatan prioritas DPKP dengan program Nawa Karsa, yang menunjukkan bagaimana fungsi teknis DPKP menjadi enabler bagi pencapaian prioritas pembangunan daerah.

Tabel IV.7 Matriks Keselarasan Subkegiatan Prioritas DPKP dengan Program Prioritas Daerah (Nawa Karsa)

Program Prioritas Nawa Karsa	Deskripsi Program Prioritas	Subkegiatan DPKP yang Mendukung	Justifikasi Kontribusi
Gresik Mapan (<i>Maju, Pintar, dan Aman</i>)	Pembangunan infrastruktur strategis, termasuk program bebas banjir, pembangunan jalan kualitas beton, dan revitalisasi fasilitas kota untuk menciptakan lingkungan yang aman dan modern.	- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan - Penanganan B3 Kebakaran - Investigasi Kejadian Kebakaran	Melindungi infrastruktur yang dibangun dari risiko kebakaran dan insiden lainnya. - Memberikan layanan penyelamatan pada insiden non-kebakaran (misalnya banjir). - Memberikan rasa aman kepada masyarakat dan investor, yang merupakan prasyarat bagi kemajuan daerah.
Gresik Tuntas (<i>Tanggap, Unggul, Nyaman, Transparan, Akuntabel, dan Sustainable</i>)	Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem terintegrasi (Gresik Integrated Smart System), transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik dan kolaboratif.	- Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan - Pemberdayaan Masyarakat - Penyusunan Dokumen NSPM	Menyediakan layanan darurat yang tanggap dan profesional. - Melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan (partisipatif). - Menyusun standar pelayanan yang transparan dan akuntabel sebagai bagian dari tata kelola yang baik.

Program Prioritas Nawa Karsa	Deskripsi Program Prioritas	Subkegiatan DPKP Mendukung	Justifikasi Kontribusi
Gresik Agropolitan	Menjamin kesejahteraan petani dan nelayan melalui program jaminan ketersediaan pupuk, asuransi (GOTani), dan modernisasi sektor agraris dan maritim (Nelayan Berdaulat).	- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran (khususnya kebakaran lahan/hutan) - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan (misal, evakuasi ternak saat banjir)	Melindungi lahan pertanian dari kebakaran yang sering terjadi akibat pembukaan lahan. Memberikan layanan penyelamatan pada aset-aset agraris dan nelayan saat terjadi bencana.
Gema Karya (Gresik Mandiri dan Berkarya)	Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif melalui program pelatihan, penguatan modal, dan branding produk lokal (Program 3B: Bela, Beli, Bagi).	- Inspeksi Peralatan Pencegahan Kebakaran - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Memberikan proteksi terhadap aset-aset UMKM (ruko, pasar, sentra industri kecil) dari bahaya kebakaran. Memberikan edukasi keselamatan kepada pelaku usaha untuk memitigasi risiko.
Gresik Seger (Sejahtera, Bahagia, dan Berdikari)	Peningkatan kesejahteraan sosial melalui program bantuan untuk kelompok rentan (PKH Inklusif), pemberdayaan perempuan (Bunda Puspa), dan dukungan sosial lainnya.	- Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi yang cepat dan manusiawi kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, saat terjadi kondisi darurat, yang merupakan wujud nyata kehadiran negara.

4.4. Subkegiatan yang mendukung Kegiatan Prioritas Utama (KPU) dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan nasional, DPKP Kabupaten Gresik turut berkontribusi dalam pencapaian agenda pembangunan nasional sebagaimana diartikulasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Kontribusi ini diwujudkan melalui dukungan terhadap pelaksanaan berbagai Kegiatan Prioritas Utama (KPU) yang relevan dengan konteks dan kewenangan daerah.

Analisis terhadap daftar KPU dalam RPJMN 2025-2029 mengidentifikasi beberapa KPU yang secara langsung atau tidak langsung bersinggungan dengan tugas dan fungsi DPKP, terutama yang berkaitan dengan ketahanan lingkungan, infrastruktur, dan pengelolaan risiko. Subkegiatan DPKP menjadi faktor pendukung krusial (enabling factor) bagi keberhasilan dan keberlanjutan KPU tersebut di tingkat lokal. Beberapa KPU yang relevan antara lain:

1. Pengelolaan Risiko Daya Rusak Air: RPJMN menekankan pentingnya "pengelolaan risiko daya rusak air yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan bencana melalui integrasi pendekatan struktural dan non-struktural". Subkegiatan DPKP seperti Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam mitigasi bencana (termasuk banjir) secara langsung mendukung peningkatan resiliensi masyarakat dan perlindungan infrastruktur dari daya rusak air.
2. KPU Terkait Pengelolaan Sampah: RPJMN mencantumkan KPU "Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata Kelola Persampahan" dan "Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR". Kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) merupakan salah satu risiko signifikan yang sering terjadi. Subkegiatan Pencegahan Kebakaran dan Pemadaman dan Pengendalian

Kebakaran sangat vital untuk memitigasi risiko kebakaran di TPA, yang tidak hanya mengancam operasional KPU ini tetapi juga menimbulkan dampak lingkungan dan kesehatan yang serius.

3. KPU Pemenuhan Layanan Dasar dan Infrastruktur Desa: Upaya pemenuhan infrastruktur desa harus diiringi dengan sistem proteksi. Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di tingkat desa adalah bentuk dukungan langsung untuk membangun ketangguhan infrastruktur dan masyarakat desa dari bawah.

Dengan demikian, pelaksanaan subkegiatan DPKP bukan hanya merupakan pemenuhan mandat urusan wajib daerah, tetapi juga merupakan manifestasi dari komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyukseskan agenda pembangunan nasional.

4.5. Subkegiatan yang mendukung proyek prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029

Kabupaten Gresik memiliki posisi strategis dalam konstelasi ekonomi nasional karena menjadi lokasi bagi beberapa Proyek Strategis Nasional (PSN) yang memiliki nilai investasi masif dan dampak ekonomi signifikan. Kehadiran PSN ini, terutama di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dan JIPE, secara drastis meningkatkan profil risiko kebakaran dan insiden industri di wilayah tersebut. Hal ini menempatkan DPKP pada posisi yang sangat krusial, bukan lagi sebagai perangkat daerah dengan fungsi pelayanan dasar semata, melainkan sebagai aktor strategis dan enabler fundamental bagi keamanan investasi nasional.

Fungsi DPKP dalam konteks ini adalah melakukan de-risking atau mitigasi risiko terhadap aset-aset nasional bernilai triliunan rupiah. Kegagalan dalam mencegah atau menangani insiden di kawasan PSN tidak hanya akan menyebabkan kerugian finansial dan lingkungan di tingkat lokal,

tetapi juga berpotensi mengganggu rantai pasok nasional, mempengaruhi target ekspor, dan menurunkan kepercayaan investor, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian sasaran RPJMN. RPJMN 2025-2029 sendiri menekankan pentingnya "fasilitasi kelengkapan ekosistem pendukung kawasan industri/kawasan ekonomi khusus" sebagai prasyarat keberhasilan.

Beberapa subkegiatan DPKP secara spesifik dirancang untuk menjawab tantangan ini:

1. Subkegiatan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kebakaran: Subkegiatan ini merupakan garda terdepan dalam mitigasi risiko insiden B3 di KEK Gresik, yang menjadi lokasi bagi industri berat dan teknologi, termasuk smelter tembaga PT Freeport Indonesia. Insiden B3 dapat memiliki dampak katastropik yang melampaui batas-batas properti, mengancam lingkungan dan komunitas sekitar, serta menghentikan operasional PSN secara total.
2. Subkegiatan Inspeksi Peralatan Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran: Subkegiatan ini berfungsi sebagai mekanisme audit dan penegakan standar keselamatan proaktif di fasilitas-fasilitas industri. Melalui inspeksi berkala, DPKP memastikan bahwa pengelola PSN dan industri pendukungnya mematuhi regulasi keselamatan kebakaran, memasang sistem proteksi yang andal, dan memiliki prosedur tanggap darurat yang teruji. Tindakan preventif ini jauh lebih efektif dan efisien daripada upaya responsif setelah insiden terjadi.
3. Subkegiatan Investigasi Kejadian Kebakaran: Meskipun bersifat post-factum, investigasi yang mendalam atas setiap insiden di kawasan industri memberikan pelajaran berharga (lessons learned) yang menjadi dasar untuk perbaikan regulasi, standar keselamatan, dan praktik operasional di masa depan, sehingga meningkatkan ketahanan kawasan industri secara keseluruhan.

Dukungan terhadap PSN ini mereposisi DPKP dari sekadar pusat biaya (cost center) menjadi mitra strategis dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, investasi untuk meningkatkan kapasitas DPKP, khususnya dalam penanganan kebakaran industri dan B3, harus dipandang sebagai investasi untuk melindungi dan menjamin keberlangsungan Proyek Strategis Nasional.

4.6. Subkegiatan Dukungan Asta Cita pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pada level tertinggi perencanaan nasional, Rencana Strategis DPKP Kabupaten Gresik secara koheren terhubung dan memberikan kontribusi pada pencapaian Asta Cita, delapan misi strategis yang dijabarkan sebagai Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029. Kontribusi ini melampaui sekadar tugas teknis pemadaman, melainkan merambah ke ranah stabilitas ekonomi, ketahanan sosial, dan keberlanjutan pembangunan. Keterkaitan ini menunjukkan bahwa DPKP, sebagai perangkat daerah di lini depan, merupakan salah satu implementor kebijakan nasional di tingkat tapak.

Matriks berikut menjabarkan kontribusi subkegiatan-subkegiatan DPKP terhadap Prioritas Nasional (Asta Cita) yang paling relevan.

Tabel IV.8 Matriks Kontribusi Subkegiatan DPKP terhadap Pencapaian Misi Asta Cita (Prioritas Nasional)

<i>Prioritas Nasional (Asta Cita)</i>	<i>Subkegiatan DPKP yang Mendukung</i>	<i>Analisis dan Justifikasi Kontribusi</i>
<i>PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas</i>	- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran - Inspeksi Peralatan Pencegahan Kebakaran - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	DPKP secara langsung melindungi aset infrastruktur publik dan swasta (jalan, pelabuhan, fasilitas energi, kawasan industri) dari ancaman kebakaran dan bencana lainnya. Dengan menjamin keamanan dan ketahanan infrastruktur, DPKP menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi baru, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja berkualitas.

PN 5: <i>Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam</i>	- Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kebakaran - Inspeksi Peralatan Pencegahan Kebakaran - Investigasi Kejadian Kebakaran	Kabupaten Gresik adalah pusat industri hilirisasi nasional. DPKP memberikan proteksi esensial terhadap kawasan industri strategis seperti KEK Gresik dan JIPE. Keandalan sistem proteksi kebakaran dan penanganan B3 menjadi jaminan keamanan operasional bagi industri-industri yang menjadi tulang punggung program hilirisasi nasional.
PN 6: <i>Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan</i>	- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran - Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Melalui program pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di tingkat desa, DPKP membangun ketahanan masyarakat dari tingkat paling bawah. Upaya ini melindungi aset-aset ekonomi masyarakat desa (lahan pertanian, rumah, UMKM) dari bencana yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam kemiskinan.
PN 8: <i>Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya</i>	- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran (khususnya kebakaran hutan dan lahan) - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kebakaran	DPKP berperan penting dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang dapat merusak ekosistem dan menyebabkan polusi udara. Penanganan insiden B3 yang cepat dan tepat mencegah kontaminasi lingkungan yang dapat merusak sumber daya alam secara permanen.

Analisis ini menegaskan bahwa DPKP bukan entitas yang terisolasi. Setiap operasi pemadaman di kawasan industri, setiap sesi penyuluhan di desa, dan setiap inspeksi di gedung bertingkat adalah bagian dari upaya kolektif untuk mewujudkan visi pembangunan nasional.

4.7. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD

Kuantifikasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah diuraikan sebelumnya diwujudkan melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. Indikator ini berfungsi sebagai proksi terukur yang merepresentasikan dampak puncak dari seluruh intervensi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, IKU yang ditetapkan adalah Indeks Risiko Bencana. Pemilihan indikator ini didasarkan pada pandangan bahwa keberhasilan utama organisasi tidak hanya diukur dari kecepatan respons (output), melainkan dari kemampuannya untuk secara sistematis mengurangi tingkat kerentanan dan meningkatkan kapasitas masyarakat serta lingkungan dalam menghadapi potensi bencana (outcome).

Tabel berikut menyajikan proyeksi target penurunan Indeks Risiko Bencana secara bertahap selama periode Rencana Strategis 2025–2029. Penetapan target ini telah mempertimbangkan kondisi awal, kapasitas sumber daya, serta eskalasi program mitigasi dan kesiapsiagaan yang akan diimplementasikan setiap tahunnya.

Tabel IV.9 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030

No.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	105,07	132,58	129,42	126,42	123,55	120,79	117,17	117.17

Pencapaian target penurunan Indeks Risiko Bencana sebagaimana diproyeksikan dalam tabel di atas bukanlah sebuah proses linier, melainkan hasil dari sebuah arsitektur kinerja yang dirancang secara cermat. Diperlukan sebuah kerangka kerja logis yang mampu menjabarkan bagaimana setiap alokasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan di level operasional dapat memberikan kontribusi yang terukur terhadap pencapaian

sasaran strategis di tingkat yang lebih tinggi. Logika kausalitas inilah yang menjadi fondasi dalam memastikan efektivitas dan akuntabilitas implementasi Rencana Strategis.

Keberhasilan implementasi Rencana Strategis ini diukur melalui sebuah rantai hasil (results chain) yang logis, yang menghubungkan pelaksanaan subkegiatan di tingkat operasional dengan pencapaian sasaran dan tujuan strategis di tingkat perangkat daerah. Kerangka kerja ini memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan menghasilkan keluaran (output) yang terukur, yang pada gilirannya berkontribusi pada hasil (outcome) yang lebih tinggi dan berdampak pada masyarakat.

Salah satu contoh paling krusial dari rantai hasil ini adalah bagaimana sebuah subkegiatan dengan alokasi anggaran yang relatif kecil dapat menjadi tuas strategis (strategic lever) untuk mengatasi permasalahan fundamental organisasi. Permasalahan utama DPKP adalah kesenjangan kapasitas akibat keterbatasan sumber daya. Untuk mengatasi ini, diperlukan investasi signifikan dalam penambahan pos, armada, dan personel. Namun, usulan investasi semacam itu memerlukan justifikasi teknis yang kuat, berbasis data, dan komprehensif.

Di sinilah peran strategis dari Subkegiatan Penyusunan Dokumen NSPM (Norma, Standar, Prosedur, dan Manual) menjadi sentral. Salah satu keluaran utama dari subkegiatan ini adalah penyusunan atau pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK). Dokumen RISPK bukanlah sekadar dokumen administratif, melainkan sebuah kajian teknis mendalam yang memetakan tingkat risiko kebakaran di seluruh wilayah kabupaten, menganalisis waktu tanggap (response time) dari pos-pos yang ada, mengidentifikasi kesenjangan cakupan layanan (service coverage gaps), dan merumuskan kebutuhan penambahan sarana dan prasarana secara terukur dan berbasis risiko.

Dengan demikian, alur logis pencapaian sasaran dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Input/Proses: Alokasi anggaran dan sumber daya manusia untuk Subkegiatan Penyusunan Dokumen NSPM.
2. Output: Tersusunnya dokumen RISPK yang valid dan komprehensif.
3. Immediate Outcome: Dokumen RISPK menjadi dasar teknokratis yang kuat untuk mengusulkan program investasi dalam Subkegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran (misalnya, pembangunan pos baru di wilayah utara atau selatan Gresik).
4. Intermediate Outcome: Beroperasinya pos-pos baru akan secara signifikan memperpendek jarak tempuh ke lokasi kejadian di wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau secara optimal, yang secara langsung akan memperbaiki indikator kinerja kunci "Rerata Waktu Tanggap Penanganan Kebakaran".
5. Ultimate Outcome: Perbaikan waktu tanggap ini merupakan pencapaian dari Sasaran RPJMD "Meningkatkan ketangguhan infrastruktur Daerah" dan Sasaran Renstra PD "Meningkatnya kecepatan respons penanganan kebakaran dan penyelamatan", yang pada akhirnya berkontribusi pada Tujuan RPJMD "Terwujudnya transformasi ekonomi Gresik yang didukung pembangunan infrastruktur yang tangguh dan berkelanjutan".

Rantai hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan DPKP dirancang secara strategis, di mana setiap subkegiatan, sekecil apapun, memiliki peran yang telah diperhitungkan dalam arsitektur kinerja yang lebih besar untuk mencapai tujuan akhir organisasi.

4.8. Target keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra PD

Setelah menjabarkan rantai hasil yang menghubungkan input dengan outcome, fokus selanjutnya adalah pada Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan metrik vital yang mengukur aspek paling kritical dari

penyelenggaraan layanan. Untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, tidak ada indikator yang lebih fundamental dalam merefleksikan kualitas dan efektivitas layanan selain **Rerata Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Kebakaran**. Indikator ini secara langsung mengukur kecepatan intervensi sejak laporan diterima hingga unit tiba di lokasi, yang menjadi faktor penentu utama dalam menyelamatkan jiwa dan meminimalkan kerugian harta benda.

Penyajian target untuk IKK ini dalam tabel berikut menuntut pemahaman konteks yang mendalam. Proyeksi target yang statis bukanlah cerminan dari ketiadaan ambisi, melainkan sebuah manifestasi dari **prinsip realisme fiskal** yang menjadi landasan Renstra ini. Disadari sepenuhnya bahwa perbaikan waktu tanggap merupakan prasyarat mutlak bagi peningkatan kualitas layanan, namun hal tersebut bergantung secara signifikan pada investasi kapital dalam penambahan pos, armada, dan personel. Oleh karena itu, tabel berikut menyajikan sebuah baseline kinerja yang realistis di tengah konstrain kapabilitas keuangan daerah, yang sekaligus berfungsi sebagai data dasar (*evidence-based*) untuk advokasi kebijakan penganggaran di masa mendatang.

Tabel IV.10 Target Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 –2030

No.	INDIKATOR KINERJA KUNCI	SATUAN	TARGET AWAL TAHUN 2025	TARGET						KONDISI AKHIR
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rerata Respon Time Rate Penanganan Kebakaran	Menit	48,83	48,83	48,83	48,83	48,83	48,83	48,83	48,83

Data target yang disajikan secara konsisten pada angka 48,83 menit merupakan konsolidasi kuantitatif dari tantangan strategis utama yang dihadapi oleh DPKP Kabupaten Gresik. Angka ini secara eksplisit menjadi pijakan argumentasi dan justifikasi teknokratis bagi keseluruhan arsitektur kinerja dan kebutuhan pengembangan organisasi yang diuraikan dalam dokumen ini. Implikasi strategis dari penetapan target yang stagnan ini, serta bagaimana hal tersebut dianalisis secara mendalam, akan dijabarkan pada bagian selanjutnya.

Puncak dari seluruh arsitektur kinerja yang telah dijabarkan adalah pencapaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK merupakan ukuran keberhasilan paling tinggi yang merefleksikan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah. Untuk periode Renstra 2025-2029, DPKP Kabupaten Gresik menetapkan beberapa IKK yang menjadi fokus utama pemantauan dan evaluasi.

Target keberhasilan pencapaian IKK DPKP Gresik adalah sebagai berikut:

1. Indikator Sasaran DPKP: Rerata Waktu Tanggap (Response Time Rate) Penanganan Kebakaran
 - a. Baseline (2024): 48,83 menit
 - b. Target 2025-2029: 48,83 menit (Stagnan)
 - c. Analisis: Penetapan target yang stagnan untuk indikator ini merupakan manifestasi dari prinsip realisme fiskal yang dianut dalam Renstra ini. Data perencanaan secara eksplisit menyatakan bahwa stagnasi ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk melakukan investasi signifikan dalam penambahan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang menjadi faktor penentu utama waktu tanggap. Meskipun secara strategis tidak ideal, penetapan target ini mencerminkan sebuah perencanaan yang jujur, bertanggung jawab, dan berbasis bukti, yang menghindari penetapan target yang tidak dapat dicapai (unachievable goals) demi menjaga kredibilitas dokumen perencanaan. Target ini sekaligus menjadi justifikasi terkuat untuk mendorong advokasi pembiayaan alternatif sebagaimana diuraikan pada Sub-bab 4.2.
2. Indikator Hasil (Outcome) Program: Persentase Capaian SPM Sub-urusan Kebakaran
 - a. Baseline (2024): 100%
 - b. Target 2025-2030: 100% (Setiap Tahun)
 - c. Analisis: Target 100% untuk capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan komitmen yang tidak dapat ditawar (non-negotiable) karena merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Pencapaian target ini menunjukkan bahwa DPKP mampu memenuhi

standar minimum pelayanan yang diwajibkan oleh pemerintah pusat, seperti memberikan layanan kepada setiap laporan kebakaran yang masuk.

Penetapan kedua IKK ini menyoroti sebuah "jebakan kinerja" (performance trap) yang dihadapi DPKP. Di satu sisi, dinas dapat secara konsisten melaporkan keberhasilan 100% pada indikator program yang diamanatkan secara hukum (pencapaian SPM). Namun, di sisi lain, indikator yang lebih mencerminkan kualitas layanan dan dampak nyata bagi keselamatan publik (waktu tanggap) tidak menunjukkan perbaikan. Kondisi ini berisiko menciptakan persepsi bahwa kinerja dinas sudah optimal, sehingga urgensi untuk investasi tambahan menjadi kurang terlihat oleh para pengambil kebijakan. Oleh karena itu, Renstra ini secara sadar menarasikan kedua target tersebut secara bersamaan: mempertahankan kepatuhan terhadap mandat SPM sambil secara transparan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan yang sesungguhnya memerlukan terobosan dalam kebijakan penganggaran dan investasi strategis.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik periode 2025-2029. Bagian ini menyajikan simpulan strategis yang merangkum keseluruhan analisis, arah kebijakan, dan rencana aksi yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Lebih lanjut, bab ini menetapkan kaidah pelaksanaan yang mencakup mekanisme pengendalian, evaluasi, dan perubahan Renstra untuk menjamin bahwa dokumen ini menjadi instrumen perencanaan yang hidup, adaptif, dan akuntabel dalam pelaksanaannya.

5.1. Kesimpulan

Bagian ini menyajikan sintesis analitis dari keseluruhan dokumen Renstra, merumuskan esensi dari arah transformasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kabupaten Gresik dalam lima tahun mendatang.

5.1.1. Transformasi Strategis DPKP sebagai Pilar Ketahanan Daerah

Rencana Strategis ini secara fundamental memvalidasi dan mengukuhkan pergeseran paradigma peran DPKP. Berdasarkan analisis mendalam pada Bab I dan II, DPKP tidak lagi diposisikan sebagai unit teknis reaktif yang fungsinya terbatas pada respons pasca-kejadian. Sebaliknya, Renstra ini menempatkan DPKP sebagai aktor strategis dan enabler fundamental bagi terwujudnya ketahanan wilayah (*regional resilience*). Kontribusi DPKP secara langsung selaras dengan Visi Bupati Gresik "Pembangunan Gresik Baru yang Berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat" dan secara spesifik merupakan implementasi dari Misi Ketiga RPJMD 2025-2029. Peran ini diwujudkan melalui fungsi proteksi terhadap aset-aset pembangunan dan investasi strategis—termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik dan Java Integrated Industrial and Port Estate (JIPE)—yang menjadi tulang punggung visi pembangunan ekonomi daerah.

5.1.2. Paradoks Kinerja sebagai Justifikasi Investasi Strategis

Analisis kinerja pada Bab II mengungkap sebuah "Paradoks Kinerja" yang menjadi justifikasi utama bagi seluruh usulan program dan pendanaan dalam Renstra ini. Di satu sisi, DPKP telah berhasil menunjukkan kinerja output yang luar biasa, ditandai dengan realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub-urusan Kebakaran yang mencapai 100% dan perolehan Skor Kepuasan Masyarakat (SKM) di atas 92,50 pada tahun 2024. Namun, di sisi lain, kinerja unggul ini dicapai di tengah kondisi defisit input sumber daya yang kritis dan sistemik: defisit personel mencapai 70,6%, ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) standar hanya 10,4%, dan ketiadaan APD khusus penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3/Hazmat) sebesar 100%.

Kesimpulan strategis yang ditarik dari fenomena ini adalah bahwa model operasional DPKP saat ini, yang sangat bergantung pada efisiensi, dedikasi, dan "heroisme" personel di lapangan untuk mengkompensasi kesenjangan sistemik, secara inheren rapuh dan tidak berkelanjutan (unsustainable). Kondisi ini merupakan kerentanan strategis bagi seluruh Kabupaten Gresik. Satu insiden berskala besar atau kompleks di kawasan industri vital berpotensi memicu kegagalan sistemik yang dapat berdampak katastrofik. Oleh karena itu, Renstra ini adalah cetak biru untuk mentransformasikan keberhasilan yang rapuh tersebut menjadi sebuah kapabilitas institusional yang kokoh, modern, dan berketahanan melalui investasi strategis yang terencana.

5.1.3. Institusionalisasi Mandat Baru sebagai Respons Kedaruratan Multi-Ancaman

Data operasional longitudinal dari tahun 2017 hingga 2024 secara empiris membuktikan telah terjadinya transformasi misi institusional secara *de facto*. Beban kerja DPKP kini didominasi oleh operasi penyelamatan non-kebakaran, yang proporsinya telah melonjak dari kurang dari 1% pada tahun 2017 menjadi 52,84% dari total layanan pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa ekspektasi dan kebutuhan masyarakat telah secara organik mereposisi DPKP menjadi sebuah badan respons kedaruratan multi-ancaman (multi-hazard emergency response agency). Namun, kapasitas de

jure (struktur organisasi, alokasi anggaran, spesifikasi kompetensi, dan jenis peralatan) belum sepenuhnya beradaptasi dengan realitas mandat baru ini. Oleh karena itu, tujuan, sasaran, dan program yang dirumuskan dalam Bab III dan IV merupakan upaya sadar dan sistematis untuk menyelaraskan kapabilitas institusional dengan realitas mandat pelayanan di lapangan.

5.1.4. Kerangka Aksi Terukur untuk Menutup Kesenjangan Kapasitas

Sebagai jawaban atas serangkaian permasalahan fundamental yang telah diidentifikasi, Renstra ini menetapkan tiga sasaran strategis yang menjadi pilar utama transformasi untuk periode 2025-2029: (1) Meningkatnya Efektivitas dan Kecepatan Respons Pelayanan Kedaruratan, (2) Menguatnya Sistem Mitigasi dan Ketahanan Daerah terhadap Risiko Bencana, dan (3) Terwujudnya Transformasi Kelembagaan DPKP yang Adaptif dan Berbasis Kinerja. Pencapaian sasaran-sasaran ini akan diimplementasikan melalui serangkaian program dan kegiatan prioritas yang terukur dalam Bab IV. Kerangka aksi ini dirancang untuk secara bertahap menutup kesenjangan kapasitas (capability gap) yang ada, serta memastikan pemerataan akses pelayanan proteksi dasar bagi seluruh masyarakat, termasuk mengatasi blank spot layanan di wilayah Kepulauan Bawean yang merupakan isu pemenuhan hak dasar warga negara.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

Untuk menjamin efektivitas implementasi, akuntabilitas kinerja, dan relevansi strategis dokumen Renstra DPKP Kabupaten Gresik 2025-2029, ditetapkan kaidah pelaksanaan yang mencakup mekanisme pengendalian dan evaluasi. Mekanisme ini disusun dengan mengacu pada kerangka regulasi yang berlaku, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

5.2.1. Mekanisme Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pelaksanaan Renstra merupakan proses pemantauan dan pengawasan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan

terhadap implementasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang telah direncanakan.

1. Tujuan: Pengendalian bertujuan untuk memantau secara berkala kemajuan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Bab IV Renstra, serta untuk mengidentifikasi secara dini potensi kendala, hambatan, dan deviasi dalam pelaksanaannya agar dapat dirumuskan langkah-langkah antisipatif dan korektif yang diperlukan.
2. Pelaksana: Pengendalian internal dilaksanakan secara berjenjang. Kepala Dinas DPKP bertindak sebagai penanggung jawab utama, dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas. Proses ini melibatkan seluruh Kepala Bidang sebagai penanggung jawab program dan kegiatan teknis di lingkup masing-masing.
3. Frekuensi dan Periode: Pengendalian dilaksanakan secara periodik setiap triwulan. Data realisasi kinerja dan anggaran dikompilasi dan dianalisis untuk periode Triwulan I (Januari-Maret), Triwulan II (April-Juni), Triwulan III (Juli-September), dan Triwulan IV (Oktober-Desember) setiap tahunnya.
4. Objek Pengendalian: Objek yang dikendalikan dalam setiap periode mencakup:
 - a. Realisasi pencapaian target keluaran (output) subkegiatan dan hasil (outcome) kegiatan terhadap target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahunan.
 - b. Realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu yang telah dialokasikan untuk setiap program, kegiatan, dan subkegiatan.
 - c. Identifikasi dan analisis permasalahan, kendala, serta faktor-faktor yang mempengaruhi (baik faktor pendorong maupun penghambat) pencapaian target kinerja dan realisasi anggaran.

5. Keluaran (Output): Hasil dari setiap siklus pengendalian adalah dokumen Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Triwulanan. Laporan ini menjadi bahan utama bagi Kepala Dinas dalam menyelenggarakan rapat pimpinan internal dan forum koordinasi untuk merumuskan tindak lanjut, solusi, dan langkah-langkah korektif yang diperlukan guna memastikan pencapaian target tahunan.

5.2.2. Mekanisme Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja merupakan proses penilaian yang sistematis dan objektif terhadap hasil (kinerja) yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

1. Tujuan: Evaluasi bertujuan untuk menilai secara komprehensif tingkat pencapaian sasaran dan tujuan Renstra berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta untuk mengukur efektivitas dan dampak dari strategi dan kebijakan yang telah diimplementasikan selama periode tertentu.
2. Jenis Evaluasi:
 - a. Evaluasi Tahunan: Dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran. Evaluasi ini berfokus pada penilaian pencapaian target kinerja Renja PD tahun berjalan terhadap target yang telah ditetapkan dalam Renstra PD pada tahun yang sama. Hasil evaluasi tahunan ini menjadi masukan krusial untuk:
 - i. Penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati kepada DPRD.
 - ii. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DPKP sebagai wujud akuntabilitas kinerja.
 - iii. Perumusan Rencana Kerja (Renja) DPKP untuk tahun anggaran berikutnya, dengan memastikan

adanya siklus pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

b. Evaluasi Jangka Menengah (Mid-Term Review):

Dilaksanakan pada tahun ketiga periode Renstra, yaitu pada awal tahun 2028 untuk mengevaluasi kinerja kumulatif hingga akhir tahun 2027. Evaluasi ini memiliki cakupan yang lebih strategis dan mendalam, mencakup:

- i. Penilaian terhadap pencapaian kumulatif sasaran-sasaran Renstra hingga pertengahan periode perencanaan.
- ii. Analisis terhadap relevansi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal (misalnya, perubahan kebijakan nasional/daerah, dinamika risiko baru, atau perkembangan teknologi).
- iii. Identifikasi keberhasilan, kegagalan, praktik baik (best practices), dan faktor-faktor penentu yang mempengaruhinya.
- iv. Perumusan rekomendasi strategis untuk sisa periode Renstra, termasuk kemungkinan untuk mengajukan usulan perubahan Renstra jika ditemukan adanya diskrepansi yang fundamental, sebagaimana diatur dalam sub-bab 5.3.

Tabel V.1 Matriks Pengendalian dan Evaluasi Renstra DPKP Kabupaten Gresik 2025-2029

JENIS AKTIVITAS	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	OBJEK/FOKUS UTAMA	INSTRUMEN/MASUKAN UTAMA	KELUARAN/LAPORAN
PENGENDALIAN	Setiap Triwulan	Sekretaris Dinas (Koordinator)	Realisasi kinerja dan anggaran Renja PD	Laporan realisasi dari setiap Bidang	Laporan Pelaksanaan Renja PD Triwulanan
EVALUASI TAHUNAN	Setiap Akhir Tahun Anggaran (Januari Tahun N+1)	Kepala Dinas DPKP	Pencapaian target Renja PD terhadap Renstra PD	Laporan Triwulanan I-IV, LKjIP tahun sebelumnya	Bahan LKPJ, LKjIP Tahunan, Rekomendasi untuk Renja Tahun N+1
EVALUASI JANGKA MENENGAH	Awal Tahun 2028 (untuk kinerja s.d. akhir 2027)	Tim Evaluasi Internal/Eksternal yang ditunjuk Kepala Dinas	Pencapaian kumulatif sasaran Renstra, relevansi strategi	Laporan Evaluasi Tahunan, data capaian kinerja 3 tahun, analisis lingkungan strategis	Laporan Evaluasi Jangka Menengah, Rekomendasi Perubahan Renstra (jika diperlukan)

5.3. Mekanisme Perubahan Rencana Strategis

Dokumen Renstra DPKP Kabupaten Gresik 2025-2029 adalah dokumen perencanaan yang dinamis dan adaptif. Perubahan terhadap Renstra dapat dilakukan untuk menyesuaikan rencana dengan dinamika lingkungan strategis, kebijakan, dan kebutuhan pelayanan, dengan tetap menjaga konsistensi dan keselarasan dengan RPJMD Kabupaten Gresik. Mekanisme perubahan ini mengacu pada tata cara yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

5.3.1. Kondisi Pemicu Perubahan (Triggers for Amendment)

Perubahan Renstra tidak dapat dilakukan secara arbitrer dan harus didasarkan pada salah satu atau beberapa kondisi fundamental berikut:

1. Perubahan Kebijakan Tingkat Atas: Adanya perubahan yang bersifat mendasar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik yang

berimplikasi langsung pada tujuan, sasaran, atau mandat DPKP.

2. Hasil Evaluasi Jangka Menengah: Laporan hasil evaluasi jangka menengah (mid-term review) pada tahun 2027 secara eksplisit merekomendasikan adanya perubahan strategis karena tujuan atau sasaran dinilai tidak lagi relevan, atau strategi yang ada terbukti tidak efektif untuk mencapai sasaran.
3. Terjadinya Keadaan Luar Biasa (Force Majeure): Terjadinya bencana alam berskala besar, krisis ekonomi, pandemi, atau kejadian luar biasa lainnya yang secara fundamental mengubah asumsi dasar, profil risiko, prioritas pembangunan daerah, dan kapasitas fiskal daerah.
4. Perubahan Struktur Organisasi: Adanya perubahan mendasar pada struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) DPKP yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah, yang mengubah tugas dan fungsi perangkat daerah secara signifikan.

5.3.2. Prosedur dan Tahapan Perubahan

Proses perubahan Renstra harus mengikuti tahapan yang sistematis, transparan, dan akuntabel sebagai berikut:

1. Inisiasi: Kepala Dinas DPKP mengajukan usulan perubahan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Usulan ini wajib disertai dengan Naskah Akademik atau kajian komprehensif yang menjelaskan urgensi, latar belakang, analisis dampak, dan substansi perubahan yang diusulkan secara rinci.
2. Konsultasi dan Verifikasi: Usulan perubahan beserta Naskah Akademik disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) untuk diverifikasi. Bappeda akan menelaah usulan tersebut untuk memastikan keselarasan perubahannya dengan dokumen RPJMD Kabupaten Gresik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Penyusunan Rancangan Perubahan: Setelah mendapatkan persetujuan dari Bappeda, Kepala Dinas DPKP membentuk tim internal untuk menyusun rancangan perubahan Renstra sesuai dengan arahan dan substansi yang telah disetujui.
4. Pembahasan dan Finalisasi: Rancangan perubahan Renstra dibahas secara internal dalam forum pimpinan DPKP dan dapat melibatkan konsultasi dengan pemangku kepentingan terkait (misalnya, Bappeda, Bagian Organisasi Setda) untuk mendapatkan masukan dan penyempurnaan.
5. Penetapan: Rancangan akhir perubahan Renstra yang telah difinalisasi kemudian ditetapkan secara formal melalui Peraturan Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik tentang Perubahan Atas Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

5.3.3. Kaidah Adaptabilitas Regulasi

Untuk menjamin kepatuhan hukum yang berkelanjutan dan mengantisipasi potensi adanya regulasi baru di masa depan, ditegaskan bahwa seluruh mekanisme pengendalian, evaluasi, dan perubahan yang diatur dalam Renstra ini akan senantiasa tunduk dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang mungkin diterbitkan oleh Pemerintah Pusat (khususnya Kementerian Dalam Negeri) atau Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten selama periode 2025-2029. DPKP berkomitmen untuk secara proaktif mengadaptasi proses perencanaannya sesuai dengan perkembangan regulasi terkini.

Perlu ditegaskan bahwa penjabaran Rencana Program, Kegiatan, dan Subkegiatan untuk tahun 2030 sebagaimana termaktub dalam dokumen ini merupakan kerangka kerja prospektif yang disusun dalam rangka menjaga kesinambungan siklus perencanaan Perangkat Daerah. Kerangka ini berfungsi sebagai pedoman transisional dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPKP Tahun 2030, yang berlaku hingga ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis DPKP untuk periode 2030-2034.